

DEMOKRASI DIGITAL

DALAM PILKADA SERENTAK 2017



JURNAL **DIALOG**
KEBIJAKAN PUBLIK

EDISI 22 | Desember 2016

DEMOKRASI DIGITAL

DALAM PILKADA SERENTAK 2017

TIM REDAKSI

Pengarah

Rudiantara

(Menteri Kominfo)

Penanggung jawab

Rosarita Niken Widiastuti

(Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik)

Pemimpin Redaksi

Sunaryo

(Direktur Pengelolaan Media Publik)

Readaktur Pelaksana

Mardianto Soemaryo

(Kasubdit Media Cetak)

Tim Tenaga Ahli

Sugeng Bayu Wahyono

Lambang Trijono

Murti Kusuma Wirasti

Penyunting/ Editor

Nurlaili

(Kasubdit Media Online)

Dikdik Sadaka

(Kasubdit Media Luar Ruang dan Audio Visual)

Sekretaris Redaksi

M. Taofik Rauf

Reporter

Elpira Inda Sari N.K.

Ignatius Yosua A.H.

Ardi Timbul H.S.

Resti Aminanda

Nurita Widyanti

Muhammad Arif Febrianto

Desain Grafis

Danang Firmansyah

Sekretariat

Sarnubi

Inu Sudiati

Nixon Elyezer

Monang Hutabarat



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
Direktorat Pengelolaan Media Publik
Menegaja Masyarakat Informasi Indonesia

DAFTAR
ISI

Kehadiran media baru (new media) telah mengubah moda berbagai aspek kehidupan manusia secara cukup signifikan, mulai dari aktivitas politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan.

Dalam kehidupan politik misalnya, kehadiran media baru telah menyodorkan fenomena baru, yaitu apa yang dikenal sebagai demokrasi digital. Bahkan dalam banyak kasus diakui bahwa kehadiran internet misalnya, telah menjadi salah satu faktor diterminan terhadap proses demokratisasi politik. Fenomena politik di kawasan Timur Tengah misalnya, terjadi hembusan demokratisasi yang dikenal dengan istilah “Musim Semi” demokrasi, yang ditandai tumbanganya rezim otoriter mulai dari Muammar Khadafi di Libia, Husni Mubarak di Mesir, dan Sadam Husein di Irak serta beberapa negara lain seperti Tunisia, Aljazair, dan Syria yang masih terus bergolak.

Kehadiran internet terbukti memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap runtuhnya rezim otoriter dan sekaligus menghembuskan harapan baru percepatan demokratisasi. Di Indonesia internet juga cukup berperan dalam mengakhiri pemerintahan otoritarian era Orde Baru, yang kemudian menjadikan Indonesia masuk dalam jajaran negara yang mengalami transisi demokrasi. Berkat internet pula yang kemudian memberikan sumbangan terhadap upaya-upaya penerapan good gacernance, atau tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan pariticipatif. Dalam perkembangan lebih lanjut, internet pula yang kemudian mendorong kelas menengah tampil sebagai lokomotif demokrasi dengan tampil sebagai netizen yang mengawal demokrasi. APJII

(2016) mencatat adanya kenaikan masif pengguna internet sebesar 88,01 juta jiwa dari sekitar 250 juta jiwa penduduk Indonesia. Mayoritas internet diakses melalui perangkat bergerak, seperti telepon pintar sebesar 85 persen berbanding 13 persen dengan laptop/komputer.

Seiring dengan perkembangan semakin masifnya penggunaan internet mengindikasikan bahwa kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi telah membawa demokrasi mengalami pergeseran dan demokrasi masyarakat offline ke arah demokrasi online. Masyarakat sekarang telah bergeser menuju ke arah masyarakat informasi yang sedikit banyak telah mengubah moda komunikasi politik. Melalui internet, masyarakat netizen telah ikut terlibat secara aktif dalam proses-proses pengambilan keputusan strategis dalam bidang kebijakan publik. Kaum netizen juga aktif memberikan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan baik pusat maupun daerah. Tidak terkecuali dalam proses Pilkada, demokrasi digital tampak mulai mengambil peran strategis dengan tampil di ruang publik secara virtual, melakukan diskusi kritis di seputar isu Pilkada.

Akan tetapi, di samping membawa pengaruh positif, kehadiran demokrasi digital juga menyodorkan persoalan serius terkait dengan perilaku para netizen itu sendiri. Adanya meme, pesan viral, trolling, ataupun cyber-bullying adalah bentuk nyata yang sekarang terus menjadi masalah dalam membangun demokrasi digital yang lebih berkualitas. Karakter anomus sering menjadi faktor potensial yang mengarah pada munculnya gejala demokrasi nothing, atau demokrasi yang tidak lebih sekadar keriuahan penuh pergunjungan politik. Penggunaan internet untuk kampanye dalam Pilkada misalnya,

sering kali lebih mengedepankan sisi buruk dari masing-masing pribadi para calon, ketimbang misalnya adu program. Internet melalui media sosial dan jurnalisme online misalnya, lebih banyak digunakan untuk saling menyerang dengan menghembuskan isu primordial seperti sentimen agama, ras, etnis, dan privasi. Oleh karena itu demokrasi digital semakin eksefif yang kurang produktif untuk membangun demokrasi politik secara lebih substansial.

Atas dasar itu, Jurnal Dialog Publik mengangkat tema demokrasi digital dengan mengambil momen Pilkada serentak awal 2017. Sejumlah pertanyaan mendasar dapat disodorkan, bagaimana dinamika demokrasi digital dalam Pilkada serentak 2017? Apakah mengarah pada pelaksanaan kampanye rasional yang mengedepankan program, atau riuh rendah di seputar isu primordial yang saling merendahkan. Apakah kaum netizen akan mengedepan debat publik yang konstruktif, atau ikut terseret dalam tarik-menarik praktik kampanye hitam. Lalu bagaimana negara seharusnya harus mengantisipasi kecenderungan demokrasi digital yang destruktif, sehingga dapat meminimalisir eksefif negatifnya untuk mengembangkan demokrasi digital yang lebih produktif dan konstruktif bagi kehidupan politik. Untuk itu sejumlah topik akan dielaborasi melalui tulisan-tulisan kritis di seputar isu makin maraknya demokrasi digital. Harapannya, agar pelaksanaan Pilkada serentak menjadi bagian dari proses pembelajaran politik warga yang produktif dan kedewasaan berpolitik.

Dimulai dari Asep Gatara yang mencoba

mengkritisi praktek cyberdemocracy di Indonesia yang menurutnya hanya tidak lebih dari sekadar keberisikan politik. Menurut Asep realitas virtual pada ruang komentar *online* misalnya, justru berbanding terbalik, di mana terdapat beberapa karakter melekat yang ditunjukkan pada kegiatan komentar-mengkommentarinya. Misalnya, pengabaian budaya debat rasional, pertukaran posisi subjek dan konsensus, yang penulis sebut sebagai fenomena dedeliberatif; pengabaian kesantunan dalam berkomunikasi, terutama budaya untuk saling menghargai antara subjek. Semua itu menunjukkan adanya fenomena deetika; dan penurunan hubungan sosial yang berbasis kemanusiaan, fenomena dehumanis.

Sementara itu Pratama D. Persada menyoroti praktek cyberdemocracy di Indonesia di samping memiliki sisi positif, tetapi juga ada sisi negatifnya. Pratama melihat adanya fenomena kampanye negatif yang terjadi dalam momen politik seperti Pilpres 2014 dan Pilkada serempak 2017. Pemanfaatan media online, terutama pada media sosial, yang mestinya menjadi bagian dari pencerdasan politik warga, namun pada kenyataannya masih diwarnai praktik politik yang penuh dengan ujaran kebencian, dan bahkan juga kampanye negatif. Dalam analisis Pratama, Cyberdemocracy akan berjalan secara konstruktif dan produktif jika persaratan dasar seperti budaya baca dan tingkat literasi media masyarakat warga sudah cenderung meningkat. Oleh karena itu, sukses tidaknya praktik cyberdemocracy di Indonesia akan sangat bergantung pada upaya mendorong masyarakat warga berkesadaran kritis.

S e l a m a t m e m b a c a .

DEMOKRASI NOTHING KRITIK TERHADAP KONSEP DAN PRAKTEK CYBERDEMOCRACY

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan secara kritis mengenai gejala kontestasi politik yang tidak lagi hanya berlangsung di ruang *offline*, namun juga berlangsung dan semakin bergeser ke ruang *online*. Pergeseran kontestasi politik di ruang *online* itu banyak dikatkan sebagai salah satu wujud dari perkembangan *cyberdemocracy*, yang 'digadang-gadang' telah dan akan terus memberikan harapan baru. Terutama harapan bagi ruang perluasan sekaligus perbaikan mutu demokrasi di ruang *offline*. Pertanyaannya adalah apakah benar demikian? Dan apakah *cyberdemocracy* itu merupakan konsepsi dari demokrasi politik ataukah simulasi belaka? Untuk keperluan pemenuhan tujuan tulisan ini digunakan strategi penelaahan melalui lokus dan studi kasus, yaitu representasi aktor politik di ruang komentar media massa *online*.

Keyword: Cyberdemocracy, Komentar Online, Simulasi, dan Demokrasi Nothing

Oleh **Asep A. Sahid Gatara**¹

1 Asep Sahid Gatara adalah Dosen Ilmu Politik FISIP UIN Bandung; Doktor Kajian Budaya dan Media, Peminatan Demokrasi, Media dan Politik Representasi, di Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir ini, bersamaan dengan dahsyatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), kehidupan demokrasi telah termediasi sedemikian rupa. Tidak lagi hanya termediasi oleh media massa konvensional, seperti media massa cetak dan elektronik, namun demokrasi telah termediasi oleh *new media*, Internet. Misalnya even 101 Pilkada Serentak 2017 yang akan digelar pada tanggal 15 Februari 2017, proses demokrasi seperti kontestasi suara warga, konstruksi opini para tim sukses, dan konstruksi citra para kandidat mulai tidak saja berlangsung secara *face to face* dan *offline*, namun juga telah berlangsung *virtual* dan *online*.² Banyak di antara para calon yang telah membentuk *cyber army* untuk mendulang kemenangan citra melalui wacana dan bahasa di ruang virtual. Termasuk Pilkada yang sejauh ini paling banyak menarik perhatian masyarakat luas, baik masyarakat nusantara maupun masyarakat dunia, yaitu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Oleh sebab itu, dewasa ini politik, terutama dilihat dari ruang pemraktikannya, terbagi menjadi politik *offline* dan politik *online*. Antara keduanya berdinamika dalam hal pengaruh. Apakah politik *online* yang mempengaruhi politik *offline* ataukah sebaliknya di mana politik *online* yang mempengaruhi politik *offline*. Kata pengaruh itu terutama merujuk pada "siapa merujuk atau tunduk kemana" dalam aktivitas politik. Bila kehidupan *offline* menjadi rujukan bagi aktivitas politik *online*, seperti politik perumusan, penyusunan dan penetapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),³ maka ruang *offline* memiliki kekuasaan berupa kontrol terhadap politik *online*. Di sini UU tersebut memiliki jangkauan kontrol dan pendisiplinan pada dunia virtual melalui

piranti hukum. Bertolak dari UU itu, Kompas.com misalnya membuat pedoman bagi para pengunjung, pembaca dan para posting komentar, untuk patuh pada Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, yang merupakan ruang *offline*.

Sebaliknya, bila kehidupan politik *online*, seperti "Gerakkan 1.000.000 Facebooker Ganyang Susno Duadji", pada perseteruan antara Polri vs KPK, atau dikenal dengan perseteruan "Buaya vs Cicak" jilid I, mempengaruhi politik *offline*, maka di sini politik *online* tampil sebagai pemegang kekuasaan dalam bentuk kontrol dan pendisiplinan terhadap politik *offline*. Atau Gerakan dukungan Facebooker dalam pengumpulan koin untuk Prita Mulyasari dalam menghadapi gugatan RS Omni Internasional. Pada kasus ini, ruang *online*, keluh kesah Prita melalui *email*, mendapatkan kontrol dari ruang *offline*, pengaduan pihak RS Omni Internasional ke kepolisian, kemudian menjadi sebaliknya ruang *online*, seperti gerakan Facebooker untuk solidaritas Prita, mengontrol proses hukum di ruang *offline*.

Dalam media studies, deskripsi di atas merupakan bagian dari gejala *Computer-Mediated Communication* (CMC). Hal itu berkelindan dengan era mediasi, di mana segala aspek kehidupan tidak bisa luput dari liputan media, baik media massa maupun media sosial. Oleh sebab itu, aspek kehidupan apa pun, termasuk kehidupan demokrasi, senantiasa termediasikan komputer atau internet. Pertanyaannya, demokrasi seperti apakah yang termediasi internet tersebut? Sejauh ini masyarakat awam, dalam kajian ilmu politik konvensional, mungkin hanya mengenal demokrasi ideal dan demokrasi aktual seperti yang pernah dipopulerkan oleh Robert Dahl, atau terminologi demokrasi substansial dan demokrasi prosedural yang dikenalkan oleh Samuel P. Huntington.⁴

Dalam buku *Communication, Cultural, & Media Studies*, yang ditulis John Hartley (2010), proses demokrasi yang berlangsung

² Mengadaptasi dari artikel penulis, Gatara, Asep Sahid., 2012, "Paradoks Demokrasi Cyber", Bandung: Tribun Jabar, 04/09/2012.

³ Undang-Undang ITE ini telah diundangkan, yakni UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Belakangan UU ITE itu telah mengalami revisi.

⁴ Gatara, *loc cit.*

dalam dunia virtual dijuluki *Cyberdemocray*, yakni komunitas virtual yang memiliki aturan sendiri. Di sini demokrasi hidup di dunia virtual dengan mediasi internet.⁵

Seperti halnya demokrasi di ruang aktual, *cyberdemocracy* atau demokrasi *cyber* hanya bisa bertahan ketika adanya ruang publik, khususnya ruang publik dalam internet (ruang publik virtual). Dan memang ruang publik virtual merupakan pra-syarat bagi berkeberlangsungan demokrasi *cyber*. Di ruang itu terdapat nilai dan praktik konektivitas, intraktivitas dan anonimitas, sehingga memproduksi asas langsung, komunikatif, bebas dan rahasia. Dalam demokrasi politik di ruang aktual, sejatinya asas-asas tersebut juga telah lebih awal menjadi keharusan.⁶

Demokrasi *cyber* yang mensyaratkan ruang publik virtual, di satu sisi akan menjadi nilai surplus bagi demokrasi, dan di sisi lain, akan menjadi nilai defisit. Nilai surplus misalnya berupa makin meluasnya kebebasan warga internet dalam berkoneksi, berekspresi, berkelompok, berkontestasi suara, dan bertukar informasi. Ini tentunya menjadi peluang bagi penguatan kehidupan demokrasi politik.

Nilai surplus itu dimungkinkan tegak terkait dengan karakteristik ruang virtual yang 'cair'. Di samping itu di ruang virtual dimungkinkannya pemakaian asas anonimitas atau multi identitas bagi *user*. Dengan asas itu, pada satu sisi warga memiliki jaminan keamanannya dari berbagai ancaman intimidasi dan dominasi, baik dari lingkungan masyarakat virtual itu sendiri, maupun dari lingkungan masyarakat aktual, seperti kekuasaan negara. Memang ruang publik, baik virtual maupun aktual, senantiasa akan tetap hidup dan bertahan manakala terbebas dari ancaman kekuasaan apapun, termasuk kekuasaan pemilik institusi media massa.⁷

Namun di sisi lain, penggunaan asas anonimitas atau multi identitas itu, belakangan justru menjadi salah satu titik

defisit atau titik problematis pada demokrasi di ruang virtual itu sendiri. Misalnya, semakin maraknya penyalahgunaan asas tersebut dengan pembiasaan "lempar batu sembunyi tangan". Oran semakin banyak memanfaatkan kebebasan itu untuk bersuara keras, berteriak-teriak dan vulgar di ruang virtual.

Namun sayangnya, mereka ia tidak mau bertanggung jawab atas segala ujarannya itu. Mereka lebih memilih berlindung di balik anonimitas atau multi identitas itu. Berpijak pada itu, melanjutkan pertanyaan dari permasalahan di atas, apakah ada peningkatan dan perluasan dan perbaikan demokrasi di ruang virtual? Berikut di bawah ini gambaran kontestasi politik sebagai penjelasan terhadap pemasalahan pada makalah ini.

Irisan Harapan Baru dan Palsu

Pada awalnya *cyberdemocracy* dibayangkan beroperasi pada seluruh ruang *cyber*. Hal itu didasari oleh asumsi optimisme bahwa internet pada hakikatnya merupakan ruang publik, yakni, ruang di mana kebebasan informasi lahir dan hadir dengan kondisi sehat, universal dan kuat. Hanya saja, terkait dengan mulai berlangsungnya proses pembagian atau 'pengkavlingan' ruang *cyber* pada bermacam situs dan kanal atau kolom dengan berbagai kategorinya, seperti situs jenis organisasi layanan publik, komersial, politik, komunitas, dan jejaring sosial, *cyberdemocracy* lahir, hadir dan berkembang dalam karakteristik ruang yang berbeda-beda pula. Misalnya, *cyberdemocracy* yang hadir dan berkembang di situs jejaring sosial, seperti Facebook dan Twitter, akan memiliki perbedaan dengan konfigurasi *cyberdemocracy* yang hadir dan berkembang pada situs politik, seperti situs pemerintah, situs legislatif dan situs partai politik.

Tidak berhenti di situ, *cyberdemocracy* dikatakan lahir, hadir dan tumbuh sehat serta kuat di sebuah situs, manakala situs

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

tersebut, sebagai bagian dari lingkungan internet, menyediakan atau benar-benar menjadi ruang publik (*public sphere*). Oleh karena itu, tidak semua ekspresi di ruang virtual itu dikatakan *cyberdemocracy*, selama situs tersebut tanpa kehadiran ruang publik. Di sini ruang publik menjadi *keyword* apakah hadir atau tidak hadirnya *cyberdemocracy* di internet. Hal itu sebenarnya hampir sama di ruang *offline*, di mana demokrasi politik dikatakan lahir dan hadir secara sehat dan kuat ketika demokrasi itu dibangun dari dan di dalam ruang publik.

Ruang publik (*Offentlichheit*) itu, misalnya, adalah ruang publik yang pernah dibayangkan Juergen Habermas (2010), sebagaimana telah diungkapkan pada bab dua, yakni, sebagai ruang di mana setiap warga bisa mengakses dan setiap masalah bisa dikomunikasikan tanpa kendala, bukan ruang di mana segalanya jadi boleh. Selain itu, adalah ruang di mana kepentingan setiap pihak yang saling bertegangan dapat dikelola dengan cara dan media yang bisa diterima masing-masing pihak. Dengan kata lain, di ruang ini diisyaratkan pentingnya proses deliberasi yang menekankan pada perdebatan rasional, pertukaran posisi subjek dan bertujuan menciptakan konsensus.⁸

Dalam buku lainnya, *Between Fact and Norm: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy* (1996), Habermas sebagaimana dikutip Hartley⁹ membayangkan ruang publik merupakan ruang di mana ide dan informasi digunakan bersama, serta merupakan ruang di mana opini publik dibentuk sebagai hasil komunikasi. Selain itu ruang publik bagi Habermas adalah hal yang paling konstruktif ketika tidak dipengaruhi oleh kepentingan komersial atau kontrol negara.

Bila mengacu pada kategori ruang publik di atas, kiranya pandangan yang menyatakan internet (seluruh lingkungannya) sebagai ruang publik

atau ruang publik baru, seperti pernah sepintas dikatakan oleh Mark Poster (2001), Diana Saco (2002) dan Last Moyo (2009), sebagaimana telah diungkapkan pada bab sebelumnya, adalah tidak terlalu relevan.¹⁰ Atau yang secara tegas dikatakan oleh Howard Rheingold (1994), dalam Yasraf Amir Piliang (2004)¹¹ bahwa internet menciptakan *cyberspace*, sebuah ruang komunikasi global yang dikontrol oleh masyarakat warga, yang ia sebut sebagai agora elektronik (*electronic agora*)¹². Yaitu sebuah ruang tempat warga masyarakat bertemu untuk berbincang, membuat gosip, berdebat, berdialog, mencari solusi-solusi, mencari titik temu, membuat konsensus, mengkritik ide-ide politik yang ada, di dalam sebuah komunitas raksasa yang disebut komunitas virtual (*virtual community*).

Namun demikian, mayoritas lingkungan internet, seperti lingkungan ruang komentar *online*, lebih banyak menunjukkan realitas lain dari ruang publik yang diidealkan di atas. Di ruang komentar *online* Kompas.com misalnya, tidak ditemukan iklim debat rasional atau deliberasi publik dan proses pertukaran pengetahuan; tidak ditemukan iklim komunikasi yang terbabas dari dimensi dominasi; juga tidak ditemukan proses konsensus, di mana ketegangan yang ada dikelola dan diterima semua pihak, serta ide dan informasi yang digunakan secara bersama-sama. Adapun gambaran jelasnya dapat kembali dibuka pada bab sebelumnya,

¹⁰ Baik Poster, Saco maupun Moyo, secara eksplisit penyebutan dan penyandingan ruang publik terhadap *cyberdemocracy* tersebut masih dalam nada dan kerangka mempertanyakan atau meragukan, terutama mengenai apakah betul Internet, yang di dalamnya terdapat konstruksi *cyberdemocracy*, merupakan ruang publik sebagaimana yang pernah dibayangkan Juergen Habermas, ataukah ruang publik yang lain. Atau apakah internet dapat meningkatkan ruang public. Hal itu tentu, dalam kadar tertentu, ada relevansi dengan penelahan yang dilakukan penulis ini.

¹¹ Piliang, Y. A., 2004, *Posrealitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika*, Yogyakarta: Jalasutra, hal. 262.

¹² *Agora* dalam tradisi politik Yunani Kuno awalnya merujuk pada sebuah tempat (khususnya pasar) dimana warga kota (polis) berkumpul bersama untuk memperbincangkan berbagai persoalan bersama, termasuk persoalan politik. Lihat William J. Mitchel (1995) dalam Piliang, Y. A., 2004, *Posrealitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika*, Yogyakarta: Jalasutra, hal. 494.

⁸ Lihat Habermas, J., 2010, *Ruang Publik: Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.

⁹ Hartley, J., 2010, *Communication, Cultural, & Media Studies: Konsep Kunci*, Yogyakarta, Jalasutra, hal. 268-269.

terutama pada bab empat dan lima.

Oleh sebab itu, sejatinya di ruang *online* apa pun selama tidak memenuhi kriteria ruang publik di atas, sebetulnya tidak ada demokrasi¹³. Baik *cyberdemocracy* dalam pengertian demokrasi informasi maupun dalam pengertian demokrasi politik. Hal itu menjadi problematika *cyberdemocracy* yang dewasa ini terus-menerus muncul dan ditemukan pada berbagai pengkajian dan penelitian. Belum lagi bila dikaitkan dengan apakah *cyberdemocracy* memiliki referensi atau merujuk pada demokrasi di ruang *offline*, seperti demokrasi politik, ataukah sama sekali tidak merujuk pada apapun, melainkan merujuk pada dirinya sendiri.

Antara Konsepsi dan Simulasi

Bila merujuk pada konsep demokrasi di ruang *offline*, persoalan tidak berhenti dan selesai di sana, malah semakin problematis. Hal itu terutama bila dikaitkan dengan konsep demokrasi apa, mana dan siapa yang dirujuknya. Namun demikian, lepas dari konsep apa, konsep mana dan konsep siapa yang menjadi rujukan, pengetahuan yang bisa diambil dan digunakan di sini, merujuk pada Jean Boudrillard (1983), adalah bahwa *cyberdemocracy* sebagai representasi demokrasi *offline*. Hal sebaliknya bila dikatakan bahwa *cyberdemocracy* tidak merujuk pada realitas dan konsep apapun, namun merujuk pada dirinya sendiri, maka *cyberdemocracy* merupakan sebuah simulasi atau simulakrum.¹⁴ *Cyberdemocracy* yang

berbeda dengan rujukan awalnya di ruang *offline* itu, ataupun tidak merujuk pada apapun, menurut Mark Poster, sebagaimana disinggung terdahulu, sebagai “sesuatu yang lain”.

Memang banyak sekali konsep demokrasi di ruang *offline*, ia cenderung bermakna konotatif, variatif, evolutif, dan dinamis. Oleh sebab itu, demokrasi sebetulnya bukanlah konsep yang mudah dipahami. Demokrasi bermakna variatif karena sangat bersifat interpretatif. Sedangkan demokrasi sebagai konsep evolutif dan dinamis, artinya konsep demokrasi selalu mengalami perubahan, baik bentuk-bentuk formalnya maupun subtansialnya sesuai dengan konteks dan dinamika sosio historis di mana konsep demokrasi lahir dan berkembang. Karena argumen inilah, dari waktu ke waktu, demokrasi senantiasa diperdebatkan, terutama dalam perkara: Apakah demokrasi bersifat ‘universal’ ataukah ‘partikular/ lokal’?¹⁵

Contohnya, seperti gagasan demokrasi yang dipraktikkan dan berkembang pada masa Yunani kuno. Sebuah gagasan yang sampai sejauh ini senantiasa ‘masih’ disebut-sebut dan selalu menjadi rujukan. Apakah gagasan demokrasi pada masa itu ‘universal’ ataukah ‘partikular/lokal’? Bila demokrasi bermakna, segi bahasa sebagai *demos* dan *kratos* (rakyat dan pemerintahan), atau secara istilah sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau bermakna penghargaan terhadap hak-hak politik rakyat, dan kebebasan berpolitik, maka bisa dikatakan bahwa nilai-nilai demokrasi di Yunani kuno itu universal. Namun, bila ditanyakan ulang mengenai

menopengi dan menyembunyikan absennya realitas. Lihat, Piliang, *ibid.*, hal. 134.

15 Suhelmi, A, 2001, *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 297.

siapa yang dimaksud rakyat? Apakah maknanya sama dengan makna rakyat dewasa ini? Bila jawabannya sama, maka betul demokrasi pada masa Yunani kuno itu bersifat universal. Namun sebaliknya, bila jawabannya beda, misalnya bila rakyat yang dimaksud pada masa Yunani kuno adalah warga negara merdeka, tidak termasuk budak, sedangkan pada masa ini rakyat dimaknai keseluruhan warga negara, maka demokrasi yang berkembang pada masa Yunani kuno itu sebetulnya bersifat partikular atau lokal.¹⁶

Oleh sebab itu, demokrasi baik dari sisi nilai atau konsep, maupun dari sisi praktik atau realitas, sebetulnya sama-sama memiliki potensi universal dan juga potensi lokal. Namun demikian, bila dilihat dari sisi sejarah perkembangannya, konsep dan realitas demokrasi senantiasa lahir, hadir dan berkembang senantiasa bergantung pada konsep ruang atau tempat.

Sebagai contoh, di negara hukum (negara yang berkonsep hukum), hadir konsep demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*), yakni demokrasi yang sepenuhnya didasarkan pada konstitusionalisme, sebuah paham bahwa kekuasaan pemerintahan harus dibatasi undang-undang dasar. Dalam negara kapitalisme, lahir dan hadir konsep demokrasi liberal (Jhon Locke, 1663-1704), yakni demokrasi yang mengutamakan kekuasaan untuk mengayomi kebebasan dan kepentingan individu semata.¹⁷

Sedangkan di ruang publik, seperti kafe dan taman kota, sebagaimana ruang publik yang dibayangkan Jurgen Habermas

(2007),¹⁸ senantiasa bersanding dengan kehadiran konsep demokrasi deliberatif, yakni demokrasi yang berdasarkan pada perdebatan rasional, pertukaran posisi subjek, dan konsensus.¹⁹ Segala hasil diskursus itu dibayangkan dapat menjadi pertimbangan untuk mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang telah diputuskan oleh lembaga-lembaga politik formal. Di sini diandaikan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh unsur-unsur formal konstitusionalnya, seperti melalui parlemen, pemilihan umum, melainkan juga oleh masyarakat melalui *sharing* informasi, konsultasi dan diskursus publik dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek politik.

Di ruang virtual, kehadiran demokrasi menjadi lain lagi, baik dalam penyebutan atau citra maupun dalam pemaknaan atau konsepnya, di mana ia populer, terutama dalam lingkungan kaum neo-futuris atau kaum optimis, dengan *term cyberdemocracy*. *Term* ini misalnya belakangan dikaitkan dengan konfigurasi demokrasi di internet. Atau dalam pemikiran Mark Poster (2001), Diana Saco (2002) dan Last Moyo (2009), seperti sepintas disinggung di atas, relasi antara ruang publik dan internet.

Bila melihat pada ketiga pandangan tersebut, kehadiran *cyberdemocracy*, menjawab problematika di atas, sebetulnya memiliki rujukan mayoritas, yakni pada konsep ruang publik, baik ruang publik yang dibayangkan Habermas, maupun ruang publik yang dibayang oleh sarjana lainnya. Namun demikian, ruang publik yang mayoritas dirujuk dewasa ini adalah ruang publik dari Habermas di atas, seperti segala masalah dapat diperdebatkan tanpa kendala, segala kepentingan individu yang saling bertegangan dapat dikelola

16 Rakyat pada masa Yunani Kuno, oleh Aristoteles, pemikir Yunani kuno yang banyak merumuskan demokrasi, dikategorikan sebagai warga Negara (*citizen*). Pada saat itu, mereka merupakan kelompok minoritas dalam Negara kota (polis atau city states) yang memiliki hak-hak istimewa dalam kehidupan politik negara kota. Seperti memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan kebijakan Negara. Bagian terbesar (mayoritas) penduduk Negara kota itu adalah budak belian dan pedagang-pedagang asing yang berasal dari kawasan luar Yunani dan mereka ini tidak memiliki hak-hak istimewa seperti kelompok warga negara. Suhelmi, *ibid*, hal. 298.

17 Suhelmi, *ibid*.

18 Habermas, J., 2010, *Ruang Publik: Sebuah kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis*, Bantul: Kreasi Wacana. Lihat juga, Fransisco Budi Hardiman, 2009, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dal Teori Diskurus Jurgen Habermas*, Yogyakarta: Kanisius.

19 Bila melihat prinsip-prinsipnya, demokrasi deliberatif itu, dalam kadar tertentu, memiliki kemiripan dengan demokrasi Pancasila yang mengedepankan "musyawara mupakat" atau "demokrasi permusyawaratan".

dan diterima segala pihak, ruang di mana terjadi proses pertukaran posisi subjek, dan konsensus.

Melihat *cyberdemocracy* dengan landasan pandangan relasi ruang publik dan internet, tentu didasari oleh pandangan bahwa internet sebagai lingkungan (*Internet is environment*), bukan sekedar sebagai alat (*Internet is conduits*). Namun tentu menjadi berbeda bila melihat internet sebagai alat semata, di sini misalnya *cyberdemocracy* dimaknai tidak lebih dari sekedar alat untuk mempengaruhi politik di ruang *offline*, atau tidak lebih dari perkara bagaimana memanfaatkan internet sebagai instrumen *efisiensi* pelaksanaan demokrasi dalam pengertiannya yang lebih bersifat prosedural. Di Amerika Serikat misalnya, sebagaimana disinggung sebelumnya, mayoritas advokat *cyberdemocracy* memandang internet, dalam hal ini berbagai *site*, sebagai alat bagi para pemilih untuk mengontrol wakil-wakilnya di Kongres atau Legislatif.²⁰

Relasi antara ruang publik dan internet (khususnya dalam pengertian internet sebagai lingkungan) yang dikenal sebagai *cyberdemocracy*, tetap masih problematis atau memiliki persoalan. Di antaranya adalah apa yang diidealkan atau dibayangkan tentang ruang publik di atas, semuanya terkait dengan ruang *offline*. Sementara di ruang *online*, khususnya seperti di kolom komentar *online* Kompas.com, sebagai lokus dari penelitian penulis, mayoritas tidak menunjukkan bayangan di atas. Kolom komentar *online*, sebagaimana digambarkan dan dijelaskan pada bab empat dan lima, menunjukkan realitas (-virtual) yang minor dari kemiripan, apalagi benar-benar menunjukkan nilai dan praktik kepublikan, dengan ruang publik di atas. Misalnya, pada ruang ini tidak ditemukan proses perdebatan rasional kritis, proses pertukaran subjek dan konsensus. Justru realitas yang ditemukan adalah mayoritas, misalnya, praktik kekerasan dalam wujud makian dan sinisme, yang lebih bertujuan

saling pemarginalan dan cenderung tidak bertepian.²¹

Cyberdemocracy bukan Demokrasi

Dalam konteks itulah, penulis berpandangan *cyberdemocracy*, terutama dari sisi konsep dan dari sisi praktik²², merupakan “demokrasi yang lain”. Istilah ini tentu berbeda dengan istilah ‘sesuatu yang lain’ dari Mark Poster. Kalau istilah ‘demokrasi yang lain’, antara yang dijelaskan dan yang menjelaskan, masih ada hubungan atau rujukan, seperti pada istilah ruang publik yang aslinya, maka istilah ‘sesuatu yang lain’ itu, seperti pernyataan “*cyberdemocracy* sebagai ‘sesuatu yang lain’”, antara yang diterangkan dan yang menerangkan telah saling memisahkan atau bahkan saling menghilangkan satu sama lainnya.

Atau dalam istilah lainnya, penulis lebih tertarik, meminjam salah satu konsep dari George Ritzer (2004)²³, dengan istilah “Democracy of Nothing (Demokrasi *Nothing*, atau demokrasi sepi subtansi dan hampa makna)”. Di sini kata *Nothing*, sebagai salah satu jargon atau konsep utama dari teorinya Ritzer tentang gejala globalisasi, glokalisasi dan grobalisasi, (*The Globalization of Nothing, The Glocalization of Nothing, dan The Grobalization of Nothing*), disandingkan atau dikawinkan dengan kata demokrasi, maka direproduksi istilah Demokrasi *Nothing*. Bila penggunaan kata *Nothing* pada gagasan Ritzer terkait dengan konteks globalisasi pada kasus atau proses Kapitalisme, Amerikanisasi, dan McDonalikasi, maka penggunaan kata *Nothing* pada penelaahan ini terkait dengan konteks perkembangan infiltrasi, intervensi

²⁰ Lihat Ferber, P., et al., 2007, “Cyberdemocracy and Online Politics: A New Model of Interactivity”, (internet), Oktober 2007, 27, hal. 391-400. <http://bst.sagepub.com>.

²¹ Namun demikian, bukan berarti tidak ada sedikit pun kemiripan. Misalnya, kemiripan dalam hal kebebasan berekspresi dan ruang tempat berkumpul warga internet yang minor dari tekanan.

²² Bila dalam konteks konsep umumnya problematis, maka sebaliknya dalam konteks praktik atau realitas, *cyberdemocracy*, umumnya tidak banyak ditemukan persoalan. Dalam konteks praktik itu, *cyberdemocracy* misalnya dapat dimaknai sebagai “segala ekspresi politik di ruang virtual”.

²³ Ritzer, G, 2004, *The Globalization of Nothing*, California, London and New Delhi: Sage Publication.

dan ekspansi *cyberspace* dalam kehidupan demokrasi politik, terutama kavling *cyberspace* pada kolom komentar *online* di portal berita media massa *online*. Kehidupan demokrasi itu terutama dipraktikkan dalam dan melalui praktik konsumsi dan produksi teks. Selain itu dipraktikkan juga melalui proses standarisasi dan homogenisasi.

Globalisasi kosong (*the Globalization of Nothing*), seperti halnya McDonaldisasi di atas, menyiratkan meningkatnya homogenisasi dan standarisasi aspek kehidupan global. Di sini *nothing* adalah (hampir sepenuhnya) bentuk kosong, bentuk yang tidak memiliki muatan yang berbeda. Sebaliknya, sesuatu (*something*) didefinisikan sebagai hampir sepenuhnya bentuk yang utuh, bentuk yang penuh dengan muatan yang berbeda. Bentuk kosong ini cenderung lebih mudah dan cepat disebarluaskan (diekspor) ke seluruh dunia (seluruh ruang) dari pada menyebarkan bentuk-bentuk yang diisi muatan (*something*). Bentuk-bentuk yang bermuatan itu lebih mungkin ditolak oleh setidaknya sebagian kebudayaan dan masyarakat karena muatannya berbenturan dengan muatan lokal.²⁴

Mengacu pada pandangan Ritzer itu, *Nothing* adalah hal-hal atau apa-apa yang tidak unik (*unique*), melainkan hal-hal yang sangat generik. Unik artinya apa-apa yang asli dan senantiasa terdapat perbedaan dengan jenis lainnya, atau tersendiri dalam bentuk atau jenisnya (*One-of-a-Kind*). Sementara generik lebih mengacu pada "hal-hal yang sama", atau "itu-itu juga" dan bisa saling dipertukarkan (*interchangeable*).²⁵

Di samping itu, masih mengacu pada Ritzer, kata *Nothing* diartikan sebagai sesuatu yang miskin atau hampa perbedaan

²⁴ Ritzer, G, 2012, *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 997-999.

²⁵ Ritzer, G, 2004, *op cit.*, hal 20-21. Dalam buku Kamus Besar Bahasa Indonesia unik memiliki arti: tersendiri dalam bentuk atau jenisnya; lain daripada yang lain; dan tidak ada persamaan dengan yang lain. Sementara itu kata generik memiliki banyak arti, yakni umum, lazim, berhubungan dengan kekhasan sifat yang dimiliki oleh suatu kelompok. Lihat, Sugono, D, dkk., 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional dan Gramedia Pustaka Utama, hal. 1530 dan hal. 440.

subtansi (*devoid of distinctive substance*). Atau dalam pengertian secara istilah, *Nothing*, merupakan "bentuk-bentuk sosial yang tersusun dan terkontrol di tengah-tengah kehampaan atau ketiadaan konten dan subtansi" (*generally centrally conceived and controlled social forms that are comparatively devoid of distinctive substantive content*).²⁶ Sebagai contoh, dalam dunia konsumsi, Korporasi Mills (atau korporasi lainnya) menciptakan dan (sekaligus) mengontrol mall perbelanjaan (seperti Potomac Mills di Virginia, Sawgrass Mills di Florida, dan Ontario Mills di Kalifornia) sebagai bentuk atau sebagai struktur dalam dirinya sendiri, memiliki sedikit, untuk tidak mengatakan tidak ada, konten tersendiri. Konten yang diberikan mall sangat tergantung pada apa (toko-toko tertentu, barang-barang, restoran, pelayan atau pekerja, pelanggan, dan lain-lain) yang terjadi atau berlangsung di dalamnya.²⁷

Penggunaan istilah Demokrasi *Nothing*, tidak menggunakan istilah "sesuatu yang lain", ini selain agar tetap historis, juga agar terus memperkuat dan memperkaya proses dialektika demokrasi politik dalam setiap fase perkembangannya. Dialektika ini misalnya, gagasan Robert A. Dahl (2001) ketika ia mengkategorisasi demokrasi politik di ruang *offline*, baik demokrasi dalam tataran konsep maupun dalam tataran praktik, menjadi "demokrasi ideal" dan "demokrasi aktual".²⁸ Selain itu, terdapat juga gagasan Samuel P. Huntington (1997) ketika mengkategorisasi demokrasi, antara

²⁶ Ritzer, *op cit.*, hal. xi. Dalam bukunya itu, Ritzer memperhadapkan kata konsep *Nothing* dengan kata atau konsep *Something*. Dalam era globalisasi ini, menurutnya, dunia tengah bergerak dan bergeser, pelan tapi pasti, dari era *Something* menuju era *Nothing*. Di sini *Something* memiliki karakteristik dan makna sebaliknya dari *Nothing*. Misalnya *Something* merupakan hal yang unik, dan kaya subtansi (*a social form that is generally indigenously conceived, controlled, and comparatively rich of distinctive substantive content*). *Ibid*, Hal. 7.

²⁷ *Ibid*. Dalam bahasa Inggris sendiri, *Nothing* memiliki banyak arti, di antaranya, tidak ada apa-apa, tak lain tak hanya (*nothing but*), tak kurang dari (*nothing less than*), tak ada lagi, serupa, seperti (*nothing like*), tak lain hanya (*nothing more*), dan menganggap tidak penting (*to think nothing of*).

²⁸ Adapun penjelasan dari kedua kategori demokrasi dari Dahl itu dapat dibaca kembali pada bab dua.

“demokrasi subtansial” dan “demokrasi prosedural”.²⁹ Begitu juga gagasan Posner (2003) yang mengkategorisasi demokrasi, antara “demokrasi klasik” dan “demokrasi elite”.³⁰ Christian F. Rostboll (2008), dalam konteks demokrasi dilihat dari aspek *freedom*, mengkategorisasi demokrasi menjadi “demokrasi transformasi” dan “demokrasi agregasi”. Dan gagasan-gagasan demokrasi politik lainnya.

Bila merujuk pada berbagai gagasan tentang kategorisasi demokrasi di atas, baik dari Dahl, Huntington, Poster, maupun Rostboll, istilah Demokrasi *Nothing*, bagaimana pun juga, merupakan demokrasi senyatanya (demokrasi *das sein*), bukan demokrasi seharusnya (demokrasi *das sollen*). Atau dalam pengertian lain, Demokrasi *Nothing* adalah demokrasi yang bukan dibayangkan atau yang bukan dikehendaki, melainkan demokrasi yang lahir dan hadir akibat kecelakaan (*by accident*).

Oleh sebab itu, demokrasi yang dilahirkan dan dihidirkannya pun menjadi demokrasi yang “terluka” dan mengandung potensi ‘penyakit’. Tentu hal demikian itu menjadi daftar panjang pencedraan sekaligus penjerumusan demokrasi politik dalam ‘rumah besar’ *cyberdemocracy* kepada ‘lembah sampah’ yang tidak berguna atau tidak penting. Di sinilah *cyberdemocracy*, khususnya di ruang komentar *online*, telah benar-benar menampilkan Demokrasi *Nothing*, yakni demokrasi yang tanpa subtansi dan demokrasi tanpa kedalaman.

Ketiadaan ruang publik yang berfungsi ideal di ruang *cyber*, seperti di ruang komentar online sebagai tanda bahaya

29 Huntington, S, P., 1997, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Jakarta: Grafiti Press. Demokrasi Subtansial adalah demokrasi yang menekankan makna dan subtansi kebebasan (berpendapat, beragama, bebas dari rasa takut dan bebas dari kemelaratan). Sementara demokrasi prosedural lebih menekankan pada prosedur-prosedur pelaksanaan politik seperti Pemilu.

30 Dalam Holt, R, 2004, *Dialog On Internet: Language, Civic Identity, and Computer-mediated Communication*, html. Westport: Praeger, hal. 7-6. Demokrasi klasik adalah demokrasi yang sebetulnya merujuk pada Dahl, yakni partisipasi efektif, pemungutan suara yang equal, pemahaman yang tercerahkan, dan control agenda. Sedangkan demokrasi elite adalah demokrasi yang bercirikan realistik, sinisme (*cynical*), *bottom-up*, dan berujung pada pragmatis.

bagi pertumbuhan *cyberdemocracy*. Secara teori, keberadaan ruang publik sehat dan kuat, sebagaimana disinggung sebelumnya, merupakan prasyarat bagi lahir dan hadirnya demokrasi yang sehat dan kuat pula. Salah satu indikasi demokrasi yang sehat dan kuat itu adalah demokrasi yang kaya subtansi, seperti senantiasa berpijak dan berpatokan pada prinsip kebebasan melalui wujud deliberasi (perdebatan rasional, pertukaran posisi subjek dan konsensus).³¹

Sebetulnya hal itu menjadi sebuah konsekuensi wajar, ketika politik dipraktikan di ruang *online*. Secara teori, sebagaimana disinggung di awal, politik merupakan salah satu aspek kehidupan umat manusia yang tersentuh atau tepatnya bersentuhan dengan demokrasi, yang disebut demokrasi politik. Selain politik, aspek lain yang bersentuhan dengan demokrasi adalah aspek informasi yang disebut demokrasi informasi, lalu aspek komunikasi yang disebut demokrasi komunikasi, aspek ekonomi yang disebut demokrasi ekonomi, aspek pendidikan yang disebut demokrasi pendidikan, dan seterusnya.

Penutup

Aktivitas politik di ruang *online* pelan tapi pasti telah menjadi bagian dari realitas, yaitu realitas virtual (*Virtual Reality*). Di antara realitas itu adalah hadirnya ruang komentar *online*. Di sini setiap pengunjung internet pada umumnya memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan ekspresi politiknya. Seperti ekspresi kekuasaan yang ditunjukkan oleh dan dalam komentar-komentar di ruang komentar *online*. Di titik inilah *cyberdemocracy* terproduksi.

Lazimnya sebuah ruang publik, ruang di mana terdapat perdebatan

31 Bagi para advokat *cyberspace*, prinsip-prinsip itu tentu sangat tidak menyenangkan. Semua prinsip itu banyak dianggap mengganggu dan ancaman bagi keberlangsungan *cyberspace* yang diandaikan dan dibayangkan menjadi ruang tanpa kontrol dan ruang kebebasan yang totalitas, dan mampu menciptakan masyarakat bebas (*free society*). Oleh karena itu, mereka tidak sama sekali tertarik terhadap ide-ide demokrasi apapun, yang di dalamnya membutuhkan aturan main bersama, seperti konsensus-konsensus.

rasional kritis, pertukaran posisi subjek dan konsensus atau ide (opini) yang disepakati untuk digunakan bersama, serta bebas dari relasi dominatif. Namun demikian, melihat realitas virtual pada ruang komentar *online* misalnya, justru berbanding terbalik, di mana terdapat beberapa karakter melekat yang ditunjukkan pada kegiatan komentar-mengkomentarnya. Misalnya, pengabaian budaya debat rasional, pertukaran posisi subjek dan konsensus, yang penulis sebut sebagai fenomena dedeliberatif; pengabaian kesantunan dalam berkomunikasi, terutama budaya untuk saling menghargai antara subjek, dan penulis menyebutnya fenomena deetika; dan penurunan hubungan sosial yang berbasis kemanusiaan, penulis menyebutnya fenomena dehumanis.

Karakter-karakter di atas menunjukkan bahwa *cyberdemocracy* itu biasa saja,

itu-itu juga, remeh-temeh, dan bahkan dapat dikatakan melampaui keburukan-keburukan yang melekat pada praktik demokrasi di ruang *offline*.

Sejauh ini telah ada upaya dari negara untuk hadir dalam menutupi defisit demokrasi di ruang virtual. Di antara upaya itu adalah kebijakan merevisi terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Revisi itu merupakan penguatan kembali terhadap lahir dan hadirnya hukum *cyber* dalam praktek informasi dan transaksi elektronik, terutama hukum media sosial *online*. Lahir dan hadirnya hukum *cyber* itu diharapkan benar-benar dapat menjamin dan memastikan melindungi segala keadilan, kemanfaatan, keamanan, kebebasan, kenyamanan, dan kebahagiaan para pengguna dan warga ruang *cyber*.

REFERENSI

- Budiardjo, M, 1994, *Demokrasi di Indonesia, Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Gramedia.
- Castells, M., 2010, *The Rise of Network Society, Second Edition With New Preface*, West Sussex: John Willy & Sons Ltd.
- Creeber, G. and Martin, R., (ed), 2009, *Digital Cultures: Understanding New Media*, Berkshire-England: Open University Press.
- Dahl, R., 2001, *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktik Demokrasi Secara Singkat*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- _____, 1971, *Poliarchy: Participation and Opposition*, New Haven: Yale university Press.
- Eriyanto, 2011, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, Yogyakarta: LKis.
- Ferber, P., Foltz, F., dan Pugliese, R., 2007, "Cyberdemocracy and Online Politics: A New Model of Interactivity", (internet), Oktober 2007, 27, hal. 391-400. <http://bst.sagepub.com>.
- Fortier, F, 2001, *Virtuality Check: Power Relations and Alternatif Strategies in Information Society*, London: Verso.
- Gatara, Asep Sahid., 2012, "Paradoks Demokrasi Cyber", Bandung: Tribun Jabar, 04/09/2012.
- Gatara, Sahid, A. A., 2009, *Ilmu Politik: Memahami dan Menerapkan*, Bandung: Pustaka Setia.
- Goode, L, 2005, *Jurgen Habermas: Democracy and the Public Sphere*, London: Pluto Press.
- Habermas, J., 2010, *Ruang Publik: Sebuah kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis*, Bantul: Kreasi Wacana.
- Haffernan, V., 2009, "Comment Is King: Reader Comments are a Key Part of Online Journalism, So why do they mostly disappoint?" New York Times Magazine, 26 April.
- Hall, S., 2003, *Representation: Cultural Representation and Signifying Practices*, London: SAGE Publication.
- Hardiman, F. B, 2009, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskurus Jurgen Habermas*, Yogyakarta: Kanisius.
- Hartley, J., 2010, *Communication, Cultural, & Media Studies: Konsep Kunci*, Yogyakarta, Jalasutra.
- Held, D., (Ed.), 1986, *New Form of Democracy*. London: SAGE.
- _____. 1990, *Model of Democracy*, Cambridge: Polity Press.
- Hold, R., 2004, *Dialog on the Internet: Language, Civic Identity, and Computer-mediated Communication*, versi html, Westport: Praeger.
- Ibrahim, I. S., 2011, *Kritik Budaya Komunikasi: Budaya, Media, dan Gaya Hidup dalam Proses Demokratisasi di Indonesia*, Yogyakarta, Jalasutra.
- Jurgenson, N dan Ritzer, G, "Internet, Web 2.0, dan Kedepan", dalam Ritzer, G, (ed), 2013, *The Wiley Blackwell Companion To Sociology*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Leeuwen v.,Theo., 2008, *Discourse and Practice: New Tools For Critical Discourse Analysis*, New York: Oxford University Press
- Mosco, V., 1996, *The Political Economy of Communication*, London: Sage Publication Ltd.
- Moyo, L., 2009, "Digital Democracy: enhancing the public sphere" dalam Glen Creeber and Roystone Martin., (ed), 2009, *Digital Cultures: Understanding New Media*, Berkshire-England: Open University Press.

- Nugroho, H., 2003, "Teknologi Informasi dan Kemerdekaan Ruang Publik", dalam Wilhelm, A. G., *Demokrasi di Era Digital: Tantangan Kehidupan Politik di Ruang Cyber*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan CCSS.
- Page, I. Benjamin, 1996, *Who Deliberates? Mass Media In Modern Democracy*, Chicago: University of Chicago Press.
- Parkinson, John, 2006, *Deliberating in the Real World: Problems of Legitimacy in Deliberative Democracy*, New York: Oxford University Press.
- Piliang, Y. A., 2004, *Posrealitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika*, Yogyakarta: Jalasutra.
- _____, 2003, *Hipersemiotika: Tafsir Cultural Studies Atas Matinya Makna*, Yogyakarta: Jalasutra.
- Poster, M., 2001, "Cyberdemocracy: The Internet and the Public Sphere", dalam Trend, David, (ed), *Reading Digital Culture*, Oxford, Blackwell Publisher.
- Ritzer, G., 2004, *The Globalization of Nothing*, California, London and New Delhi: Sage Publication.
- _____, 2012, *Teori Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____(ed), 2013, *The Wiley Blackwell Companion To Sociology*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rostboll, C.F., 2008, *Deliberative Freedom: Deliberative Democracy as Critical Theory*, New York: State University of New York Press.
- Saco, D., 2002, *Cybering Democracy: Public Speace and The Internet*, Minneapolis/London: University of Minnesota Press.
- Shields, R., 2011, *Virtual: Sebuah Pengantar Komprehensif*, Yogyakarta: Jalasutra.
- Wood, A. F. & Smith, J. M., 2005, *Online Communication: Linking Technology, Identity and Culture*, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

B. Internet

<http://www.kompas.com>

PRAKTIK KAMPANYE NEGATIF DALAM CYBERDEMOCRACY

Pendahuluan

Keberadaan media baru (*new media*) di Indonesia semakin penting dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, baik ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Fenomena ini tidak lepas dari semakin meningkatnya tingkat penetrasi internet di Indonesia. Dalam tiga tahun terakhir, hasil survei menunjukkan jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat secara signifikan. Beberapa lembaga yang menaruh perhatian terhadap dinamika pengguna internet di Indonesia ini telah memberikan data ke arah adanya peningkatan pengguna internet tersebut.

Oleh **Pratama Dahlian Persada**¹

- 1 Pratama D. Persada adalah Presiden Commissioner In-doguardika Cipta Kreasi (ICK) Jakarta. Sedang menempuh Program Doktor Media Studies Sekolah Pascasarjana UGM.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) melaporkan penetrasi pengguna internet di Indonesia pada tahun 2012 adalah 24,23%. Sedangkan Indonesia Investment memberikan laporan hasil survainya, bahwa pada tahun 2013 penetrasi internet di Indonesia 28% atau terdapat 71,19 juta pengguna internet. Sementara itu hasil survei APJII bekerjasama dengan Pusat Kajian Komunikasi (PusKaKom) Universitas Indonesia, pada tahun 2014 tingkat penetrasi pengguna internet naik menjadi 34,9% (Marius & Anggoro. Penyunting, 2014: 9-10). Melihat kecenderungan meningkatnya persentase penetrasi internet tersebut, menjadi indikator bahwa ke depan peran media baru akan terus semakin meningkat.

Peran media baru itu juga telah terbukti semakin penting dalam dinamika politik di Indonesia seiring dengan dinamika demokratisasi pasca pemerintahan Orde Baru. Penggunaan media sosial sebagai mekanisme kontestasi antarkekuatan politik kepartaian dalam berebut kekuasaan semakin fenomenal. Munculnya istilah demokrasi digital, demokrasi cyber, atau demokrasi di dunia maya telah menjadi perhatian kalangan politisi dan sekaligus kalangan akademik sebagai topik studi. Media sosial telah menyediakan ruang-ruang publik di dunia maya untuk mendiskusikan berbagai hal, termasuk politik. Setiap kali terjadi even politik seperti Pemilihan Presiden, terlebih sejak sistem Pemilu langsung, peran media baru semakin sering digunakan dalam proses memperoleh dukungan politik masing-masing kandidat.

Demikian pula ketika Pilpres 2014, media sosial telah digunakan untuk menggalang dukungan melalui aktivitas kampanye. Sejumlah media sosial telah digunakan oleh masing-masing pasangan calon presiden, yaitu Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK untuk mencari dukungan konstituen melalui aktivitas kampanye. Media sosial itu antara lain adalah okezone.com, detik.com, dan sejumlah media sosial lain yang terintegrasi dengan surat kabar cetak seperti kompas.com, republika.com; tempo.com.

mediaindonesia.com, merdeka.com dan masih banyak lagi. Keterlibatan media sosial dalam proses Pilpres 2014 itu semakin menambah situasi kontestatif dalam proses kampanye pencarian dukungan.

Situasi yang sama juga terjadi dalam momen politik di daerah, yaitu ketika Pilkada, seperti pemilihan walikota, bupati, dan bahkan juga pemilihan kepala desa. Penggunaan media baru dalam momen politik seperti itu sudah merupakan keniscayaan seiring dengan perkembangan media baru. Situasi inilah yang kemudian memunculkan apa yang sering disebut sebagai cybergovernance, suatu praktik politik demokrasi yang mengalami mediatisasi. Jadi demokrasi tidak hanya ada dalam masyarakat offline tetapi juga ada dalam dunia virtual terfasilitasi oleh media online. Dalam pandangan deterministik teknologi atau efek media, ini mengandaikan bahwa media kuat dan karena itu dapat digunakan sebagai instrumen politik secara efektif, terutama untuk penggalangan dukungan massa.

Akan tetapi dalam cybergovernance yang telah terjadi di Indonesia, tetap menghadirkan dua fenomena menarik, yaitu di satu sisi mendorong terjadinya praktik pemerintahan good governance dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik. Secara optimis kehadiran cybergovernance telah membuka akses seluas-luasnya bagi publik untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik. Ini jelas suatu kecenderungan yang bagus untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia yang selama ini sering terhambat oleh faktor struktural maupun kultural. Akan tetapi seperti yang bisa kita lihat, praktik cybergovernance ini juga menyodorkan masalah baru, yaitu praktik politik negatif sebagaimana tampak pada kampanye negatif yang terjadi ketika Pilpres dan Pilkada. Penggunaan media sosial dan media online lainnya dalam kampanye negatif seringkali hanya mengedepankan sisi negatif masing-masing pasangan calon.

Sebagai ilustrasi praktik kampanye

negatif itu terjadi pada momen politik Pilpres 2014 dan juga menjelang Pilkada serempak 2017, khususnya Pilkada DKI Jakarta. Pada pemilihan presiden di Indonesia 2014 itu, banyak diwarnai baik kampanye negatif maupun bahkan kampanye hitam. Kedua jenis kampanye tersebut sangat marak terjadi terutama di media elektronik dan cetak, lebih marak lagi di media sosial. Pemilu 2014 yang sedang berlangsung merupakan pemilu yang paling kontestatif. Untuk kali pertama, cuma ada dua kandidat. Pada sisi lain, dua kandidat ini, secara kualitatif relatif memiliki skor yangimbang, baik dari sisi negatif maupun positif.

Keniscayaan hadirnya kampanye negatif dan kampanye hitam bukan merupakan pembenar bagi dominannya dua jenis kampanye buruk tersebut. Kedua kubu sama-sama merasakan imbas dari kedua kampanye buruk tersebut, di pihak Prabowo-Hatta, isu mengenai prabowo memiliki dua kewarganegaraan jelas sangat mengganggu kubu ini karena jelas sekali bahwa dalam undang-undang menyatakan bahwa yang bisa mencalonkan diri menjadi capres adalah WNI sejak lahir dan tidak pernah mendapatkan kewarganegaraan lain atas permintaannya sendiri dan hal ini sudah dibuktikan oleh Prabowo dengan melengkapi persyaratan tersebut. Selain itu ada pula isu mengarahkan Babinsa atau Bintara Pembina Desa ke rumah-rumah warga untuk memilih pasangan Prabowo-Hatta. Ada juga isu bahwa penunggakan pembayaran gaji karyawan selama lima bulan pada perusahaan PT. Kertas Nusantara yang dikabarkan memiliki hutang sebesar 14 triliun.² Tapi yang sangat besar pengaruhnya terhadap pasangan ini adalah isu pelanggaran HAM dan penculikan aktivis pada tahun 1998 yang dilakukan oleh Prabowo walaupun sampai detik ini bukti kongkrit keterlibatan prabowo dalam aksi tersebut tidak bisa dibuktikan (Kompas, 17 Juni 2014).

Kampanye buruk tersebut tidak hanya menyerang kubu Prabowo-Hatta tetapi

2 (<http://www.republika.co.id/berita/pemilu/hot-politik/14/07/01/n80t05-ini-tiga-black-campaign-yang-serang-prabowo>).

juga menyerang kubu Jokowi-JK. Tuduhan bahwa apabila Jokowi menjadi presiden akan menghapus gaji ke-13, menggabungkan mahkamah militer dengan sipil, akan memberikan posisi Menteri Agama ke pihak yang selama ini dianggap menyimpang dari ajaran Islam, akan menghapus kolom agama di KTP sampai tuduhan bahwa Jokowi PKI santer menyebar di tengah masyarakat.³

Selain itu, Jokowi diserang dengan tulisan yang dimuat di tabloid Obor Rakyat. Pada edisi pertama, 5-11 Mei 2014, halaman muka tabloid Obor Rakyat menampilkan judul *Capres Boneka* dengan karikatur Jokowi sedang mencium tangan Megawati Sukarnoputri. Tabloid itu juga menampilkan 14 berita panjang yang hampir semuanya menyudutkan Jokowi. Beberapa judul berita dalam tabloid ini antara lain, *Capres Boneka Suka Ingkar Janji, Disandera Cukong dan Misionaris, Dari Solo Sampai Jakarta Deislamisasi ala Jokowi, Manuver Jacob Soetjo, Cukong-Cukong di Belakang Jokowi, Partai Salib Pengusung Jokowi» dan Jokowi Juru Selamat yang Gagal*. Sebelum diserang melalui tabloid Obor Rakyat, Jokowi lebih dulu diserang dengan isu keturunan Tionghoa dan agama Kristen. Jokowi disebut sebagai keturunan Cina yang bernama Wie Jo Koh. Isu ini bermula dari tulisan artikel jurnalisme warga yang ditulis Anton Surya pada 19 Desember 2012. Namun, memasuki masa kampanye pilpres, tulisan tersebut dikutip dan digunakan tanpa menyertakan penjelasan aslinya. Sedangkan untuk isu agama, Jokowi sempat diberitakan memiliki nama lengkap Heribertus Joko Widodo. Tak hanya diserang melalui SARA, Jokowi Juga diserang dengan isu buku nikah palsu. Untuk menepis isu itu, tim pemenangan Jokowi-JK bahkan mengeluarkan fotokopi surat nikah Jokowi.⁴

Praktik yang sama juga terjadi pada menjelang Pilkada serentak 1017, khususnya Pilkada DKI Jakarta. Melalui berbagai media online, isu SARA terus digulirkan

3 (<http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/06/25/192139/2619380/1562/2/di-tepi-sungai-musi-jokowi-tepis-5-isu-black-campaign>).

4 (<http://www.republika.co.id/berita/pemilu/hot-politik/14/07/01/n80t0d-ini-tiga-black-campaign-yang-serang-jokowi>).

dan bahkan hingga pada mobilisasi massa secara offline dengan terjun ke jalan-jalan. Kampanye negatif dengan mengedepankan isu primordialistik itu pun terus berlangsung secara masif dan sistematis mewarnai ekspose media online. Situasinya semakin kurang kondusif karena pada akhirnya melibatkan kelompok-kelompok politik dan ormas keagamaan, berserta elite politik.

Efek Media

Fenomena kampanye hitam pada Pilpres 2014 maupun menjelang Pilkada serentak 2017 menyodorkan beberapa gejala menarik jika dilihat dari kajian media. *Pertama*, maraknya kampanye hitam membuktikan bahwa asumsi teoretik yang mengikuti efek media ternyata masih digunakan sebagai pijakan oleh masing-masing kubu yang berkontestasi dalam Pilpres 2014. Argumen utamanya adalah bahwa media sangat kuat dalam mempengaruhi khalayak, karena dianggap pasif dan menerima begitu saja pesan yang disampaikan oleh media.

Para peneliti percaya pada “peluru ajaib” teori pengaruh komunikasi massa. Individu diyakini sangat terpengaruh oleh pesan-pesan media karena media dianggap sangat kuat dalam membentuk opini masyarakat (Sommer dan Allen, dalam Littlejohn, 2009: 423). Sementara itu Elisabeth Noelle-Neumann meyakini bahwa teori pengaruh terbatas telah mengubah penafsiran penemuan penelitian selama bertahun-tahun, dan bahwa ajaran tentang ketidakberdayaan media tidak lagi dapat dipertahankan. Sedangkan Sandra Ball-Rokeach dan Melvin DeFleur mengusulkan teori ketergantungan yang menolak anggapan kausal dari hipotesis penguat sebelumnya, gagasan lama bahwa media hanya memperkuat sikap yang telah ada sebelumnya. Untuk mengatasi kelemahan ini, kedua penulis ini menggunakan sebuah pendekatan sistem yang luas. Dalam modelnya, mereka mengajukan sebuah hubungan integral antara audiens, media, dan masyarakat yang lebih luas. Sejalan dengan teori penggunaan dan kepuasan, teori ketergantungan

memperkirakan bahwa Anda bergantung pada informasi media untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan mencapai tujuan tertentu (Littlejohn, 2009: 428).

Asumsi teori media efek itu sedikit banyak memberikan kontribusi terhadap praktik kampanye negatif melalui media. Artinya, konsekuensi meyakini bahwa media adalah kuat tentu akan digunakan oleh para elite politik untuk mempengaruhi khalayak, termasuk mempraktikannya dalam kampanye negatif. Dalam konteks di Indonesia, situasi ini menjadi semakin marak ketika berhimpit dengan pemahaman terhadap konsep kekuasaan yang oleh elite politik masih dianggap memusat dan tunggal.

Kekuasaan dipahami sebagai entitas tunggal yang memusat pada satu titik dan titik itu merupakan pusat penguasaan sumber daya, dan kemudian melalui hubungan vertikal berusaha mengendalikan sasaran subjek agar mengikuti kehendak pemilik kekuasaan. Dalam pandangan Hobbesian misalnya, kekuasaan dipahami sebagai abstraksi yang diperlukan bagi kekuasaan terhadap sosok yang menjulang tinggi di atas masyarakat. Sementara itu penjelasan Marxis atas kekuasaan yang merupakan reproduksi individu-individu produktif sesuai dengan kebutuhan system besar tunggal seperti pasar atau kekuatan modal. Dengan menjadikan kekuatan modal sebagai instrument kekuasaan, maka siapa pun yang memiliki basis ekonomi kuat maka ia akan mampu mengontrol apa pun yang dikehendaknya. Baik Hobbesian maupun Marxian memahami bahwa kekuasaan itu bersifat tunggal dan terpusat yang terus memiliki daya penggerak dan bahkan daya paksa demi tujuan-tujuan mencapai kehendak penguasa.

Jadi kekuasaan tidak menyebar dan produktif, tetapi tunggal dan terpusat. Dalam model ini, kekuasaan adalah sesuatu yang dimiliki dan depegang. Kalau Negara memiliki lebih banyak kekuasaan, maka Negara lebih bebas untuk bertindak. Jika memiliki lebih sedikit kekuasaan, Negara akan lebih terbatas. Kemampuan militer

dan kekuatan ekonomi, yang sering diambil sebagai ukuran atas kekuasaan suatu Negara, kemudian dilengkapi dengan konsepsi neoliberal tentang self power (Keohane dan Nye, 1977; Nye 2004).

Kedua, berbeda secara diametral dengan pemahaman kekuasaan yang bersifat tunggal dan terpusat, justru kekuasaan lebih mengalami desentralisasi. Pelopor pemahaman ini adalah Michel Foucault, hampir semua karyanya tentang power berusaha mengganggu konsep kekuasaan yang tunggal dan terpusat. Foucault menawarkan langkah dari power tunggal dan terpusat yang mengancam kematian ke bentuk power jamak dan terdesentralisasi yang mempromosikan kehidupan. Ia berpendapat: "Kedaulatan mengambil hidup dan membiarkan hidup. Sekarang kita memiliki power yang...membuat hidup dan membiarkan mati (Foucault, 2002b: 247). Cara Foucauldian mempertimbangkan bentuk-bentuk power ditandai dengan meninggalkan cara terpusat dengan Negara dipandang sebagai pemegang kedaulatan. Foucault berpendapat, kedaulatan semacam itu memiliki pemahaman terlalu kuat dan hal itu terlalu sering atas pemikiran social, politik, dan historis. Sebaliknya ia berpendapat: "Apa yang kita butuhkan adalah filsafat politik yang tidak dibangun di sekita problem kedaulatan... Kita perlu memenggal kepala sang Raja: dalam teori politik yang harus dilakukan (Foucault, 1980: 121).

Munculnya fenomena cyberdemocracy kemudian menjadikan media berada dalam posisi sangat menentukan dalam sebuah peristiwa politik. Setidaknya itu yang lebih mendominasi dalam pikiran para politisi, sehingga sering muncul anggapan bahwa jika ingin jadi politisi maka gunakan media sebagai instrumen utama dalam menggalang dan mempengaruhi massa. Tanpa media, maka bayangan akan kegagalan untuk menjadi politisi semakin terasa, karena itu tidak mengherankan jika dalam era pasca Orde Baru, banyak sekaligus politisi baru muncul yang berangkat dari kalangan pebisnis media massa. Sebut saja

Abburizal Bakrie yang sebelum menjadi tokoh penting dalam jajaran elite Partai Golkar adalah pebisnis di bidang media, dan kemudian dia dikenal sebagai pemilik stasion televisive berita, TV One dan AN TV. Demikian pula Surya Paloh adalah politisi baru yang muncul dari kalangan pengusaha media massa, ia dikenal sebagai pemilik Metro TV. Menyusul kemudian politisi baru seperti Hari Tanusudibyo yang merupakan pemilik MNC Group yang mempunyai bisnis inti di bidang media. Tidak terkecuali politisi baru, Chaerul Tanjung yang muncul sebagai politisi baru karena telah memiliki media, yaitu CNN Indonesia.

Semua itu mengindikasikan betapa media telah menjelma menjadi instrument utama dalam dunia politik pada era demokrasi dan liberalisasi. Tidak satu pun meragukan bagi kalangan politisi bahwa dengan menguasai media maka akan lebih memudahkan untuk meraih karir di bidang politik pemerintahan. Fakta ini menegaskan bahwa: pertama, pemahaman terhadap kekuasaan adalah tunggal dan terpusat, serta bersamaan dengan itu memahami politik adalah persoalan bagaimana mempengaruhi dan menguasai warga masyarakat. Implikasi ini menjurus pada penempatan posisi warga masyarakat harus ditempatkan sebai entitas politik yang pasif dank arena itu harus dikendalikan. Berpolitik adalah perkara bagaimana mengendalikan dan mengontrol warga masyarakat. Untuk tujuan ini, maka kuasailah media, karena media adalah instrument yang efektif untuk mempengaruhi khalayak. Kedua, menurut konseptualisasi para politisi media adalah menentukan dan karena itu juga harus menempatkan khalayak sebagai pihak yang pasif, akan senantiasa menerima begitu saja segala pesan yang disampaikan oleh media.

Konsekuensi lebih lanjut adalah bahwa jika dilihat untuk kepentingan membangun demokrasi substansial, maka menetapkan anggapan politisi terhadap kekuasaan dan media tersebut menyodorkan masalah serius. Artinya, segenap pertanyaan yang sering muncul berkaitan dengan upaya membangun

demokrasi di Indonesia pasca Orde Baru, bahwa mengapa demokrasi tidak muncul dalam sistem yang demokratis? Ini adalah sebuah pertanyaan mendasar mengiringi klaim demokrasi yang telah dibanggakan selama ini. Jawabnya adalah jelas, bahwa sumber utama tidak berjalanya proses demokrasi substansial adalah berkorelasi positif dengan masih maraknya pemahaman kalangan politisi akan kekuasaan tunggal dan terpusat, serta keyakinan terhadap asumsi efek media.

Ketika kehadiran media baru pun juga semakin menambah keyakinan para politisi dan aktor negara tersebut akan efektifnya peran media dalam mempengaruhi khalayak. Karena itu pemanfaatan terhadap media berbasis web sebagai instrumen politik, dan juga jurnalisme digital merupakan sebuah imperatif bagi aktivitas politik. Sejak tahun 2009 pemanfaatan media baru bagi upaya meraih dukungan publik dalam kegiatan politik berkembang signifikan. Kampanye melalui media social seperti facebook, twiter, whatsapp, dan instagram terus mengalami perkembangan secara signifikan. Demikian pula terhadap pemanfaatan media massa digital, hampir dapat dipastikan setiap partai politik memiliki aplikasi untuk menyebarkan pengaruhnya. Jurnalisme digital pun kemudian menjadi alternatif yang digemari oleh publik, seiring meningkatnya komunitas netizen.

Fakta itu semakin menegaskan bahwa kehadiran media massa maupun media sosial adalah penting dan menentukan bagi upaya mempengaruhi khalayak. Keberadaan media dalam sistem demokrasi semakin menunjukkan dominasinya, dan pada saat bersamaan khalayak terus diasumsikan sebagai pihak yang pasif dan harus dikontrol serta dipengaruhi. Memang, karakter media baru yang memungkinkan terjadinya proses interaktif pada satu sisi merupakan sumber daya potensial bagi demokratisasi. Akan tetapi pada saat yang sama, media baru tetap menunjukkan wataknya yang tidak netral sebagai sebuah produk teknologi. Karena itu dengan mudah digunakan oleh

kekuatan dominan untuk mengontrol perilaku khalayak sebagaimana tampak pada aktivitas kampanye politik, dan repotnya yang dikendepankan adalah kampanye politik negatif.

Fakta tersebut persis yang dikatakan oleh Virrilio yang berusaha mengingatkan kembali media – yang semakin invasive dan ada di mana-mana- dengan pesan serius: kewaspadaan media yang obsesif terhadap perilaku, dikombinasikan dengan kebenaran politik, telah mengubah demokrasi dari bentuk pemerintahan partisipatoris terbuka menjadi program perangkat lunak untuk hiburan dan kontrol bagi semua penonton. Kecepatan bisa meningkatkan fenomena ini melalui *shrinking effect* (efek mengerut) global: “dengan percepatan, tidak ada lagi di sana atau di sini. Yang ada hanya kebingungan mental tentang dekat dan jauh, sekarang dan masa depan, nyata dan tidak nyata – suatu percampuran utopia atas sejarah, berita, dan halusinasi dari teknologi komunikasi (Virrilio, 1995a: 35). Kemunculan yang sejaman antara media massa dan militier industrial adalah penanda momen modernitas, kemampuan untuk berperang tanpa peperangan, yang menghasilkan “pasar informasi paralel” berupa propaganda, ilusi, penipuan. Perangkat peningkat teknologis, misalnya *link-up satelit*, *real time feed*, dan video resolusi tinggi, bisa meningkatkan kekuatan televisi untuk menutup-nutupi; malahan, beberapa media konvergen sekarang memiliki kekuatan untuk “mengganti” realitas. Dengan kemunculan pandangan global, maka menghilangkan *viewer-subject*: dalam kedekatan persepsi, mata kita menjadi tidak bisa dibedakan dari kamera optic, dan akibatnya kesadaran kritis bisa menghilang (Derian, dalam Edkins, 2006: 431).

Cerdas Bermedia

Hilangnya kesadaran kritis inilah yang kemudian diharapkan oleh para elite politik melanda khalayak konstituen sehingga mudah dipengaruhi untuk tujuan penggiringan massa ke arah yang telah ditetapkannya, yaitu mendukung

kepentingan politiknya. Elite politik masih yakin bahwa publik melalui media online bisa digiring ke mana ia mau, sehingga setiap kali masa kampanye para elite politik senantiasa memanfaatkan media online untuk kepentingan memperoleh dukungan yang sebanyak-banyaknya. Hanya saja masalahnya adalah mengapa melakukannya dengan kampanye negatif? Merusak kompetitor secara tidak fair dan sportif?

Sementara itu mengapa khalayak juga masih mudah dipengaruhi? Inilah yang menjadi masalah penting bagi perpolitikan Indonesia yang mengarah pada cyberdemocracy. Kehadiran media baru menjadi relevan untuk diikuti transformasi kultur warganya sehingga cyberdemocracy menjadi bagian penting bagi upaya meningkatkan kualitas demokrasi yang substansial. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk menuju ke cyberdemocracy adalah budaya baca dan kesadaran bermedia secara cerdas atau yang lebih populer disebut sebagai literasi media.

Gerakan literasi media ini sangat krusial perannya dalam memasuki era cyberdemocracy, sehingga sejak awal sudah perlu mengubah asumsi dari khalayak yang diposisikan sebagai objek menjadi khalayak aktif. Argumen ini sesuai dengan asumsi yang dikembangkan dalam tradisi kajian media (media studies) yang mengandaikan adanya khalayak berkesadaran kritis. Dalam studi media, argumen khalayak aktif merupakan respons ketidakpuasan terhadap teori klasik yang digemakan oleh Frankfurt School yang mengkritisi peningkatan komersialisasi dan komodifikasi dari industri media dan budaya. Penekanan pada khalayak aktif merupakan penolakan terhadap tesis aliran Frankfurt, di mana khalayak dipandang sebagai korban sistem. Dalam pendekatan khalayak aktif, keaktifan khalayak tampak dalam mendapatkan kesenangan (pleasure) dari menonton televisi, dan dalam menentukan pilihan dan makna. Khalayak merupakan produsen teks dan teknologi. Jadi televisi lebih merupakan tempat demokrasi budaya, bukan penindasan budaya (Ang, 1996: 8).

Meskipun pada level decodingnya, teori encoding decoding dari Hall juga berkaitan dengan khalayak aktif. Dengan demikian, para profesional media yang terlibat di dalamnya menentukan bagaimana peristiwa sosial "mentah" di-encoding dalam wacana. Akan tetapi, pada momen kedua, segera sesudah makna dan pesan berada pada wacana yang bermakna, yakni, segera setelah makna dan pesan itu mengambil bentuk wacana televisual, aturan formal bahasa dan wacana "bebas dikendalikan"; suatu pesan kini terbuka, misalnya bagi permainan polisemi (Storey, 1996: 13). Jadi dalam proses mendecoding tampak terjadi pertautan argumen dengan khalayak aktif.

Sebagaimana dikatakan Hall, terutama dalam kaitannya dengan momen ketiga, momen decoding yang dilakukan khalayak, serangkaian cara lain dalam melihat dunia (ideologi) bisa dengan bebas dilakukan. Seorang khalayak tidak dihadapkan dengan peristiwa sosial mentah melainkan dengan terjemahan diskursif dari suatu peristiwa. Jika suatu peristiwa menjadi 'bermakna' bagi khalayak, pastilah peristiwa itu menyertakan interpretasi dan pemahaman terhadap wacana. Jika tidak ada 'makna' yang diambil, maka boleh jadi tidak ada 'konsumsi'. Jika makna tidak diartikulasi dalam praktik, pasti tidak ada efek (Hall, 1980: 128).

Dengan kata lain, makna dan pesan tidak sekadar ditransmisikan, keduanya senantiasa diproduksi: pertama oleh sang pelaku encoding dari bahan mentah kehidupan sehari-hari, kedua oleh khalayak dalam kaitannya dengan loksinya pada wacana-wacana lainnya. Setiap momen itu sudah pasti, beroperasi dalam kondisi produksinya sendiri. Selain itu, sebagaimana dijabarkan Hall, momen encoding dan decoding mungkin tidak benar-benar simetris. Tidak ada yang niscaya berkenaan dengan hasil dari proses -apa yang dimaksudkan dan apa yang diterima boleh jadi tidak klop. Para profesional media mungkin menginginkan decoding sama dengan encoding, namun mereka tidak bisa memastikan atau menjamin hal itu. Encoding dan decoding terbuka bagi resiprositas yang berubah-ubah, ditentukan

oleh kondisi eksistensi berbeda. Senantiasa ada kemungkinan akan kesalahpahaman.

Penutup

Sekarang dan masa depan dunia politik akan bergeser menyesuaikan perkembangan masyarakat online. Kehadiran media baru tak terelakan karena itu cyberdemocracy adalah sebuah keniscayaan. Akan tetapi fakta menunjukkan, bahwa pada tahap awal sekarang ini, cyberdemocracy di Indonesia masih embrional dan masih diwarnai oleh praktik politik vulgar yang kurang mengindahkan etika berpolitik. Pemanfaatan media online, terutama pada media sosial, yang mestinya menjadi bagian dari pencerdasan politik warga, namun pada kenyataannya masih diwarnai praktik politik yang penuh dengan ujaran kebencian, dan bahkan juga kampanye negatif.

Salah satu sebab utama maraknya praktik

politik vulgar dalam cyberdemocracy tersebut antara lain adalah masih percaya pada asumsi media efek. Bersamaan dengan itu pemahaman kekuasaan masih bersifat tunggal, sehingga para elite politik memanfaatkan media online sebagai arena untuk mempengaruhi massa dan kemudian memobilisasinya. Cyberdemocracy akan berjalan secara konstruktif dan produktif jika persaratan dasar seperti budaya baca dan tingkat literasi media masyarakat warga sudah cenderung meningkat. Oleh karena itu, sukses tidaknya praktik cyberdemocracy di Indonesia akan sangat bergantung pada upaya mendorong masyarakat warga berkesadaran kritis. Dengan demikian gerakan cerdas bermedia atau literasi media sebagai pendorong praktik cyberdemocracy adalah mutlak adanya, sehingga praktik kampanye negatif dan kampanye hitam dalam setiap momen politik akan semakin ternetralisir dengan sendirinya.

Daftar Pustaka

- Ang. Ien. 1985. *Watching Dallas*. London: Methuen.
- Barker, Chris. 2000. *Cultural Studies: Theory and Practice*. London: Sage Publications.
- Edkins, Jenny, dan William, Nick Vaughan. 2009. *Critical Theorists and International Relations*. Routledge. Edisi Indonesia: *Teori-teori Kritis*, Diterjemahkan Teguh Wahyu Utomo. Yogyakarta: BACA.
- Foucault, Michel. 1980. "Truth and Power", dalam *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*, ed. Colin Gordon. New York: Harvester Wheatsheaf, 109-133.
- _____. 1999. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, terjemahan Alan Sheridan, London: Penguin.
- Foucault, Michel. 1990. *Power and Knowledge*. New York: Phanteon.
- Hall, Stuart. 1981. Encoding/Decoding dalam S. Hall, D Hobson, A. Lowe dan P. Willis (ed), *Culture, Media, and Language*. London: Hutchinson.
- Hall, Stuart. 2006. "Encoding/Decoding", dalam Durham & Kellner, *Media and Cultural Studies: Keywords*. London: Blackwell.
- Holmes. David. 2005. *Communication Theory: Media, Technology and Society*. London: Sage Publications.
- Keohane. Robert Owen dan Nye, Joseph S. 1977. *Power and Interdependence: World Politics in Transition*. New York: Little Brown.
- Morley, David. 1980. *The Nationwide Audience: Structure and Decoding*. London: British Film Institute.
- Ogden, M. 1994. Politics in a Parallel Universe: Is There a Future for Cyberdemocracy? *Futures*, 26(7).
- Storey, John. 1996. *Culture Studies and The Study of Popular Culture: Theories and Methods*. Athens: The University of Georgia Press.
- _____. 2007. *Cultural Studies dan Kajian Budaya Pop*. Diterjemahkan Laily Rahmawati. Yogyakarta: Jalasutra.
- Thwaites, Tony. Lloyd Davis, Warwick Mules. 2002. *Introducing Cultural and Media Studies: Sebuah Pengantar Semiotik*. Diterjemahkan Saleh Rahmana. Yogyakarta: Jalasutra.

LOKALITAS-REGIONALITAS DITENGAH-TENGAH EKSPANSIONISME DIGITAL

// We have owned the internet. Our companies have created it, expanded it, perfected it. European companies, who you know, can't compete with ours, are essentially trying to set up some road-blocks." Seperti dikutip *Financial Times*² ini adalah pernyataan Presiden Barack Obama menanggapi sikap Uni Eropa yang dalam beberapa tahun belakangan, sedang berusaha keras dan kolektif memblokir ekspansi bisnis korporasi digital dari Silicon Valley California, khususnya Google. Lebih tegasnya, pernyataan itu adalah cerminan kebijakan ekonomi geopolitik Amerika Serikat terkait penetrasi produk-produk teknologi digital yang seperti tiada henti dihasilkan negara Paman Sam itu, dengan potensi ekonomi yang semakin membesar dan membutuhkan pasar yang semakin luas.

Oleh **Agus Sudibyo**¹

1 Kepala Program Studi Komunikasi Massa Akademi Televisi Indonesia (ATVI) Jakarta. Makalah ini disampaikan dalam SYMPOSIUM ON ASEAN COMMUNITY (SOAC) 2016 "PERSISTING HOPE AND ANXIETY", Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 16-17 November 2016.

2 "Obama attacks Europe over technology protectionism", *Financial Times*, (16/2/15), diakses dari <https://www.ft.com/content>, 10 Februari 2016.

Pernyataan tersebut mencerminkan dua hal. Pertama, *Google, Yahoo, Facebook* dan lain-lain tidak pernah sepenuhnya menjadi institusi sosial. Tanpa mengesampingkan kontribusi mereka terhadap demokratisasi dan deliberasi di berbagai kawasan di bumi ini, mereka adalah institusi bisnis yang concern utamanya adalah komodifikasi dan komersialisasi teknologi dan informasi. Kedua, sepak-terjang mereka di seluruh dunia ternyata tidak terlepas, bahkan menjadi bagian integral dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Mereka mencerminkan kepentingan ekonomi, politik atau geopolitik Negeri Paman Sam. Terbukti kemudian, pernyataan Obama di atas kemudian digunakan sebagai senjata bagi para eksekutif dari Silicon Valley untuk melobi dan menekan negara-negara Eropa dan pemerintah Cina agar lebih terbuka terhadap perubahan lanskap komunikasi-informasi global.

US-CENTRIC EXTRATER- RITORIAL INTERNET

Seperti dinyatakan Dan Schiller³, trend ekspansionisme digital di sini berbenturan dengan trend proteksionisme digital. Di satu sisi, pemerintah Amerika Serikat dan korporasi-korporasi digitalnya menghendaki negara-negara di dunia lebih membuka diri dan mengurangi batasan-batasan yang dapat mengganggu penetrasi inovasi teknologi digital yang seperti tiada henti mereka hasilkan. Mereka terus-menerus melakukan perlawanan atas upaya Uni Eropa dan China untuk membatasi penetrasi bisnis mereka dengan isu anti monopoli, oligopoli akses informasi, *right to be forgotten* dan lain-lain. Berbagai alasan pembenar mereka ajukan untuk melegitimasi ekspansi produk-produk digital Silicon Valley : internet adalah hak setiap orang, demokrasi digital adalah

keniscayaan, ketertutupan adalah masa lalu.

Di sisi lain, berbagai negara mulai menyadari penetrasi teknologi digital menimbulkan banyak persoalan baru pada aras kedaulatan informasi, kedaulatan ekonomi dan pada gilirannya kedaulatan politik. Mereka merasa hanya dimanfaatkan sebagai obyek dari lanskap komunikasi-informasi global yang secara bisnis maupun politis sangat didominasi Amerika Serikat (*US-centric extraterritorial Internet*).

China dengan keras menolak dominasi *Google* dan dengan cepat pulaberhasil mengembangkan *search engine* dan *ecommerce* sendiri : *Baidu, Alibaba* dan *Tencent*. Korea Selatan berhasil mengembangkan *naver.com* sebagai *search engine* terbesar di negeri Ginseng itu, juga untuk menahan dominasi *Google*. Rusia, Perancis, Jerman, Italia, Spanyol, Belanda, Belgia, Brasil dan India juga mengambil langkah drastis terhadap *Google, Facebook* dan lain-lain. Negara-negara ini mempersoalkan : 1) oligopoli akses internet global oleh segelintir korporasi Amerika Serikat; 2) model iklan digital yang menyulitkan negara dalam menerapkan pajak; 3) pelanggaran privasi dan kedaulatan pribadi oleh mesin pencari dan media sosial; 4) tidak adanya mekanisme “bagi hasil” untuk media jurnalistik yang konten jurnalistiknya diagregasi mesin pencari atau agregator berita.

Pertanyaannya kemudian di manakah posisi Indonesia dan negara-negara dalam kawasan ASEAN yang kini telah tergabung dalam kesatuan ekonomi yang baru, MEA? Patut digarisbawahi, dalam konteks industri media dan informasi ke depan, yang terjadi di antara negara-negara kawasan ASEAN terutama sekali bukan persaingan satu sama yang lain, tetapi bahwa mereka menghadapi problem yang sama : ekspansi dan penetrasi raksasa-raksasa teknologi Global seperti *Google, Yahoo, Facebook, Microsoft* dan seterusnya, yang secara faktual telah menggerogoti eksistensi industri media dan informasi nasional.

Kontroversi tentang pajak *Google*

³ Dan Schiller, “Digital capitalism: stagnation and contention?”, 13 October 2015, diakses dari <https://www.opendemocracy.net/digital-liberties>

yang mengemuka di Indonesia hari-hari ini misalnya, juga dialami negara-negara ASEAN lainnya, juga berada dalam konteks benturan antara ekspansionisme dan proteksionisme digital. Demikian juga dengan masalah-masalah lain terkait :oligopoli akses internet, musim gugur media konvensional, *right to be forgotten*, *unconsciousness syndrome* dan lain-lain. Pada intinya perlu kesadaran baru bahwa mesin pencari dan media sosial yang sehari-hari kita gunakan tidak pernah sepenuhnya bersifat sosial. Di belakangnya selalu tersembunyi motif komodifikasi dan instrumentalisasi sejumlah korporasi digital, yang merepresentasikan sebuah kekuatan politik global.

Menghadapi kontestasi seperti ini, negara perlu hadir menegaskan kepentingan nasional, melindungi kepentingan warganya. Terintegrasi dalam lanskap komunikasi-informasi global memang tak terelakkan. Google, Facebook dan lain-lain berkontribusi signifikans terhadap demokratisasi ruang publik politik dan pengembangan ekonomi kreatif. Namun kita harus menghadapi integrasi itu dengan sikap yang jelas agar tidak semata-mata diperlakukan sebagai obyek eksploitasi sistem ekonomi digital yang sangat oligopolik. Indonesia dan juga ASEAN dengan dengan jumlah penduduk, kelas menengah produktif dan pengguna internet yang sangat besar jelas amat menggiurkan bagi raksasa-raksasa teknologi digital. Dengan keunggulan komparatif itu, apa yang diraih? Posisi tawar seperti apa yang dapat ditegakkan?

REGIONAL INEQUALITY

Ada dua persoalan serius yang perlu diantisipasi di sini. *Pertama*, apa yang disebut Timothy B Leese sebagai *regional inequality*.⁴ Dengan mengambil conoth kasus penetrasi Pokemon Go, Lee mempersoalkan dampak sosial-ekonomi digitalisasi industri

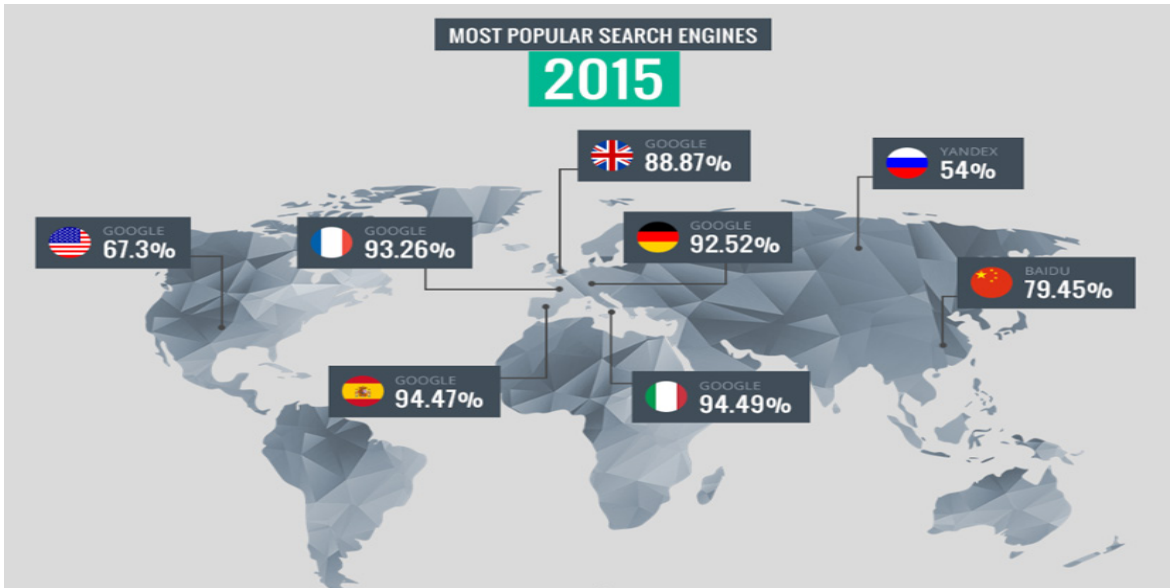
4 Timothy B Lee, "Pokemon Go is everything that is wrong with late capitalism", diakses dari <http://www.vox.com>, 12 Juli 2016.

hiburan dan informasi. Industri hiburan hingga abad 20 digambarkan Lee masih mendistribusikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk turut menikmati surplus ekonomi yang tercipta. Industri film misalnya, memberi pekerjaan kepada begitu banyak orang : para pekerja pembangunan dan perawatan gedung bioskop, mereka yang terlibat pada lini distribusi film, teknisi di gedung bioskop, pekerja gerai makanan di loby bioskop dan lain-lain. Industri media cetak juga memberikan banyak jenis pekerjaan kepada masyarakat, dari wartawan, teknisi percetakan, hingga looper koran.

Namun ketika industri hiburan dan informasi itu telah bertransformasi ke dalam platform digital, terjadi proses efisiensi sedemikian rupa dengan konsekuensi hilangnya jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya ada pada tahap produksi maupun distribusi. Meminjam istilah Lee, proses digitalisasi, otomatisasi dan globalisasi industri informasi dan hiburan telah memungkinkan raksasa-raksasa media meraih keuntungan semaksimal mungkin dengan memberi kesempatan lebih sedikit bagi pihak lain untuk turut menikmatinya. Sebagai gambaran, *web search engine* seperti Google dapat mendistribusikan informasi jurnalistik dan secara tidak langsung mengomodifikasikannya tanpa harus memiliki sekumpulan wartawan dan struktur redaksi!

Pokemon Go menghasilkan pendapatan lebih dari 1 juta US\$ per hari di Amerika Serikat di bulan pertama setelah diluncurkan. Berasal dari kota-kota kecil dan menengah di seluruh Amerika Serikat, uang itu hampir seluruhnya masuk ke kantong korporasi besar di California dan rekanannya di Jepang. Tidak ada surplus ekonomi yang secara signifikan dibagi untuk perekonomian lokal. Lee menyebutnya sebagai ketimpangan regional (*regional inequality*) sebagai akibat dari struktur industri yang bersifat kapitalistik.

Pokemon Go tidak sendirian di sini. Pola yang sama juga dipraktekkan Yahoo,



Google, Facebook dalam konteks lintas negara bahkan lintas benua. Belanja iklan yang semula terdistribusikan kepada media-media nasional cetak, radio maupun televisi, perlahan namun pasti diambil-alih oleh raksasa-raksasa media global itu. Berkat kelihaihan dalam menghindari pajak di berbagai negara, pendapatan iklan dari seluruh dunia dapat diproteksi dan dipusatkan di kantor pusat di negeri Paman Sam melalui negara tax heaven seperti Irlandia, Belanda, Segitima Bermuda dan Kepulauan Caiman.

Analisis kritis sebagaimana ditawarkan Lee menunjukkan ambivalensi revolusi digital. Di satu sisi, harus diakui revolusi digital berdampak signifikan terhadap tumbuhnya industri kreatif di tingkat lokal. Google berkontribusi dalam mendorong tumbuhnya rintisan usaha berbasis online sebagaimana hari-hari ini sedang menjamur di Indonesia. Revolusi menumbuhkan dan mengembangkan ekonomi kreatif sekaligus mendemokratisasikan ruang publik politik. Namun di sisi lain, dia bersifat kanibalistik terhadap industri informasi dan hiburan lokal. Industri media cetak, radio dan buku bertumbangan, sementara industri televisi mengalami kelesuan. Di saat yang

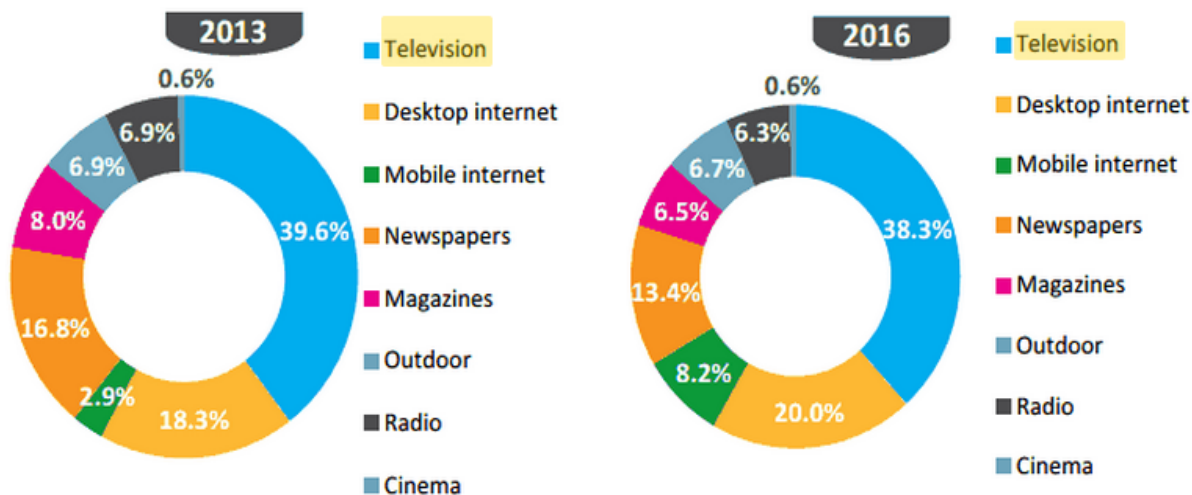
sama belanja iklan digital terus bertumbuh, namun sebagian besar dikuasai pemain-pemain global. Ini terjadi di seluruh dunia termasuk di kawasan ASEAN.

UNLEVEL PLAYING FIELD

Kedua, revolusi digital juga memunculkan masalah baru yang dampaknya sangat memukul industri media, informasi dan hiburan pada tingkat lokal maupun regional, yakni problem iklim berusaha yang timpang (*Unlevel Playing Field*). Media sosial dan search engine pada dasarnya adalah dualitas antara institusi sosial dan institusi bisnis. Mereka tidak pernah sepenuhnya beroperasi sebagai institusi sosial yang memberikan secara cuma-cuma berbagai layanan kepada masyarakat. Mereka adalah institusi bisnis yang menginstrumentalisasi dan mengomodifikasi ketergantungan masyarakat terhadap layanan-layanan yang mereka berikan sebagai obyek periklanan digital.

Sebagai gambaran, kita dapat menyimak data *Zenithoptimedia* berikut

Share of global adspend by medium (%)



Source: ZenithOptimedia

ini. Trend iklan media digital mengalami pertumbuhan pesat lima tahun terakhir. Dari total belanja iklan global yang mencapai 548 milyar dollar tahun 2015, porsi iklan media digital mencapai 29%, melampaui porsi belanja iklan media cetak yang mencapai 12,8%. Belanja iklan televisi tetap dominan dengan porsi 37,7%. Namun Zenitoptimedia memperkirakan, porsi belanja iklan media digital akan melampaui porsi belanja iklan media televisi tahun 2019.

Dari belanja iklan media digital sebesar 159 milyar dolar tahun 2015, sebanyak 65% dikuasai segelintir korporasi global penyedia layanan search engine atau aplikasi media sosial seperti Google, Facebook, Yahoo dan lain-lain. Dalam lima tahun terakhir, Google selalu mendominasi perolehan belanja iklan digital dengan porsi antara 39% hingga 44%. Bagaimana dengan belanja iklan media jurnalistik online? Secara komparatif masih belum signifikan sehingga belum diperhitungkan secara global. Jadi tidak benar jika sebagian orang berkesimpulan media jurnalistik cetak mati karena media jurnalistik online, karena yang

disebut terakhir ini juga tidak mengalami perkembangan yang signifikan secara ekonomi. Yang mengalami perkembangan signifikan sekali lagi adalah search engine dan media sosial.

Tak pelak lagi, masa depan dunia media ditentukan oleh inovasi dan manuver raksasa-raksasa global itu. Di sini kita perlu memperhatikan bagaimana praktek bisnis web search engine seperti Google dan Yahoo mengubah nasib media jurnalisisme. Dengan kapasitas data base dan algoritma yang mereka miliki, web search engine mampu mengagregasi dan menyajikan konten jurnalistik dari semua media sejauh terhubung melalui jaringan internet. Proses agregasi ini notabene terjadi secara otomatis, tanpa perjanjian apa pun dengan si pemilik konten!

Muncul persoalan etika dan hukum di sini. Web search engine memperoleh pendapatan iklan dari persebaran informasi yang sebagian besar tidak mereka produksi sendiri, tetapi mereka himpun dari sumber lain, katakanlah media jurnalisisme cetak maupun online. Perseteruan pun terjadi

antara web search engine dan pengelola media jurnalistik di berbagai negara : Perancis, Inggris, Kanada, Spanyol, Belgia, Jerman, Australia, Amerika Serikat dan China.

Tahun 2013, Google membayar ganti rugi sebesar 60 juta euro selama tiga tahun kepada beberapa media Perancis untuk menghindari gugatan hak cipta. Agustus 2013, Parlemen Jerman mengesahkan regulasi tentang hak cipta media pers (*Ancillary copyright for news publisher*). Regulasi ini mewajibkan agregator berita dan web search engine membayar royalti atas konten berita yang mereka agregasi dari media konvensional. Regulasi serupa juga diterapkan di Spanyol sejak awal 2016. Beberapa pihak menolak regulasi ini, misalnya saja pengelola portal berita yang justru merasa terbantu oleh web search engine. Kontroversi pun tak bisa dihindari.

Hubungan media jurnalistik dengan web search engine ibaratnya hubungan "benci tapi rindu". Nikos Smyrniaos menyebutnya sebagai *coopetition* :kooperasi sekaligus kompetisi.⁵Penyebarluasan konten jurnalistik melalui web search engine memungkinkan media jurnalistik untuk mendapatkan indeks atau traffic. Sebaliknya web search engine tergantung pada produktivitas media jurnalistik dalam menghasilkan berita setiap hari. Namun di sisi lain, kedua pihak sebenarnya sama-sama institusi bisnis yang bersaing untuk meraih iklan dan popularitas. Persaingan yang lebih banyak dimenangkan web search engine.

Masalah berikutnya adalah masalah pajak. Negara Eropa seperti Inggris, Perancis, Spanyol, Jerman, Italia belakangan sedang getol mempersoalkan praktek penggelapan pajak lintas benua, terutama sekali yang dilakukan Google. Sekedar ilustrasi, transaksi iklan Google di London tidak dapat dikenakan pajak Inggris (25%) karena hak paten aplikasi iklan

dimiliki sebuah perusahaan di Irlandia. Pajak Irlandia (12,5%) pun tidak dapat diterapkan karena perusahaan tersebut harus membayar royalti kepada perusahaan lain di Belanda. Perusahaan Belanda ini kemudian membayarkan royalti ke perusahaan Irlandia lain lagi tanpa pajak menurut peraturan Uni Eropa. Perusahaan Irlandia terakhir ini juga terbebas dari pajak karena dikontrol oleh wajib pajak di Negara Bermuda. Istilah *Double Irish With a Dutch Sandwich* populer digunakan untuk mengolok-olok praktek semacam ini.

Pemerintah di kawasan Asia Tenggara menghadapi tantangan serius untuk mengantisipasi praktek ulang-alik pajak yang di Eropa dikenal dengan skandal *Double Irish With a Dutch Sandwich* itu. Sementara di saat yang sama pajak untuk korporasi digital secara langsung menyangkut pendapatan negara yang sangat signifikan besarnya. Menurut data *eMarketer*, belanja iklan digital di Indonesia tahun 2015 mencapai 12 trilyun rupiah (\$950 juta). Sekitar 70% dari total belanja iklan digital itu diambil korporasi global seperti google, yahoo, facebook, twitter. Dapat dibayangkan, 8,4 trilyun transaksi iklan tidak dapat dikenakan pajak di saat pemerintah Indonesia sedang mengalami defisit anggaran dan melaksanakan program pengampunan pajak yang merepotkan rakyat kecil.

Isu pajak ini terkait erat dengan iklim persaingan usaha yang timpang. Jika media massa konvensional maupun *ecommerce* lokal harus membayar pajak perusahaan atau pajak pendapatan, maka sejauh ini perusahaan penyedia search engine dan media sosial berhasil menghindari pajak. Tanpa adanya kepastian skema pajak, web search engine dapat menerapkan harga iklan yang murah atau meraih pendapatan iklan lebih besar. Sementara media konvensional tetap terbebani berbagai pajak dan biaya produksi yang besar. Web search engine jelas lebih efisien karena mereka umumnya tidak memproduksi informasi sendiri dan hanya mengagregasi informasi dari sumber

5 Nikos Smyrniaos, "Journalism facing the Internet oligopoly: Google, Facebook and news infomediation", 2015, diakses dari <http://www.academia.edu>.

lain.

Skema pajak untuk korporasi digital di sini sangat penting untuk menciptakan iklim berusaha yang adil dan setara (*level playing field*). Google, yahoo, facebook dan twitter sekali lagi pada dasarnya adalah korporasi bisnis. Secara kategoris tidak ada beda antara media sosial, mesin pencari dan media massa. Mereka sama-sama entitas bisnis yang harusnya diperlakukan setara sebagai wajib pajak. Pajak untuk mesin pencari dan media sosial di sini menjadi instrumen vital untuk melindungi kepentingan industry media dan informasi di tingkat nasional atau regional. Revolusi digital telah menghadirkan musim gugur bagi bisnis informasi-media : buku, media cetak, radio, dan perlahan-lahan televisi. Sejauh media baru belum sepenuhnya mampu menggantikan fungsi sosial media lama, eksistensi media-media lama itu tetap harus dipertahankan.

Beberapa Usulan

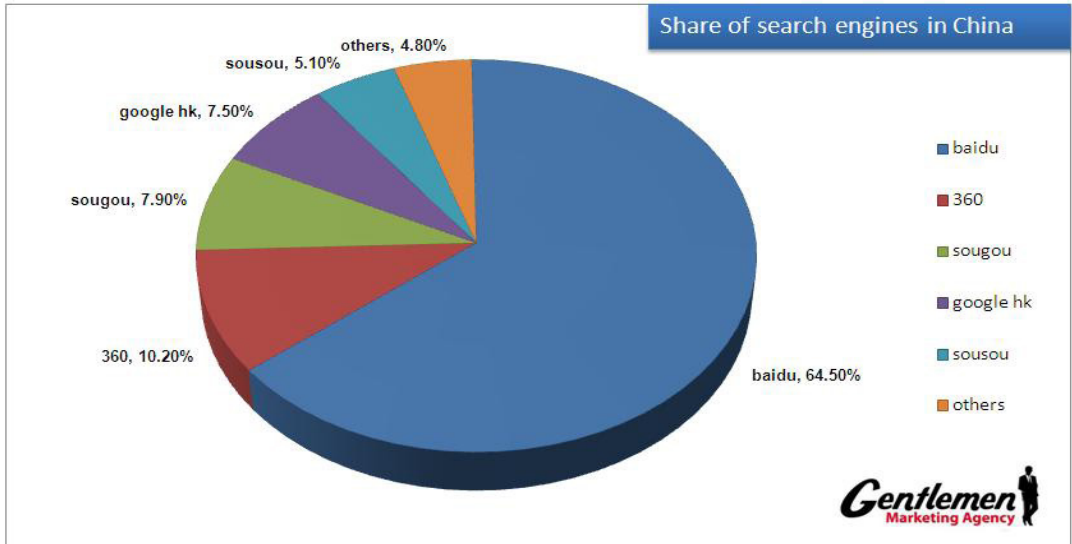
Dengan peta baru seperti ini, beberapa isu strategis perlu dipikirkan komunitas media. Pertama, untuk mendorong terciptanya iklim bisnis media yang sehat, rencana pemerintah meminta Google dan lain-lain menjadi wajib pajak di Indonesia sesungguhnya patut disambut. Rencana ini turut menentukan nasib industri media-informasi-hubungan di Indonesia ke depan, sejauh pemerintah telah mengantisipasi benar praktek pengalihan pajak seperti dijelaskan di atas. Komunitas pers perlu memberi perhatian lebih pada persoalan ini. Hal yang sama juga perlu dilakukan pada level ASEAN. ASEAN sebagai satu kesatuan, semestinya bisa menjadi pihak yang setara dalam berhadapan-hadapan dengan raksasa-raksasa teknologi global dan kekuatan politik yang berada di belakangnya. Besarnya potensi pasar ASEAN semestinya dapat menjadi modal untuk memperoleh posisi tawar yang menguntungkan bagi seluruh negara dan masyarakat di kawasan ASEAN.

Kedua, mengembangkan model hubungan yang saling menguntungkan dengan web search engine. Menolak keberadaan Google bukan

pilihan realistis. Namun merumuskan hubungan yang setara masih dapat dilakukan, bahkan harus dilakukan. Kita misalnya dapat memulainya dengan mengkaji secara hati-hati regulasi tentang hak cipta media jurnalistik seperti diinisiasi negara-negara Eropa di atas. Apa yang dapat diambil dan dikembangkan dari regulasi ini untuk konteks Indonesia dan ASEAN? Perlu segera dipikirkan bersama.

*Ketiga, pengembangan search engine dan media sosial lokal. Pengalaman China dan Korea menunjukkan memiliki search engine dalam lingkup nasional atau regional sangatlah strategis. Pengguna internet pada umumnya mencari informasi dan data secara tidak langsung melalui search engine. Hanya 20% pengguna internet yang mengakses informasi langsung kepada website atau portal yang menyediakan informasi tersebut. Google memanfaatkan benar ketergantungan masyarakat terhadap search engine tersebut untuk meraih leverage dan keuntungan bisnis yang luar biasa besar. Google merekam behavioral data para pengguna Google sebagai search engine di seluruh dunia, lalu memanfaatkannya sebagai obyek periklanan digital dengan sistem pay per click. Sudah seharusnya potensi ekonomi dari bisnis search engine dan media sosial ini juga dinikmati oleh pemain-pemain lokal atau regional. Search engine dan media sosial dimensinya bukan hanya ekonomi-bisnis, tetapi juga kedaulatan informasi, kedaulatan fiskal dan kedaulatan nasional karena kemampuannya dalam memata-matai, merekam dan memanfaatkan data perilaku dan aktivitas para penggunanya secara online (*surveillance capitalism*). Mengingat begitu pentingnya search engine dan media sosial, maka opsinya bagi negara-negara ASEAN hanya dua: terlambat atau terlambat sekali mengembangkannya.*

Namun ada satu kendala potensial yang perlu diantisipasi adalah persepsi publik. Patrick HYPERLINK "<http://www.mediacompolicy.org/promo/about/>" Maines dalam telaahnya berjudul *Google's Impact on Journalism*, menunjukkan upaya



mempersoalkan praktek bisnis google Di Amerika Serikat terbentur oleh rendahnya dukungan publik.⁶Publik terlanjur termanjakan oleh kemampuan google dalam memberikan kemudahan informasi dengan spektrum yang begitu luas.Keberhasilan

⁶ Patrick Maines, "Google's Impact on Journalism", 22 Juli 2013, diakses dari <http://www.mediacompolicy.org/2013/07/articles/media-competition>

google menjadi korporasi teknologi yang sukses telah menginspirasi banyak orang, khususnya generasi muda.Publik tidak begitu mepedulikan dampak-dampak korporatisasi google terhadap kedaulatan fiskal, eksistensi media jurnalistik dan lain-lain.Publik hanya mepedulikan manfaat yang diberikan google. Apatisme yang samasangat mungkin terjadi di Indonesia.

* * *

MENYOAL DEMOKRASI DIGITAL DI INDONESIA

INTERNET telah menjadi instrumen paling kuat dalam abad ke-21 untuk meningkatkan transparansi dalam mengawasi kerja pemerintahan, memberi akses pada informasi, dan juga memfasilitasi warga untuk berpartisipasi dalam membangun masyarakat yang demokratis. Pemanfaatan teknologi internet untuk gerakan masyarakat sipil terutama terlihat mulai tahun 2011 lewat gerakan Arab Spring yang berawal dari Tunisia, Indignadas di Spanyol, hingga gerakan Occupy yang mendunia, sampai-sampai *TIME magazine* menobatkan tahun 2011 menjadi Tahunnya Para Pemrotes. Warga garda depan yang ingin melakukan perubahan politik dengan pola pikir teknologi itu kemudian disebut John Postill (2014) sebagai kelompok Teknolog Pembebasan/*Freedom Technologist*.

Oleh **Damar Juniarto***

* Penulis adalah Regional Coordinator Southeast Asia Freedom of Expression Network/SAFENET, pegiat di Forum Demokrasi Digital/FDD dan Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi/GEMA DEMOKRASI.

Kelompok Teknolog Pembebasan ini memainkan peranan penting dalam menumbangkan rezim otoriter Presiden Zen el-Abidine Ben Ali di Tunisia. Postill menemukan peran pengacara dan blogger Riadh Guerfali yang membuat situs TuniLeaks berisi bocoran kawat diplomatik AS, lalu terhubung dengan mantan aktivis Ali Bouazizi yang mengunggah video pembakaran diri sepupunya Mohamed Bouazizi penjaja makanan di Facebook, kemudian video itu diberitakan ke seluruh Arab oleh Al Jazeera yang dilarang masuk ke Tunisia. Al Jazeera adalah media baru yang memanfaatkan media sosial dan blog untuk memotong birokrasi yang ketat dan memberitakan secara cepat kejadian di masyarakat. Tatkala pemerintah Tunisia melakukan sensor Facebook, kelompok Anonymous melakukan Operasi Tunisia dengan menyerang situs-situs pemerintah Tunisia dengan bantuan dari netizen Tunisia sehingga pada akhirnya Presiden Ben Ali jatuh dan gerakan sipil ini meluas ke Syria, Irak, hingga Libya.

Di Spanyol, Postill menemukan peran pengacara hak cipta digital Carlos Sanchez Almeida yang membuat gerakan digital #NoLesVotes bersama sejumlah aktivis internet untuk mengajak warga Spanyol tidak lagi memberi suara untuk partai mayoritas sejak partai besar Spanyol mengeluarkan RUU tentang *copyright* akibat tekanan Amerika Serikat. Gerakan tersebut dilanjutkan oleh Gala Pin, Simona Levi, Javier Toret dan kawan-kawannya dengan membentuk organisasi payung *Democracia Real Ya*/Demokrasi Sekarang Juga yang melakukan aksi massa ke jalan-jalan Madrid, termasuk melibatkan hacker ternama Isaac Hacksimov yang memutuskan untuk berkemah di lapangan Madrid dan direplikasi di seluruh Spanyol dan menjadi inspirasi gerakan Occupy yang mendunia. Mereka inilah, menurut Postill, para aktor demokrasi yang baru. (John Postill, 2014)

Pendapat lain juga ditulis oleh Manuel Castells, sosiolog terkemuka dari Universitas Oberta de Catalunya Spanyol yang kerap meneliti tentang masyarakat informasi, komunikasi dan globalisasi. Dalam bukunya *Networks of Outrage and Hope*, Manuel

Castells menunjukkan minatnya padagerakan-gerakan masyarakat sipil yang terjadi pada 2011 untuk meruntuhkan rezim-rezim diktator di berbagai belahan dunia yang ia anggap sama seperti menyebarnya viral gagasan-gagasan dan imaji-imaji akan masyarakat yang bebas dari penindasan.

Castells menulis bagaimana ia sebagai bagian dari mahasiswa yang ikut terlibat dari gerakan mahasiswa '68 merasa menemukan lagi gerakan sipil yang dulu dikenalnya, meskipun untuk gerakan masyarakat sipil yang baru ini ia menandai adanya perubahan yang cukup signifikan di mana teknologi informasi memiliki peranan menghasilkan komunikasi otonom yang tidak terpenjara oleh kepentingan dari media dan pemilik modal.

Dengan adanya internet, terjadi apa yang disebut Castells dengan "*mass self-communication*", yakni penggunaan Internet dan jaringan nirkabel sebagai platform dari komunikasi digital sehingga produksi pesan dilakukan secara otonom oleh warga dan sulit dikontrol oleh pemerintah atau korporasi. Itu yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari gerakan masyarakat baru ini. (Manuel Castells, 2012)

Peran Internet Dalam Gerakan Demokrasi Indonesia

Titik inilah yang saya pikir dapat dijadikan pintu masuk untuk serius mempertimbangkan peranan internet dalam demokrasi di Indonesia. Kembali ke tahun 1994 hingga awal tahun 2000 ketika internet mulai digunakan oleh gerakan prodemokrasi di Indonesia hingga David T. Hill dan Krishna Sen menulis bahwateknologi komunikasi seperti Internet memainkan peran sentral untuk menggulingkan kediktatoran Soeharto (David T. Hill dan Krisna Sen, 2005).

Pada 20 tahun yang lalu, masyarakat Indonesia masih mengandalkan cara mendapatkan informasi melalui media konvensional: koran, majalah, radio dan televisi. Selain itu, internet baru diperkenalkan ke masyarakat Indonesia, selisih setahun dari kepopulerannya di Amerika Serikat. Internet Service Provider (ISP) baru muncul sehingga orang mulai mempunyai email pribadi dan bisa berselancar dengan peramban

Netscape Navigator, yang dikembangkan dari pendahulunya NSCA Mosaic. Dengan internet, orang mulai tukar menukar informasi melalui email, meskipun tradisi menulis surat masih sangat kuat.

Di zaman Orde Baru, kontrol informasi berjalan begitu kuat mulai dari aturan surat izin terbit yang dikeluarkan oleh Departemen Penerangan, intervensi ke meja redaksi oleh rezim, hingga pembunuhan wartawan. Salah satu kontrol informasi dikenal dengan nama *breidel* (dari kata *breidel* yakni pembatasan), yang dianggap “pencabut nyawa” bagi media yang kritis. Begitu dicabut Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), dengan seketika media tersebut tidak bisa beroperasi. Praktek *breidel* ini merupakan warisan ketakutan pemerintah kolonial atas media pers yang dikelola kaum nasionalis. Untuk mengatasinya dikeluarkan *haatzai artikelen*, yaitu undang-undang yang mengancam pers apabila dianggap menerbitkan tulisan-tulisan yang “menaburkan kebencian” terhadap pemerintah.

Pada tanggal 21 Juni 1994, SIUPP tiga media besar di Indonesia yakni *Detik*, *Tempo*, *Editor* dicabut Departemen Penerangan. Lewat Surat Keputusan Nomor 123/KEP/MENPEN/1994, ketiga media ini ditutup karena dianggap tidak menyelenggarakan kehidupan pers Pancasila yang sehat dan bertanggung jawab sehingga mengganggu stabilitas nasional. Meskipun bertentangan dengan Undang-undang Pers yang saat itu berlaku, UU Nomor 21 Tahun 1982, kekuasaan yang otoriter menyebabkan ada kebuntuan informasi.

Kebuntuan informasi ini segera disikapi oleh kalangan media saat itu. Setelah pembredelan terjadi, pada bulan Agustus 1994 Aliansi Jurnalis Independen (AJI) didirikan dan AJI menerbitkan majalah Suara Independen. Isinya menyebarluaskan informasi yang seringkali bertolak belakang dengan informasi yang telah disetir oleh kekuasaan otoriter di bawah Soeharto. Tapi tak lama, tiga orang yang bergiat di majalah yang menyiasati seolah penerbitannya berada di Australia itu, Ahmad Taufik, Danang KW, dan Eko Maryadi, akhirnya ditangkap dan dipenjara.

Sensor informasi semakin menjadi-jadi dan pers berada di titik petaka. Sadar bahwa

tidak bisa bergerak bebas, masyarakat mulai mencari informasi alternatif. Setahun berlalu, internet mulai digemari anak muda. Apalagi saat itu, Yahoo! sudah memulai jasa pembuatan email gratis sehingga orang berlomba untuk memiliki email gratis. Search engine, mailing-list, internet relay chat (IRC) semakin akrab dengan masyarakat sehingga tercetus gagasan untuk memanfaatkannya sebagai lalu lintas informasi alternatif, pengganti yang buntu tadi itu.

Pada tahun 1994, Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) yakni gerakan mahasiswa untuk memperjuangkan demokrasi di Indonesia sudah menggunakan email untuk berbagi informasi dan koordinasi. Dikembangkan dengan sistem *Sentra Informasi* untuk mencegah terlacknya informasi SMID oleh intelejen negara, jaringan email pro demokrasi ini mayoritas berisi runtutan kronologis berita aksi mahasiswa/buruh yang dikirim oleh anggota SMID dan update beritanya sewaktu terjadi penangkapan terhadap mahasiswa atau buruh yang berdemostrasi ke *Sentra Informasi* yang berada di luar negeri, untuk lalu dikirim lewat email kepada organisasi dan pribadi-pribadi yang memerlukan berita alternatif untuk mengimbangi media yang terhegemoni oleh kekuasaan. Meskipun berita-berita ini masih beredar secara terbatas, namun sudah ada kesadaran menggunakan internet untuk perubahan sosial.

Di bawah tanah, tersembunyi dalam identitas palsu, digalang sebuah organisasi layanan berita internet yang dikelola oleh sebuah jaringan rahasia. Penggagas jaringan rahasia ini adalah Goenawan Mohammad, pemimpin redaksi Majalah *Tempo*. Di saat ia maju untuk memperjuangkan status hukum Majalah *Tempo* di Mahkamah Agung, secara sembunyi-sembunyi, jaringan ini dipersiapkan untuk bekerja secara rapi. Jaringan rahasia ini kemudian dikenal dengan nama “Blok M” dan Irawan Saptono menjadi koordinatornya. Irawan bertugas mengatur nama palsu seperti Ghufron, Tosca, dll., menyiapkan tempat persembunyian, dan menulis laporan untuk dikirim ke John MacDougall.

Blok M bekerjasama dengan Nusanet dan mailing-list apakabar@clarks.net yang

dimoderatori oleh John MacDougall, sehingga berita yang ditulis oleh Blok M kemudian diposting oleh John MacDougall di mailing-list apakabar dan dengan sendirinya meluas masuk ke ruang-ruang privat lewat email pribadi. Berita ini kemudian disebarakan lagi antar mailing-list atau bisa juga diforward. Saat itu Blok M mengelola enam layanan berita bawah tanah ini: *Pipa* untuk berita umum, *Bursa* untuk berita ekonomi. Lalu ada *SiaR* untuk berita umum, *Istiqlal* untuk opini, *Matebeam* untuk berita dari Timor Timur, *Mambramo* untuk berita dari Papua, *Meunasah* untuk berita dari Aceh, *TNI Watch* untuk berita tentang TNI, dan *Goro-Goro* tentang lelucon politik. Dua yang pertama segera ditutup karena “tidak aman”. Selain itu, Blok M juga menerbitkan media cetak yaitu *X-Pose* dan *Bergerak!*

Di saat yang sama, kelompok-kelompok pro demokrasi lain juga mulai menggunakan email mengikuti pola yang ada, termasuk juga membentuk mailing-list baru dengan keragaman tema. Tujuannya tetap sama: menggunakan internet sebagai “jalan lain” untuk melawan sensor dan represi informasi oleh kekuasaan otoriter Orde Baru.

Di luar kelompok jurnalis, mahasiswa merintis “jalan lain” untuk melawan hegemoni informasi. Dengan memanfaatkan lalu lintas informasi melalui email, mahasiswa membangun webzine/webportal untuk menyuarakan pendapat mahasiswa-mahasiswa di Indonesia mengenai kondisi sosial masyarakat dan negara. Pada Mei 1998, diluncurkan *KQ ONLINE Kampus & Kita* di <http://www.bubu.com/kampus> yang dimotori oleh Lembaga Pendidikan, Penerbitan, dan Pengembangan Pers Mahasiswa (LP4M) bekerjasama dengan Bubu.net. Media baru ini berbentuk webzine, bentuknya berbeda dengan mailing-list dan menawarkan tempat untuk berkomentar lewat forum diskusi online. Lembaga yang sama mencetak koran pamflet *Mahasiswa Bergerak* dan membangun basis data informasi di website berisi terjemahan tulisan, risalah, berita untuk dipakai oleh publik secara bebas. Mahasiswa-mahasiswa bekerja di kampusnya masing-masing, mengirim berita melalui email, dan secara berkala webzine dan website ini diperbaharui isinya. Setiap kali ada

bahan baru, informasi ini disebarakan melalui mailing-list yang ada kepada publik.

Barulah pada Juli 1998, muncul portal berita Detik.com yang dikelola oleh Budiono Darsono, wartawan eks *Detik* dan kawan-kawannya. Sejak itu, kebebasan informasi menemukan “jalan lain” karena adanya perkembangan teknologi informasi dan tercatat memiliki kekuatan untuk membuat perubahan sosial yang berarti.

Tumbangnya Orde Baru otomatis mengubah lanskap media konvensional. SIUPP tidak lagi menjadi momok dengan dibubarkannya Departemen Penerangan oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Secara luar biasa, jumlah media meningkat drastis. Dari situasi ketika informasi dibatasi di zaman kekuasaan Soeharto, kini informasi meluap-luap. Tak hanya di media konvensional, media digital pun juga mengalami hal yang sama. Selain Detik.com, muncul juga Astaga.com yang mendapat investasi besar dari Afrika Selatan hingga portal-portal berita lain yang terus bermunculan.

Sayang pada akhirnya media-media yang begitu banyak ini tutup satu per satu bukan karena aturan sensor dari kekuasaan, tetapi karena sebab-sebab yang sifatnya internal dari dirinya sendiri: mismanajemen, kegagalan menguasai distribusi, perolehan iklan yang sedikit, dll. Masyarakat sendiri sudah mulai pintar untuk memilah informasi dari media, karena mereka mulai mengenal beragam sumber informasi, baik lewat media konvensional maupun dari media digital.

Lalu lompat ke tahun 2009, muncul gerakan Cicak versus Buaya di Facebook sebagai bukti bagaimana media sosial dapat berperan untuk mengumpulkan mereka yang sepakat untuk melindungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari kelompok yang dipercaya ingin mengerdilkan peran KPK dengan menyatakan KPK tak lebih dari cicak yang akan berhadapan dengan buaya. Jutaan followers berhasil dikumpulkan oleh gerakan masyarakat sipil ini dan ratusan dapat dikerahkan secara organik untuk membendung upaya pengembosan KPK.

Kemudian pada tahun 2013, gerakan warga Rembang, Jawa Tengah secara kolektif dan sengaja memutuskan memakai internet/

media sosial ketika melihat fakta media-media di Jawa Tengah dibungkam untuk memberitakan persoalan keberadaan pabrik semen di Rembang. Perjalanan mereka dimulai dari belajar memakai media sosial dan sempat harus menghadapi serangan bertubi-tubi dari buzzer yang berhasil membajak hashtag #SaveRembang yang mereka pakai sebelumnya. Namun perebutan ruang tersebut kemudian dimenangkan oleh gerakan warga Rembang setelah mereka mengubah strategi lapangan dengan mengganti hashtag menjadi #RembangMelawan yang lebih progresif dan #DemiRembang yang memanfaatkan penggalangan dukungan lewat platform petisi online Change.org.

Sangat menarik untuk dipelajari bagaimana warga desa seperti di Rembang yang selama ini dipersepsi terbelakang dalam pemanfaatan teknologi internet, justru sekarang menjadi contoh gerakan masyarakat baru yang berhasil memadupadankan antara model gerakan tradisional lewat jalur kebudayaan dan gerakan modern lewat jalur sosial media.

Contoh yang kurang lebih senada juga bisa dilihat pada gerakan masyarakat Ciptagelar, Jawa Barat yang memilih memakai teknologi informasi untuk mencapai tujuan-tujuan demokratis yang mereka bayangkan, semisal dengan memproduksi siaran televisi sendiri lewat CigaTV, mengupayakan jalur komunikasi nirkabel antar warga dengan pemanfaatan OpenBTS serta pemakaian internet untuk memecahkan persoalan warga.

Di Indonesia juga sudah terjadi pemanfaatan internet untuk demokrasi. Pemilu 2014 menandai inisiatif digital untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Dalam Temu Demokrasi Digital 2014 yang digagas Forum Demokrasi Digital (FDD) John Muhammad dari Public Virtue Institute menyebutkan setidaknya pada 2014 telah lahir 64 inisiatif di internet berupa *platform*, *website* dan *mobile apps* yang berusaha memperbaiki demokrasi dengan rincian ada 33 buah inisiatif berbasis *platform/website*, 30 buah berbasis *mobile application* dan 1 buah berbasis keduanya. Ini diluar inisiatif yang bersifat partisan atau yang dilahirkan oleh media massa.

Dari 34 platform atau website tersebut, 20 buah ditujukan khusus untuk kepentingan Pemilu, 6 buah tidak terkait langsung dengan Pemilu dan 8 buah berguna/bermanfaat untuk keduanya. Sementara, dari 31 aplikasi itu, seluruhnya (100%) terkait dengan kepentingan pemilu.

Jika dipetakan berdasar fungsinya, dari 34 platform/website tersebut: (a) ada 4 lembaga yang melakukan pemantauan media sosial termasuk diantaranya *PoliticaWave*, *Provetic* dan *aspirasikita.org*; (b) ada 4 yang berbentuk wadah petisi daring dengan pengguna terbanyak adalah *Change.org* (900.000); (c) ada 16 yang melakukan *voter education*; (d) ada 10 yang mengerjakan pelacakan latar belakang politisi; (e) ada 9 yang melakukan *e-counting* termasuk *kawalpemilu.org*; (f) ada 9 yang melakukan *public assessment* seperti *Meteranpolitik.org* dan *KawalMenteri 2*; (g) ada 7 yang melakukan *election watchdog* termasuk *MataMassa.org* dan ini yang paling menarik (h) ada 8 yang melakukan *netizen proposal*, yakni seperti: *kabinettrakyat.org*, *KAUR* dan *kawalmenteri.org*. *Background checking*, *e-counting*, *public assessment*, *election watchdog* dan *netizen proposal* adalah inisiatif terbaru di Indonesia dan hanya terjadi di 2014.

Sementara, jika dipetakan berdasar metodenya, dari 34 platform/website tersebut: (a) ada 29 yang menggunakan cara penyajian data; (b) ada 7 yang menggunakan cara *review aggregator*, seperti: *jariungu.com* dan *meteranpolitik.org*; (c) ada 21 yang menggunakan cara *crowdsourcing*; (d) ada 6 yang menggunakan cara *voting machine*; (e) ada 4 yang menggunakan cara *crawling machine* dan (f) ada 7 yang dilengkapi dengan opini/analisis. (John Muhammad, 2014)

Situs *kawalpemilu.org* yang berbasis *e-counting* menjadifenomenal pada Pemilu 2014 lalu karena berhasil mengawal suara publik dan mengontrol kinerja KPU. Dengan pendekatan *crowdsourcing* dan *big data*, situs yang diinisiasi oleh Ainun Najib ini menghimpun inisiatif dan itikad warga untuk mengawal dan mengontrol jalannya Pemilu yang difasilitasi oleh Internet. Situs *kawal pemilu* kemudian bertransformasi menjadi *kawalpresiden.org*. Situs ini mampu menjembatani *conversational leadership* ala

Jokowi yang selama ini gemar *blusukan* dan *ngobrol* bersama rakyat sehingga percakapan (*conversations*) bisa terjalin nyaris tanpa batas. (Yohanes Widodo, 2015)

Beberapa contoh tadi memberi kesan kuat pada saya bahwa peranan internet cukup signifikan ketika kita berbicara mengenai wajah demokrasi hari ini. Hal ini sejalan dengan gelombang pemanfaatan teknologi internet terutama media sosial di berbagai belahan dunia bahwa hari ini internet bukan lagi hanya memampukan seseorang untuk menggunakan hak untuk berpendapat secara bebas, tetapi juga mampu menyuarakan hak asasi manusia dan mendorong kemajuan masyarakat ke arah yang lebih baik dan memilikiperanan untuk memenuhi hak warga atas kebenaran. Tanpa akses ke informasi yang memadai yang disediakan oleh internet, maka gagasan akan transparansi, akuntabilitas pejabat publik, pemberantasan korupsi ataupun partisipasi publik dalam proses penyusunan kebijakan, lebih sulit untuk terwujud.

Dalam pemikiran saya, dinamika yang sekarang terjadi di internet memperlihatkan bagaimana masyarakat sekarang ini sedang menggunakan internet untuk melakukan *counter-power*, melakukan kontestasi kekuasaan atas pemahaman yang ajeg atas bernegara, beragama, dan berekonomi. Masyarakat sedang melakukan adu wacana akan gagasan NKRI, agama yang mayoritas, dan ekonomi yang dikuasai oleh oligarki. Saat ini sedang terjadi perluasan ruang publik-sosial politik ke *cyberspace* yang disebut demokrasi digital sehingga apa yang terjadi di internet sebetulnya merupakan kepanjangan tangan dari apa yang sulit terjadi di lapangan.

Sejumlah Masalah Dalam Demokrasi Digital

Namun berbagai catatan mengenai keberadaan demokrasi yang berjalan dengan memanfaatkan teknologi informasi dari internet dan media sosial bukan berarti tidak mendapat halangan dan ancaman. Halangan dan ancaman atas demokrasi di internet ini saya bagi ke dalam dua kelompok.

Kelompok pertama yang berasal dari regulasi atau peraturan negara, sedang yang kelompok kedua yang berasal dari kekuatan

anti-demokrasi yang juga hidup dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

Kehadiran Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 atau disingkat UU ITE sejak tahun 2008 merupakan bentuk regulasi yang semula dianggap bisa melindungi kepentingan swasta, negara, dan publik dari ancaman-ancaman kejahatan siber (*cybercrimes*). Di dalam kategori kejahatan siber itu, pembuat kebijakan pada saat itu memasukkan 3 pasal mengenai defamasi, penodaan agama dan ancaman online yang dianggap bisa mengisi kekosongan regulasi untuk menjerat para pelaku kejahatan yang memakai teknologi informasi.

Akan tetapi, SAFENET/Southeast Asia Freedom of Expression Network mencatat ada lebih dari 215 pelaporan ke polisi atas dasar defamasi, penodaan agama, dan ancaman dari sejumlah pasal yang ada di dalam UU ITE. 90% dari pelaporan merupakan dugaan pelanggaran atas pencemaran nama baik (pasal 27 ayat 3 UU ITE). (SAFENET, November 2016) Elaborasi data lebih mendalam yang dilakukan oleh Remotivi mengungkapkan bahwa dari pelaporan pasal pencemaran nama, 50% merupakan pelaporan yang dilakukan oleh aparaturnegara. (Remotivi, 2016)

Organisasi ini juga menilai munculnya 4 pola pemidanaan baru yaitu: aksi balas dendam, barter hukum, membungkam kritik dan terapi kejut, yang membias dari tujuan awalnya. Jika semula pasal-pasal ini dimaksudkan untuk menangkap para penjahat siber, tetapi kini malah lebih sering dipakai untuk mengkriminalisasikan warga yang memanfaatkan internet dan media sosial untuk menyampaikan keluhan, opini, isi pikirannya, polemik, hingga kritik kepada pimpinan daerah.

Sekalipun UU ITE ini telah direvisi per 26 Oktober 2016 dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 namun permasalahan masih belum dituntaskan sampai ke akarnya yaitu keberadaan pasal-pasal tersebut di dalam UU ITE.

Selain UU ITE, SAFENET juga melihat kebijakan sensor lewat praktik filtering dan blokir situsweb yang dipakai juga untuk merepresi kebebasan ekspresi alih-alih untuk

membendung kejahatan berbasis diskriminasi etnis dan ras serta terorisme. Sehingga implikasinya pada demokrasi dapat dilihat dari sejumlah indikator, antara lain:

Pertama, terjadi efek jeri sehingga pengguna internet/media sosial takut untuk memanfaatkan lagi teknologi internet ini untuk demokrasi. Kedua, terjadi penutupan media online baik karena pemiliknya dituntut dengan UU ITE atau situswebnya diblokir oleh Kominfo atas aduan masyarakat. Ketiga, pelemahan gerakan-gerakan masyarakat baru dengan cara mengkriminalisasikan aktor-aktor demokrasi dengan UU ITE. Untuk contoh yang terakhir dapat merujuk pada pemidanaan 11 aktivis dalam setahun terakhir (SAFENET, 2016).

Kelompok kedua yang saya pikir telah mengancam demokrasi digital adalah para pengguna internet dan media sosial untuk agenda anti-demokrasi. Pertama, ancaman datang dari bentuk-bentuk "slacktivisme" yakni bentuk kegiatan online yang tak punya dampak langsung pada perubahan sosial. Bentuknya mulai dari membubuhkan "like" pada status/facebook page hingga petisi online yang tidak mengubah apapun di dalam kenyataan. Ancaman-ancaman ini sangat melemahkan upaya untuk menjadikan media sosial punya dampak kepada perubahan sosial. Terhadap yang terakhir ini, perlahan mulai dikenali sebagai ancaman yang serius karena menjadikan "social cause" hanya sebagai bendera/slogan kosong dari kegiatan marketing. Karena sulit dibedakan antara slacktivisme dan aktivisme sosial di tahapan awal, banyak masyarakat yang terjebak dan kemudian berapriori pada perubahan sosial yang hendak ditawarkan lewat media sosial. Mereka takut perubahan yang ditawarkan hanyalah perubahan semu. Sikap skeptis mulai juga muncul dengan mengatakan bahwa kekuatan media sosial untuk melakukan perubahan sosial tak lain hanyalah gambar-gambar omong kosong dari *social media evangelists*. Bila skeptisisme ini meluas, bukan tidak mungkin media sosial justru kian melemah.

Kedua, ancaman datang dari sisi teknologinya. Algoritma *News Feed* di Facebook memang dibuat berdasarkan

ketertarikan seseorang. Jadi, sistem tersebut akan menampilkan konten-konten yang dirasa diinginkan oleh pengguna. Namun, konten-konten tersebut tak dibuat untuk bisa membedakan apakah konten yang ditampilkan fakta atau bukan. Karena itu, hampir mungkin seseorang hanya akan melihat konten yang sesuai dengan ketertarikannya meskipun hal itu palsu. Konten yang ditampilkan di *News Feed* akan melewatkan semua informasi dari sudut pandang berbeda. Hal itu menurut sebagian orang tentu berpengaruh pada pendapat seseorang karena diberi informasi yang sama terus-menerus. Inilah yang disebut oleh Eli Pariser sebagai gelembung filter (*filter bubble*).

Dalam buku *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You*, Eli Pariser menulis bahwa Google dan Facebook sebagai mesin pencari dan situs jejaring sosial paling populer memiliki sistem rekomendasi yang menyesuaikan dengan perilaku berinternet kita. Setiap pencarian informasi di Google akan tercatat, setiap interaksi dan perubahan profil di Facebook akan tercatat.

Begitu juga di platform Twitter. Pilihan berkawan sudah menentukan jenis informasi yang didapat sebuah akun berdasarkan gelembung filter yang bekerja. Akibatnya di Twitter, pencarian informasi lebih bergantung pada tanda pagar (*hashtag*) yang menjadi *trending topic*. Catatan inilah yang digunakan dalam merekomendasikan sebuah informasi. Bahkan dalam algoritma Twitter, teknologi yang ada saat ini tidak bisa membedakan mana ekspresi politik yang datang dari individu dan mana yang difabrikasi untuk menyampaikan dukungan oleh akun bot atau akun yang disebut pendengung (*buzzer*) politik.

Ketiga, dilakukannya kampanye kebencian dengan mengkafir-kafirkan pemeluk agama lain di luar kelompoknya, diskriminasi terhadap kelompok LGBT, praktik pengarusutamaan informasi bohong lewat buzzer dan bot, serta trolling kebencian yang dilancarkan secara masif dan terencana. Ada banyak kelompok yang harus diwaspadai karena secara aktif mereka paham cara kerja internet dan media sosial untuk mereproduksi pesan yang mereka perjuangkan.

Dengan model komunikasi Web 3.0,

dunia siber sebenarnya menawarkan output informasi yang beragam dan demokratis. Maksudnya, karena setiap pengguna memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, mengolah informasi, lalu kemudian menyebarkan kepada pihak lain, sehingga perbedaan pendapat adalah sebuah konsekuensi logis dari teknologi informasi yang disruptif semacam media sosial. Namun dengan eksistensi masalah yang mengancam demokrasi itu, jalan mulus demokrasi digital masih perlu diperjuangkan.

Maka dari itu dibutuhkan upaya bersama dari mereka yang mempercayai teknologi internet bisa digunakan untuk demokrasi agar masalah ini tertangani secara baik, karena bila tidak lekas-lekas diatasi maka

akan menimbulkan persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.

Cara yang saya sarankan untuk menangannya yakni merevisi (lagi) berbagai regulasi yang menghambat demokrasi digital dengan perspektif menghargai hak asasi manusia dalam teknologi baru, melakukan literasi digital di kalangan usia muda (anak dan remaja) agar mereka meleak pemanfaatan internet yang demokratis, dan konsolidasi dari para kelompok teknologi pembebasan untuk terus mendorong pemanfaatan internet untuk demokrasi di Indonesia. Konsolidasi ini barangkali benihnya sudah ada, tapi masih perlu diperluas dengan melibatkan lebih banyak pihak semisal gerakan perempuan dan para pendidik di sekolah-sekolah. [dam]

Daftar Pustaka

- Castells, Manuel. 2015. *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age, 2nd Edition*, UK: Polity Press.
- Harsono, Andreas. "Blok M". 2011 <http://www.andreasharsono.net/2011/07/blok-m.html> diakses 10 Desember 2016
- Juniarto, Damar. "Jalan Lain: Di Balik Internet di Indonesia 1994-2013", presentasi di acara Traceroute Party, April 2013.
- La Rue, Frank. 2011. "Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression" http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf diakses 18 September 2016
- La Rue, Frank. 2013. "Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression" http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A.HRC.23.40_EN.pdf diakses 18 September 2016
- Pariser, Eli. 2011. *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You*.
- Postill, John. 2014. The Year of Freedom Technologist, dimuat dalam Savage Minds <http://savageminds.org/2014/07/09/the-year-of-the-freedom-technologist/#more-11429> diakses 5 Januari 2016
- Muhammad, John. Presentasi di Temu Demokrasi Digital, Desember 2014.
- Remotivi. 2016. "Kritis Berpendapat, Penjara Kau Dapat", <http://www.remotivi.or.id/infografis/80/Kritis-Berpendapat,-Penjara-Kau-Dapat> diakses 10 Desember 2016
- SAFENET. 2015. "Pola Pemidanaan Pasal-Pasal Karet UU ITE". <http://www.slideshare.net/damarjuniarto/polapola-pemidanaan-pasalpasal-karet-uu-ite> diakses 10 Agustus 2016
- SAFENET. 2016. "The Struggle for Digital Democracy in Indonesia". <http://www.slideshare.net/damarjuniarto/the-struggle-for-digital-democracy-in-indonesia> diakses 18 September 2016
- Steele, Janet. 2007. *Wars Within: Pergulatan Tempo, Majalah Berita Sejak Zaman Orde Baru*.
- TEMPO, Tim Majalah, Alumni Majalah Tempo, 1994. *Buku Putih Tempo: Pembredelan Itu*.
- Wawancara dengan Andreas Harsono, Lisa Febriyanti, Andy Yentriyani
- Widodo, Yohanes. "Aksi Massa di Dunia Maya" *Bernas Jogja*, 12-13 Januari 2015

KOMUNIKASI POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN DEMOKRATIS

Abstrak

Mengangkat isu tentang pentingnya media massa berperan dalam mendorong berkembangnya komunikasi politik yang demokratis, paparan ini mengetengahkan tantangan dihadapi media massa dalam membentuk subjek politik demokratis yang sangat diperlukan bagi berkembangnya masyarakat demokratis. Mengeksplorasi secara teoritik dan praktikal persoalan ini, terutama dengan memperhatikan kelemahan dan kelebihan pandangan liberal dan komunitarian, paparan ini sampai pada kesimpulan perlunya media massa menjalankan komunikasi politik dalam platform politik kewarganegaraan demokratis.

Oleh **Lambang Trijono, Ph.D¹@**

- 1 @ Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Lulus Sarjana Sosiologi dari Universitas Gadjah Mada tahun 1989 dengan skripsi Pembangunan Pertanian dan Diferensiasi Kelas di Pedesaan Jawa. Lulus Pasca-Sarjana di bidang Studi Konflik dan Perdamaian dari University of Sydney, Australia, tahun 2001 dengan thesis *the May 1998 Solo Riot, the Political-Economic Crises and Anti-Chinese Riot*. Lulus Doktor di bidang Studi Perdamaian dari Universiti Sains Malaysia, tahun 2016 dengan disertasi *From Rebel Movement to Political Parties, the Post-Conflict Democratic Transformation of the Free Aceh Movement*.

Latar belakang

Mempresentasikan berita politik di masyarakat demokratis memerlukan strategi dan cara tersendiri sehingga terbentuk subjek politik demokratis. Presentasi dalam pengertian paling fundamental berarti menghadirkan sesuatu yang masih absen dalam arena kehidupan publik. Sesuatu yang absen dimaksud adalah hadirnya subjek politik demokratis warga negara, atau politik kewarganegaraan, yang diperlukan bagi berkembangnya masyarakat demokratis.

Persoalan ini penting kita lihat kemungkinannya untuk menghadirkan politik kewarganegaraan demokratis di tengah kuatnya fundamentalisme politik berdasarnya kelas, etnisitas dan keagamaan yang berlangsung di Indonesia selama ini. Dua hal penting perlu diperhatikan media dalam menghadirkan subjek politik demokratis, atau politik kewarganegaraan demokratis, melalui komunikasi politik sedang berlangsung.

Pertama, mempresentasikan berita politik berarti merepresentasikan praktek politik demokratis di arena kehidupan publik. Presentasi demikian itu secara reflektif tidak hanya akan membentuk identitas subjek politik, tetapi juga membentuk kehidupan publik. Pertanyaan muncul disini; subjek politik dan kehidupan publik seperti apa yang hendak kita bentuk? Kedua, persoalan ini membawa konsekuensi perlunya imaji atau cita-cita politik masyarakat demokratis hendak dibentuk. Muncul pertanyaan kemudian; masyarakat demokratis seperti apa yang hendak di kita bentuk di masa depan?

Paparan artikel ini membahas perlunya pembentukan subjek politik demokratis, atau politik kewarganegaraan demokratis, dari berlangsungnya komunikasi politik berlangsung di media massa dan tantangan dihadapi dalam pembentukan masyarakat demokratis di Indonesia. Paper ini sekaligus boleh dikata merefleksikan berkembangnya masyarakat demokratis di Indonesia dari komunikasi politik sedang berlangsung.

Paper ini berasumsi bahwa komunikasi politik di masyarakat demokratis memiliki karakteristiknya tersendiri dan dalam prakteknya memerlukan strategi khusus dalam pembentukan subjek politik demokratis yang diperlukan bagi berkembangnya masyarakat demokratis.

Sebagaimana akan dipaparkan dalam artikel ini, merespon kegalauan publik selama ini, penulis mengangkat perlunya pembentukan media demokratis bagi pembentukan subjek politik demokratis, atau politik kewarganegaraan, untuk mengatasi kebuntuan politik sedang berlangsung. Ketidadaan media demokratis sangat kita rasakan selama ini. Sebagaimana kita saksikan, di tengah kehidupan publik selama ini telah berkembang kegalauan terkait berita politik berkembang di media massa. Media massa dirasakan seringkali mempresentasikan berita politik yang tidak hanya kurang mencerminkan persoalan publik nyata dihadapi warga masyarakat, tetapi juga seringkali mereduksi peristiwa politik menjadi berita yang lebih merepresentasikan kepentingan kelompok politik dominan.

Sebagian warga berpendapat pemberitaan politik di media kurang menyadari pentingnya pembentukan subjek politik demokratis. Terlalu didekte kepentingan bisnis, pemberitaan politik dirasakan terlalu konservatif hanya mengedepankan kepentingan *private* daripada kepentingan publik. Sebagian lainnya berpendapat, pemberitaan politik di media terlalu bias kepentingan partai politik atau pemerintah berkuasa. Terlalu dekat dengan penguasa, atau bahkan terlibat langsung dalam politik kepartaian, media kerap kali sulit bersikap independen dalam memberitakan peristiwa politik, dan bahkan ditengarai, seringkali tunduk memenuhi kepentingan propaganda pemerintah berkuasa dan partai politik.

Kecenderungan ini membawa implikasi terbaikannya pembentukan subjek politik demokratis diperlukan bagi berkembangnya masyarakat

demokratis. Terbentuknya subjek politik demokratis, atau politik kewarganegaraan, kurang diperhatikan media politik selama ini. Padahal, seperti kita tahu, media demokratis memiliki peran strategis dalam pembentukan subjek politik demokratis. Media demokratis tidak hanya memberikan peluang semua sudut dan sisi kepentingan warga akan didengar suaranya, tetapi juga penting untuk memperbaiki kehidupan publik.

Kehadiran media demokratis demikian itu sangat diperlukan. Pembentukan masyarakat demokratis di Indonesia selama ini mendapat tantangan tersendiri dari komunikasi politik sedang berlangsung. Komunikasi politik terasa masih belum memberikan dukungan bagi terbentuknya subjek politik demokratis. Bahkan, dalam banyak kasus, seperti kita saksikan selama ini dalam komunikasi politik berlangsung di media massa, dari pemberitaan Koran, penyiaran TV, sirkulasi informasi di media sosial terkait aktivitas politik warga, politisi, partai politik dan pejabat publik, justru seringkali menghambat, dan bahkan mematikan, atau menutup peluang, bagi terbentuknya subjek politik demokratis, dan berkembangnya politik kewarganegaraan.

Media massa, dan bekerjanya komunikasi politik itu sendiri, memang sekarang ini menghadapi banyak tantangan bagaimana bekerja di masyarakat demokratis. Demokratisasi telah menjadikan masyarakat semakin plural. Praktek kebebasan dalam demokrasi telah menimbulkan perbedaan semakin tajam di kalangan warga masyarakat. Berkembangnya kebebasan itu sendiri tidak bisa dihambat, dan bahkan, diperkirakan akan semakin berkembang di masyarakat. Perkembangan demikian menimbulkan tantangan tersendiri bagi pencapaian kepentingan umum, atau kebaikan publik. Tanpa dicapai kepentingan umum dan kebaikan publik itu sulit dibayangkan akan terjadi perbaikan kehidupan publik sebagaimana diharapkan masyarakat demokratis.

Kemampuan media demokratis menjalankan komunikasi politik bersifat refleksif dan tranformatif bagi terbentuknya subjek politik demokratis, atau politik kewarganegaraan demokratis itu, menjadi kepedulian paparan ini. Perbaikan kualitas komunikasi publik sangat diperlukan untuk mencapai kehidupan publik yang demokratis. Namun, mengingat berkembangnya perbedaan yang semakin tajam sebagai akibat berkembangnya praktek kebebasan dibawa demokrasi itu, perbaikan kualitas komunikasi publik saja tidak cukup, tanpa disertai kemampuan mengatasi bekerjanya dimensi politikal, atau antagonisme, berkembang di masyarakat.

Kemampuan menjalankan komunikasi politik di tengah berkembangnya dimensi politikal, atau antagonisme di masyarakat itu, sangat diperlukan media massa. Hal itu penting bukan hanya untuk mencegah terjadinya eksklusi dari pemberitaan politik dilakukan. Melainkan, juga agar pemberitaan politik dilakukan bermuara pada perbaikan kehidupan publik. Termasuk di dalamnya, perlunya pembentukan subjek politik demokratis, atau politik kewarganegaraan demokratis, yang sangat diperlukan bagi berkembangnya masyarakat demokratis.

Memediasi politik

Pembentukan subjek politik demokratis menjadi bagian penting dari politik kewarganegaraan terkini di masyarakat demokratis. Komunikasi politik memiliki peran penting dalam pembentukan subjek politik demokratis ini. Politik kewarganegaraan merupakan persoalan kesadaran keanggotaan warga di dalam suatu komunitas politik, atau suatu negara, atau suatu Republik. Warga sepenuhnya menjadi warga negara ketika terikat dalam satuan politik negara dan karena itu hubungan warga dan negaranya tidak bisa diabaikan dalam penguatan politik kewarganegaraan.

Hubungan demikian itu dimediasi oleh media dalam aktivitas disebut memediasi politik. Hal itu berlangsung dalam dua ruang

atau arena penting, yaitu di ranah publik, atau *public sphere*, dan ranah kebijakan, atau *policy sphere*². Ranah atau arena publik disini menunjuk pada arena kehidupan publik informal, mulai dari dalam bentuknya bisa seperti cafe, ruang internet untuk bersenda gurau, pertukaran opini di majalah atau koran, hingga program perbincangan dan wawancara di televisi, dimana warga bisa mengeksplorasi kehidupan sosial, menyampaikan kepentingan publik, atau terlibat dalam konflik dan penyelesaiannya dalam urusan publik. Dalam ranah ini, individu-individu memiliki kebebasan untuk menilai kualitas kebijakan publik atau pemerintahan bebas dari sensor.

Sementara penting melihat bagaimana orang terlibat dan mengkomunikasikan sikap politiknya dengan yang lain atau terhadap pemerintahan, penting juga melihat tingkatan dimana deliberasi publik, dan siapa terlibat dalam deliberasi tersebut, mendapatkan jalannya untuk menjadi bagian atau mempengaruhi penentuan kebijakan. Dalam hal ini, penting melihat perbedaan politik dalam arti seperti yang terjadi dalam hubungan antara warga dengan institusi seperti parlemen, pengadilan, dan institusi lain, atau disebut *policy sphere*, dan politik sebagaimana ditunjukkan dalam kepedulian warga terhadap kekuasaan dan nilai yang ada dan berlangsung di dalam kehidupan sosial atau arena publi, atau disebut *public sphere*. Hanya dengan memperhatikan apa yang terjadi di kedua *political sphere* itulah kita bisa menilai politik kewarganegaraan, dan hubungan warga negara dan negara, dalam konteks berlakunya sebuah komunikasi politik.

Membaca komunikasi politik berlangsung di masyarakat demokratis, dan bagaimana media berperan dalam pembentukan subjek politik demokratis diperlukan bagi berkembangnya masyarakat demokratis, juga penting memperhatikan

bekerjanya politik atau praktek penggunaan kekuasaan berlangsung di masyarakat demokratis. Bekerjanya media dalam masyarakat demokratis sekarang ini penting memperhatikan apa yang disampaikan Foucault tentang bekerjanya kekuasaan dalam masyarakat demokratis. Menurut Foucault, kekuasaan tidak lagi dipahami hanya terkonsentrasi pada lokus suatu tempat, seperti di kantor, lembaga, organisasi, negara, perusahaan, korporasi dan sejenisnya. Melainkan tersebar ke seluruh masyarakat melalui beroperasinya lembaga, diskursus, dan praktek politik sedang berlangsung. Seperti diktum dikatakan Foucault bahwa 'kekuasaan ada dimana-mana, karena ia berasal dari mana-mana, *'power is everywhere because it comes from everywhere'*.

Mengikuti diktum ini, kita menemukan kekuasaanlah yang membentuk institusi, dan bukan sebaliknya institusi yang membentuk kekuasaan. Selain itu, juga, berarti pembacaan kita atas kekuasaan yang bersifat statist, atau juridiko-politiko, bahwa kekuasaan bersandar pada institusi, harus ditinggalkan menuju pembacaan atas praktek penggunaan kekuasaan bersifat diskursif dan formatif terbentuk dari bekerjanya diskursus dan praktis setiap subjek warga dalam membentuk masyarakat demokratis³.

Pandangan Foucault ini membawa implikasi perlunya media memperhatikan perjuangan politik setiap orang dan individu atau warga masyarakat di berbagai lokasi kehidupan dalam menentukan bekerjanya institusi. Setiap orang dan individu tidak bisa menolak bekerjanya kekuasaan, atau menempatkan diri di luar beroperasinya kekuasaan, dalam diskursus dan praktis yang menentukan bekerjanya institusi atau negara, yang bersifat *pervasive*, dan terkadang *oppressive*, dan bahkan seringkali *repressive*. Beroperasinya kekuasaan dalam bekerjanya negara, atau setiap institusi, termasuk organisasi ekonomi dan korporasi

2 W. Lancae Barnnett dan Robert M. Entman, *Mediated Politics, Communication in the Future of Democracy*, Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

3 Michael Foucault, *Society Must Be Defend*, New York: Picador, 1997.

itu, membentuk kesadaran politik subjek melalui subjektivikasi sedang berlangsung.

Setiap subjek seringkali dipaksa tunduk dan mengikuti konstruksi atau gambaran dibentuk dari beroperasinya kekuasaan di dalam negara atau institusi sehingga tidak jarang menimbulkan resistensi di kalangan warga masyarakat. Seperti dikatakan Foucault 'dimana ada kekuasaan, disitu ada resistensi, *whereever power, there is resistance*. Bekerjanya media di masyarakat demokratis disini termasuk di dalamnya, melalui informasi dan diskursus yang dihadirkan di arena publik, tidak bisa terhindarkan menjadi bagian dari beroperasinya kekuasaan dalam membentuk kesadaran politik subjek warga masyarakat.

Beroperasinya kekuasaan begitu masif membentuk kesadaran politik subjek, melalui bekerjanya institusi, diskursus dan praktek politik berlangsung itu, membuat kita perlu melakukan pencermatan tersendiri terhadap perkembangan demokrasi berlangsung sekarang. Banyak kekhawatiran muncul di kalangan pengamat bahwa komunikasi politik berlangsung di masyarakat diwarnai keterbukaan, kebebasan, atau demokratisasi sekarang, akan membentuk rezimnya sendiri mengabaikan terbentuknya subjek politik demokratis. Seperti dikatakan Deleuze dan Guattari, berkembangnya masyarakat komunikasi massa sekarang ini telah membentuk rejim nomologi mesin yang mengendalikan perkembangan masyarakat. Masyarakat seakan bergerak sendiri dikendalikan rejim nomologi tanpa disertai kesadaran subjek didalamnya⁴.

Dalam paparannya tentang nomologi mesin, atau mesin yang memiliki kehendaknya sendiri diluar kesadaran subjek itu, Deleuze dan Guattari menyaksikan dimana-mana yang bekerja sekarang ini adalah mesin, sebagai sesuatu yang riil, dan bukan figurative. Mesin

mendorong mesin yang lain, mesin disetir mesin yang lain, dengan segala kombinasi dan koneksi yang ada, dan keterlibatan subjek di dalamnya, sehingga dengan itu, apa yang kita lihat selama ini sebagai subjek dengan identitas yang utuh kini tiba-tiba menjadi terbelah atau pecah berkeping. Subjek dengan itu menjadi sesuatu hal sekunder dari arus aliran kehendak yang dikendalikan bekerjanya mesin komunikasi ini.

Kecenderungan ini, menurut Deleuze dan Guattari, menciptakan sebuah subjek khusus tersendiri dalam masyarakat komunikasi massa, yaitu apa yang disebut dengan 'tubuh tanpa organ', atau *body without organ*. Subjek ibarat *tubuh tanpa organ* ini merupakan subjek yang terbelah dimana kesatuan subjek individual atau organisasi menjadi terbelah atau berkeping disebabkan derasnya praksis komunikasi dan begitu melimpah informasi dalam praksis komunikasi publik.

Berangkat darisini, Deleuze dan Guattari juga menengahkan perlunya memperhatikan berkembangnya apa yang disebut model berfikir *rhizomatic*, atau *rhizomatic model of thought*, sebuah model berfikir yang meninggalkan esensi, kesatuan, dan logika biner, menuju berkembangnya multiplisitas, pluralitas dan proses menjadi subjek baru. Rhizome merupakan model berfikir yang menolak kesatuan atau esensi, menuju koneksi yang tiada henti antar subjek yang tidak didominasi oleh suatu pusat atau subjek terpusat. Melalui keterbukaan dan keterkaitannya dengan dunia luar tiada henti, subjek selalu dalam proses menjadi, setiap subjek menjadi berbeda, plural, dan tiada henti terus menjadi subjek yang baru.

Berkembangnya cara berfikir *rhizomatic* ini membawa implikasi tersendiri terhadap kehidupan politik. Arena politik sekarang ini tidak lagi dianagurasi atau ditahkta berdasar garis pertarungan politik negara atau subjek politik yang bersifat tetap atau esensial. Pembagian subjek politik yang menempatkan adanya subjek kekuasaan negara dan subjek resistensi

4 Gilles Deleuze and Felix Guattari, *A Thousand Plateaus, Capitalism and Schizophrenic*, London: Althone Press, 1988.

masyarakat sipil, sebagaimana dibayangkan teori revolusi politik lama, tidak lagi berlaku disini. Hal itu disebabkan karena garis politik revolusi politik lama tidak lagi bisa membentuk koneksi multitudine, termasuk koneksi dengan kekuasaan yang mereka lawan. Karena itu, dalam model rhizomatic ini tindakan politik begitu sulit diprediksi dan karena itu akan selalu bersandar pada sebuah penanda politik. Tetapi, bersandar pada penanda politik itupun, dilihat Deleuze dan Guattari, bukan jalan keluar disarankan, dan bahkan perlu dihindari. Karena, dalam pandangannya, cara berfikir rhizomatic sesungguhnya merupakan cara berfikir ingin keluar dari dominasi penanda politik, atau dari skema rasionalitas bahasa, yang mereka lihat memiliki karakter politik otoritarian.

Namun, meski peringatan Delleuze dan Guattari itu penting diperhatikan, peluang pembentukan subjek demokratis itu sesungguhnya tidak hilang sama sekali. Justru dari perkembangan komunikasi politik itulah kita mendapatkan sebuah pergerakan politik khusus dalam mendorong perkembangan demokrasi. Seperti dikatakan Laclau dan Mouffe, gerakan demokratis terkini muncul dalam bentuknya yang sangat spesifik dipicu berkembangnya kultur politik paska-perang dunia kedua, yaitu kultur politik terbentuk akibat ekspansi sarana komunikasi massa. Perkembangan sarana komunikasi massa memunculkan kelompok baru, didorong konsumsi dan gaya hidup baru, yang tak terhindarkan mempertanyakan kemampuan politik lama dimiliki kelompok dominan⁵. Munculnya kultur demokratis dari kalangan konsumen itu tidak diragukan mendorong munculnya perjuangan politik baru yang berperan sangat penting dalam melakukan penolakan terhadap segala bentuk subordinasi yang berlaku selama ini.

5 Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, *Hegemony and Socialist Strategies, Toward a Radical Democratic Politics*, London: Verso, second edition, 2001.

Perkembangan ini memunculkan antagonisme baru di masyarakat, sebagai bentuk ekspresi dari resistensi dilakukan kelompok ini terhadap komodifikasi, birokratisasi dan homogenisasi berkembang dalam kehidupan sosial. Namun, gerakan mereka pada umumnya masih mengambil bentuk gerakan yang terfragmentasi, partikular dan sangat beragam, menghasilkan diferensiasi dan tuntutan politik berbasis kepentingan individualitas sangat beragam.

Fragmentasi seperti itu memang tidak mudah menghasilkan gerakan sosial yang padu. Namun, ketika perkembangan ekonomimengalamikrisisdanpengangguran meluas, maka tidak terhindarkan membuat situasi mereka akan menjadi sangat sulit. Ketika kita menambahkan masalah ini dengan disintegrasi berlangsung di dalam kehidupan rumah tangga, dan ketika aktivitas mereka tereduksi hanya sekedar sebagai subjek konsumsi, dan dengan itu tidak disertai integrasi sosial yang memadai, maka subjek politik baru itu akan mudah berubah menjadi gerakan pemberontakan kaum muda, sebagaimana sering kita saksikan di berbagai protes berlangsung di kota besar dan di berbagai belahan dunia selama ini. Persoalan ini tentu penting menjadi perhatian media demokratis dalam menghadirkan subjek politik demokratis, atau politik kewarganegaraan, diperlukan bagi berkembangnya masyarakat demokratis.

Bekerjanya dimensi politikal

Pembacaan kita terhadap munculnya gerakan sosial di kalangan kaum muda, atau atagonisme politik baru, dipicu perkembangan sarana komunikasi massa itu, mendorong media massa penting mempertimbangkan bekerjanya dimensi politikal dalam menjalankan komunikasi politik. Pemahaman terhadap bekerjanya dimensi politikal, atau antagonisme politik yang bisa muncul kapan saja dan melalui

basis pengelompokan apa saja ketika hubungan diantara mereka mengambil bentuk antagonisme antara kita dan mereka itu, penting dimiliki media dalam menjalankan komunikasi politik.

Memahami bekerjanya dimensi politikal berbeda dengan pemahaman politik berbasis pengelompokan berdasar kelas, etnisitas dan keagamaan, yang dipandang telah tetap, atau esensial, melainkan perlu memahami pembentukannya sebagai subjek politik dalam proses yang kontigen, prekarius atau sedang dan terus menerus menjadi subjek politik yang baru. Padangan Foucault tentang beroperasinya kekuasaan yang tersebar dalam bekerjanya institusi, diskursus dan praktis politik disini relevan dipergunakan. Meski, bagaimana subjek politik terbentuk dalam beroperasinya kekuasaan yang tersebar itu tidak harus terjebak dalam dikotomi hubungan kekuasaan anatar negara dan masyarakat, atau antara dominasi dan resistensi. Tetapi, lebih mengikuti Delueze dan Guattari, yang melihat tidak adanya titik pijak dan tujuan yang pasti karena hilangnya subjek politik ditengah berkembangnya komunikasi massa sedang berlangsung. Namun demikian, dalam situasi khusus, seperti dikatakan Laclau dan Mouffe, berkembangnya komunikasi massa itu juga menciptakan subjek politik sendiri yang bisa menjadi subjek sejarah yang membawa perubahan, melawan dominasi, dan segala bentuk subordinasi politik lama, menuju kehidupan politik yang lebih egaliter.

Dihadapkan konstelasi politik semacam itu, media politik penting memahami bekerjanya dimensi politikal, terutama dalam keterkaitannya dengan kehidupan sosial, dan perlunya menghadirkan politik untuk menciptakan order sosial atau menciptakan kepentingan publik. Sebagaimana ditekankan Schmitt, memahami kehidupan politikal berbeda dengan memahami politik seperti sering dikatakan kalangan liberal, yang seringkali terjebak dalam kategori moral, baik dan buruk, dan kategori ekonomi, untung dan

rugi, atau kategori estetika, indah dan jelek. Kehidupan politikal, atau *das politiche*, atau *la politique*, memiliki kriterianya sendiri dari terbentuknya hubungan antara musuh dan kawan, atau *friend and enemy relationship*, ketika suatu kelompok mendefinisikan diri sebagai kita berhadapan dengan mereka. Konstruksi semacam itu bisa berlandaskan apa saja, bisa ekonomi, kelas, etnisitas, sentimen keagamaan, dan lainnya, ketika didayagunakan kelompok dalam berhadapan dengan kelompok lain yang didefinisikan atau dikonstruksi sebagai musuh⁶.

Menyempurnakan pandangan Schmitt untuk keperluan membaca perkembangan masyarakat demokratis sekarang, Chantal Mouffe, menambahkan perlunya melihat bekerjanya dimensi politikal itu dalam kehidupan sosial untuk menghadirkan politik guna menciptakan tertib sosial, atau *public order*, atau pencapaian kepentingan dan kebaikan publik. Menurut Mouffe, bekerjanya dimensi politikal itu dapat dilihat pada antagonisme yang berkembang di berbagai sektor kehidupan sosial dan untuk mengatasinya perlu dihadirkan politik, yaitu bentuk kelembagaan, institusi, diskursus, dan praksis politik, untuk mengatasi antagonisme sedang berlangsung⁷. Namun, berbeda dengan Schmitt yang melihat dimensi politikal itu dari kontruksi tentang musuh sedang berlangsung, sehingga politik seringkali berujung pada nihilisme dan praktek otoritarian, Mouffe melihat di masyarakat demokratis konstruksi musuh itu perlu menjadi konstruksi tentang lawan (*adversary*), yaitu mereka yang dilawan pendapat atau pandangannya namun hak-hak mereka dalam berpendapat dan berbeda pandangan diakui sebagai sesuatu hal yang sah dalam demokrasi.

Pembacaan atas dimensi politikal, atau atagonisme dalam versinya sebagai lawan dan bukan sebagai musuh ini,

6 Carl Schmitt, *The Concept of Political*, Chicago: University of Chicago Press, 2007.

7 Chantal Mouffe, *On The Political*, New York; Routledge, 2005.

sangat membantu dalam menjalankan komunikasi politik berlangsung di masyarakat demokratis. Terutama dalam pembentukan media demokratis yang mampu menghadirkan suara dari berbagai sisi dan kepentingan sehingga bisa didengar dan dengan itu tercipta kehidupan publik yang demokratis. Selain menyadari adanya konflik dalam setiap pembentukan kehidupan publik, komunikasi politik bersifat terbuka dan demokratis itu diharap lebih mampu membentuk subjek politik demokratis, atau politik kewarganegaraan, sebagai jawaban atas kebuntuan politik akibat antagonisme politik berlangsung di masyarakat. Dalam formula dan format politik agonistik, mengakui adanya konflik, atau antagonisme, dan melihat pihak lain berbeda pandangan sebagai lawan, dan bukan musuh yang harus dienyahkan, itulah kita menempatkan perlunya menghadirkan komunikasi politik bersifat agonistik, atau media demokratis, untuk mengatasi krisis demokrasi berlangsung sekarang.

Pembacaan demikian itu membawa implikasi bahwa perbaikan komunikasi politik dilakukan disini tidak hanya dengan melakukan perbaikan kualitas komunikasi publik, untuk mencapai konsensus nilai, atau kesamaan pandangan dan penilaian moral, yang sebenarnya bersifat represif, seperti ditekankan pengikut Habermas selama ini, melainkan mengakui bekerjanya dimensi politikal, yang memberikan jalan bagi pembentukan subjek politik demokratis. Pembentukan subjek politik demokratis, atau politik kewarganegaraan demokratis, disini merupakan jawaban atas hilangnya subjek politik dan kemandegan atau krisis demokrasi berlangsung selama ini. Subjek politik demokratis, atau politik kewarganegaraan, disini membawa misinya yang khusus, bukan hanya mengatasi antagonisme dan kebuntuan politik sedang berlangsung, tetapi lebih dari itu bisa diharap menghadirkan perbaikan kehidupan publik.

Politik kewarganegara-

an demokratis

Kita telah mendiskusikan koneksi antara pembentukan subjek politik demokratis, atau politik kewarganegaraan, dengan kehidupan sosial atau masyarakat politik ideal hendak kita ciptakan ke depan. Kita juga telah menempatkan hal itu dalam bekerjanya dimensi politik, sebagai arena penting dimana kehidupan publik berlangsung. Berikut ini kita bahas lebih lanjut kontestasi pandangan politik tentang warga negara sebagai subjek politik demokratis dari berbagai pandangan politik dan idiologi sebelum kita menempatkannya dalam konteks komunikasi politik sedang berlangsung dan media politik diperlukan bagi artikulasi politik kewarganegaraan demokratis.

Sebagaimana dikemukakan Mouffe, selama ini terdapat perbedaan pandangan di kalangan pengamat tentang bagaimana politik kewarganegaraan dilihat sebagai subjek politik demokratis. Cara mereka memandang politik kewarganegaraan sangat dipengaruhi pandangan tentang komunitas atau masyarakat politik yang mereka bayangkan. Ketika mereka dihadapkan pada krisis politik dan kemandegan intelektual dalam politik kelas, etnisitas, keagamaan, dan identifikasi politik bersifat tetap atau esensial lainnya, mereka kemudian menyadari perlunya identifikasi baru bagaimana pengorganisasian sosial dilakukan dalam politik demokrasi. Persoalan identitas politik disini sangat penting dan bagaimana kita berupaya membentuk identitas politik warga negara menjadi satu hal penting dilakukan dalam menjalankan politik demokrasi⁸.

Selama ini berlangsung debat antara politik liberal Kantium dengan komunitarian, atau *civic republicanism*, mengenai ide tentang kewarganegaraan. Mulai dari perdebatan ini kita bisa menemukan cara bagaimana mendefinisikan kewarganegaraan dalam politik demokratis. Apa yang diperdebatan begitu seru dalam sepuluh tahun terakhir

⁸ Chantal Mouffe, *the Return of the Political*, London: Verso, 1993.

antara pengikut politik liberal John Rawls dan kritik dari lawannya kalangan komunitarian dan republik sesungguhnya adalah isu tentang politik kewarganegaraan. Dua macam artikulasi politik berbeda kita temukan dalam perdebatan itu.

Rawls mengajukan gagasan untuk merepresentasi warga negara dalam berlakunya demokrasi konstitusional dengan berdasar pada kesetaraan hak setiap warga negara melalui dua prinsip keadilan. Rawls berpendapat bahwa begitu warga negara melihat dirinya sebagai subjek yang bebas dan pribadi yang setara, maka mereka akan segera menyadari bahwa untuk mencapai kepentingan publik yang dipersepsi berbeda diantara mereka itu, mereka memerlukan konsepsi yang sama tentang adanya kebaikan publik paling mendasar, yaitu kesamaan hak dasar, kebebasan dan peluang, dan kesamaan dalam sarana diperlukan dalam memperoleh ekonomi dan kesejahteraan dalam hubungan saling menghormati satu sama lain. Menurut pandangan liberal ini, warga negara merupakan kapasitas setiap orang untuk membentuk, merevisi dan secara rasional mencapai kebaikan publik yang hendak diraih. Warga negara dilihat menggunakan hak-haknya untuk mencapai kepentingannya ditengah keterbatasan dimiliki untuk mengormati hak-hak orang atau pribadi atau warga negara lain.

Komunitarian dan kalangan republik menolak pandangan yang mempersempit gerak warga dalam pembentukan kebaikan publik itu. Michael Sandel, misalnya, berpendapat bahwa konsepsi Rawls tentang diri, atau *self*, terlalu sempit seolah tidak ada ruang bagi pembentukan komunitas yang membentuk identitas setiap individu. Pandangan demikian menjadikan komunitas bersifat instrumental, sebuah komunitas dimana setiap individu dengan kepentingan dimiliki selalu terus mengejar kepentingannya. Bagi komunitarian, alternatif dari tiadanya terbentuk komunitas seperti itu adalah kembali ke pandangan republikanisme tentang politik yang

memberi tekanan kuat pada pandangan tentang kepentingan publik, atau *public good*, bebas dari dorongan hasrat dan kepentingan individu.

Mouffe berpendapat terdapat masalah serius dari konsepsi liberal tentang warga negara, tetapi kita juga perlu waspada dengan keterbatasan dimilik pandangan republikan. Pandangan terakhir memberikan penjelasan lebih kaya dibanding pandangan liberal, dan konsepsinya tentang politik sebagai realitas dimana kita dapat menyadari kita sendiri sebagai peserta dari suatu komunitas politik sungguh memberikan pandangan kritis terhadap pandangan individualisme liberal. Namun demikian, terdapat bahaya sangat nyata bahwa dengan itu pula kita akan mudah kembali jatuh pada pandangan politik lama sebelum modern, yang tidak mengakui kebaikan dari demokrasi modern dan kontribusi diberikan oleh pandangan liberal. Untuk menghargai pluralisme yang telah sedemikian berkembang di masyarakat moderen, ide tentang kebebasan individual, pemisahan negara dan agama, dan berkembangnya masyarakat sipil, semua itu tidak bisa diabaikan telah ikut membentuk terciptanya politik demokrasi moderen.

Berbeda dengan apa yang sering dikemukakan kalangan komunitarian, komunitas politik moderen tidak bisa diorganisir disekitar ide tentang kebaikan publik yang tunggal. Membangkitkan partisipasi politik warga tidak bisa dilakukan dengan menghilangkan kebebasan individual. Disinilah titik dimana kritik komunitarianisme terhadap liberalisme mengambil bentuk konservatisme yang berbahaya. Masalahnya adalah, seperti dikemukakan Mouffe, kita tidak perlu mengambil salah satu dan membuahkan yang lain dari kedua pandangan ini, melainkan bisa menggunakan keduanya bagaimana politik kewarganegaraan dapat dipergunakan untuk mewujudkan gagasan demokrasi liberal dan plural.

Kedua pandangan politik ini penting diperhatikan untuk menemukan

politik kewarganegaraan sesuai dengan perkembangan demokrasi sekarang. Sementara liberalisme memberi kontribusi menjadikan politik kewarganegaraan sebagai bagian dari ide universal, ia juga menjadikan soal kewarganegaraan hanya dalam arti status hukum, sebagai subjek politik memiliki hak untuk melawan represi negara. Republikanisme, di sisi lain, menekankan pada nilai partisipasi politik dan menjadikannya sebagai bagian penting dari bekerjanya komunitas politik. Tetapi, masalah muncul ketika hal itu dijalankan di masyarakat moderen, ketika praktek demokrasi dihadapkan pada pluralitas aspirasi berkembang di masyarakat sehingga diperlukan demokrasi yang mampu bekerja ditengah pluraitas, yaitu demokrasi liberal dan plural.

Memperhatikan perdebatan kedua pandangan politik itu, pandangan politik kewarganegaraan demokratis berpendapat bahwa ketika tujuan kita adalah menuju demokrasi liberal dan plural, maka konstruksi identitas politik kewarganegaraan demokratis perlu dilakukan. Proyek demikian itu membutuhkan penciptaan jalinan equivalensi diantara pergerakan demokratis yang ada, dan karena itu perlu menciptakan identitas politik yang bisa dijadikan acuan bersama diantara subjek-subjek politik demokratis, dan disinilah kita bisa mendapatkan apa yang disebut dengan kewarganegaraan demokratis.

Ketika kita menerima pandangan ini, bahwa kewarganegaraan demokratis merupakan subjek ideal perlu dibentuk dalam masyarakat demokratis, muncul pertanyaan kemudian masyarakat demokratis atau masyarakat yang baik seperti apa yang ingin kita punyai ke depan? Apakah sebuah masyarakat yang harmonis tetapi pasif dimana perbedaan bisa diatasi dan konsensus bisa diraih melalui interpretasi tunggal atas kebaikan umum? Ataupun sebuah masyarakat yang memiliki kehidupan publik yang terbuka dimana perbedaan pandangan bisa diekspresikan secara bebas dan tersedia kemungkinan bisa

memilih banyak alternatif?

Untuk menjadikan kewarganegaraan demokratis bisa berkembang, pilihan kedua tampaknya paling ideal, sebab berbeda dengan yang biasa dipandang umum selama ini, dalam kehidupan politik yang plural sekarang, sulit bagi kita mempercayai antagonisme telah hilang dan pertarungan politik tidak sedang berlangsung. Seperti kita saksikan selama ini, masih jauh dari kemampuannya menjalankan demokrasi liberal dan plural, demokratisasi berkembang selama ini masih ditandai banyaknya konflik dan kekerasan terjadi disepuluh bekerjanya dimensi politikal berdasarkan etnisitas, keagamaan dan kedaerahan, yang justru menihilkan berkembangnya masyarakat demokratis.

Pandangan dominan demokrasi liberal sendiri selama ini kurang begitu siap menghadapi ledakan politik ini. Persoalan ini hampir tidak tersentuh selama ini. Mereka berpendapat antagonisme merupakan karakteristik politik lama, atau politik *pre-modern*, yang akan hilang dengan sendirinya ketika rasionalisme ekonomi berkembang dan kompromi politik segera mengatasi antagonisme. Namun, disinilah justru kelemahan politik liberal. Terlalu percaya pada rasionalisme ekonomi dan kompromi politik, politik liberal telah begitu mengabaikan bekerjanya dimensi politik, atau antagonisme di masyarakat, yang tidak mungkin hilang dengan sendirinya itu. Mengabaikan bekerjanya dimensi politikal, pandangan politik liberal justru menutup kemungkinan untuk bisa mengatasi antagonisme berlangsung ketika dimensi politikal menguat menyertai berkembangnya demokrasi.

Pandangan menekankan harmoni dari politik liberal ini kurang siap menghadapi demokrasi karena ia cenderung menutup suara-suara yang berbeda atau berseberangan, dan bahkan dengan itu cenderung menimbulkan eksklusi yang dapat memunculkan antagonisme baru di masyarakat. Karenanya, untuk menumbuhkan berkembangnya subjek

politik demokratis, atau kewarganegaraan demokratis, kontestasi demokratis sebaiknya tetap dibiarkan berkembang dan bahkan penting untuk dihidupkan. Melalui bekerjanya praktek demokrasi agonistik, politik kewarganegaraan demokratis ini bisa diharap akan tubuh dan berkembang. Sejalan dengan equalitas politik berlangsung di kalangan warga negara, perbedaan pandangan tidak perlu dieliminasi, sebaliknya keberadaannya perlu diakui sebagai sesuatu hal yang sah, atau *legitimate*, dalam politik demokrasi.

Subjek politik demokratis

Menjadikan media mampu menjalankan komunikasi politik secara agonistik memberikan prospek tersendiri bagi pembentukan subjek politik demokratis, atau identitas politik kewarganegaraan demokratis. Terbentuknya identitas politik warga negara sebagai subjek politik demokratis penting dilakukan media massa dalam menjalankan komunikasi politik. Mempresentasikan subjek politik sebagai bagian dari pemberitaan politik dilakukan media massa memberi peluang tersendiri bagi terbentuknya subjek politik demokratis.

Pembentukan identitas politik warga negara sebagai subjek politik demokratis itu sangat mendesak dilakukan di Indonesia menyertai perkembangan demokrasi sedang berlangsung sekarang. Sebagaimana kita tahu, sejak kemerdekaan hingga kini boleh dikata kita belum berhasil menghadirkan politik kewarganegaraan demokratis sebagai penopang pembentukan negara-bangsa dan pengembang kekuatan Republik. Sebagai komunitas politik, kita mengimajinasikan Indonesia merupakan satuan negara-bangsa yang dibentuk oleh gerakan revolusi kemerdekaan tahun 1945. Pemimpin populis, Sukarno dan Hatta, memimpin revolusi itu dan berhasil membentuk negara-bangsa disebut Indonesia. Apa yang dilakukan Sukarno, Hatta, Syahrir, Yamin dan pemimpin nasionalis lainnya

setelah kemerdekaan, pertama kali, adalah membentuk negara-bangsa. Mobilisasi massa dan artikulasi politik nasionalisme digunakan pemimpin Republik yang baru lahir untuk membentuk negara bangsa.

Namun, seperti tercatat dalam sejarah revolusi kemerdekaan, menyertai lahirnya negara-bangsa itu terdapat banyak *front* gerakan politik. Gerakan politik paling menonjol adalah revolusi massa berbasis sentimen nasionalisme dari kalangan terpelajar, sentimen kelas sosial-ekonomi dari kalangan petani dan pekerja perkebunan, dan sentimen keagamaan dari kalangan komunitas Islam dan Kristen. Sementara artikulasi politik nasionalisme muncul dari kalangan terpelajar dan profesional, seperti dokter, guru, militer, dan birokrat bekas aparat kolonial, mereka harus mengakomodasi gerakan partikular lain yang terus menguat berbasis kelas sosial-ekonomi, keagamaan dan kedaerahan. Dalam sejarah perjalanan pembentukan negara-bangsa, kita menyaksikan pemimpin nasionalis, pada akhirnya, lebih memilih jalur membangun karakter nasional untuk merekonsiliasi kekuatan kelas sosial-ekonomi, keagamaan, etnisitas, dan kedaerahan, daripada membangun identitas politik warga negara untuk menopang berdirinya bangunan negara-bangsa.

Dilanjutkan penguasa Orde Baru, setelah mengambil alih kekuasaan Sukarno, pembentukan identitas politik warga negara masih sangat terbatas dilakukan. Meskipun pembangunan ekonomi dilakukan memberi peluang tersendiri untuk membentuk identitas politik warga negara, pemerintahan Orde Baru lebih suka menciptakan kelas pengusaha dan menggunakan cara represif untuk menekan gerakan politik massa yang pada umumnya masih berbasis kelas, etnisitas dan keagamaan, dan tidak berupaya untuk ditransformasikan menuju terbentuknya gerakan politik demokratis.

Demokratisasi berkembang setelah Order Baru jatuh memberikan peluang tersendiri bagi terbentuknya identitas politik kewarganegaraan demokratis.

Namun, dalam prakteknya kita merasakan, sementara Pemilu terbuka dijalankan selama ini telah menumbuhkan dan memperkuat kesadaran individual warga terhadap hak, kebebasan dan otonominya sebagai warga negara, hal itu kurang teraktualisasi dan terartikulasikan dalam kehidupan publik. Praktek politik demokrasi yang terlalu dominan diwarnai praktek demokrasi liberal kurang berorientasi pembentukan kepentingan publik menciptakan kebuntuan politik tersendiri bagi terbentuknya politik kewarganegaraan demokratis.

Ditengah kebuntuan politik inilah kita berharap media massa berperan mendorong berkembangnya politik kewarganegaraan demokratis. Kebuntuan politik itu begitu serius perlu diatasi. Trajektori sejarah perkembangan negara-bangsa diatas menunjukkan terdapat kelangkaan pembentukan subjek politik demokratis, atau identitas politik warga negara, diperlukan bagi berkembangnya masyarakat Indonesia yang demokratis. Meski demikian, ditengah demokratisasi berkembang sekarang, kita menemukan terdapat peluang bisa didayagunakan untuk membentuk subjek politik demokratis, atau identitas politik warga negara demokratis, dengan melakukan transformasi politik liberal yang dominan berlaku sekarang menuju gerakan politik demokratis.

Bagaimana media massa melakukannya? Hal itu bisa dilakukan melalui komunikasi politik yang dijalankan mengikuti bekerjanya demokrasi agonistik. Di tengah berkembangnya demokrasi berlangsung selama ini terdapat peluang untuk melakukan hal itu. Terdapat dua arena publik bisa digunakan disini. Pertama, arena politik individual warga negara dan, kedua, arena kelembagaan politik, seperti partai politik, parlemen, eksekutif, dan lembaga peradilan. Arena politik individual diperlukan untuk memperkuat hak, otonomi dan kebebasan warga negara dalam mengartikulasikan kepentingan politik. Sementara, arena kelembagaan politik diperlukan untuk merepresentasikan

kepentingan individual warga negara dalam pengambilan kebijakan publik. Melalui dua arena publik itu media massa berperan menjalankan komunikasi politik membentuk subjek politik demokratis dan memperbaiki kehidupan publik.

Penutup

Mengangkat pentingnya komunikasi politik dijalankan media massa dalam membentuk subjek politik, paparan artikel ini melihat peluang media massa membentuk subjek politik demokratis, atau kewarganegaraan demokratis, yang sangat diperlukan bagi berkembangnya masyarakat demokratis. Peluang itu ditemukan dalam bekerjanya komunikasi politik dijalankan media melalui dua ruang atau arena, yaitu arena atau ruang publik, atau *public sphere*, dan ruang atau arena kebijakan, atau *policy sphere*. Melalui komunikasi politik dijalankan media, kedua ruang atau arena itu memberi peluang bagi setiap individual dalam mengembangkan identitas politik, dan sekaligus secara bersama berperan dalam pencapaian kepentingan dan kebaikan publik.

Bekerjanya komunikasi politik itu berlangsung dalam ruang publik, karenanya beroperasinya kekuasaan dalam ruang publik yang diskursif penting diperhatikan media massa dalam menjalankan komunikasi politik. Kekuasaan disini tidak harus dipahami berada dalam suatu tempat, atau sesuatu yang sudah tetap, atau sebagai komoditi yang bisa dimiliki. Tetapi, merupakan sesuatu kekuatan yang tersebar di setiap orang atau individu, beroperasi dalam bekerjanya lembaga dan jaringan antar lembaga, dalam diskursus dan praktis politik berlangsung di masyarakat. Memahami kekuasaan demikian itu memberi peluang tersendiri bagi setiap individual warga negara untuk tidak terjebak pada identifikasi identitas yang sudah tetap, atau fixasasi dan esensialisme identitas berlangsung dalam kontentasi dan pertarungan politik, melainkan justru melalui bekerjanya kekuasaan itu

dimungkinkan terbentuk subjek politik baru, subjek politik demokratis, yang diperlukan bagi berkembangnya demokrasi.

Bekerjanya dimensi politikal, atau antagonisme berlangsung di masyarakat, dengan itu penting diperhatikan media massa dalam menjalankan komunikasi politik. Dimensi politikal, atau antagonisme berlangsung, ketika muncul konstruksi tentang musuh dan kawan, yang selalu terjadi dalam hubungan kekuasaan di ranah sosial atau kehidupan publik, dari penggunaan sentimen apapun, baik berdasar etnisitas, moral, agama, dan lainnya dalam pertarungan dan kontestasi politik. Konflik dan antagonisme semacam itu bisa diatasi dengan menghadirkan politik, yaitu praktek pembentukan institusi, assembli, atau praktis diskursus politik yang diskursif dan formatif bagi terciptanya orde sosial atau tertib publik.

Berbeda dengan pandangan ideal tentang cita-cita masyarakat ke depan dikemukakan politik liberal, yang menekankan pada pemenuhan kepentingan individual, menempatkan setiap individu

terisolasi satu sama lain, dan menafikan konflik berlangsung, serta mengasumsikan konflik kepentingan akan teratasi melalui rasionalitas ekonomi dan kompromi politik, politik demokrasi melihat masyarakat yang bebas dan terbuka disertai perbedaan pandangan diantara warganya merupakan masyarakat ideal penting dikembangkan di masa depan. Ketika tujuan kita adalah menuju demokrasi liberal dan plural ini, maka konstruksi identitas politik kewarganegaraan demokratis perlu dilakukan. Projek demikian membutuhkan penciptaan jalinan equivalensi diantara pergerakan demokratik, dan karena itu perlu menciptakan identitas politik yang bisa dijadikan acuan bersama, yang disebut dengan identitas politik kewarganegaraan demokratis. Dalam projek pembentukan masyarakat ke depan menuju masyarakat demokratis itulah, media massa penting menjalankan komunikasi politik agonistis melakukan pembentukan subjek politik demokratis dalam platform bekerjanya politik kewarganegaraan demokratis.

DEMOKRASI DIGITAL: MASALAH DAN TANTANGAN BAGI MASYARAKAT POLITIK INDONESIA

Abstrak

Tulisan ini membahas masalah dan tantangan yang muncul dalam praktek demokrasi digital. Pertanyaan utamanya adalah bagaimana dan seberapa jauh praktek demokrasi digital dapat memperkuat praktek kewarganegaraan aktif dan representasi politik di Indonesia? Pembahasan dalam tulisan ini memperlihatkan bahwa digitalisasi politik memiliki masalah dan tantangan untuk memperkuat demokrasi substansial. Adapun tiga masalah utama di balik praktek demokrasi digital antara lain depolitisasi kaum muda, oportunistik oligarki, dan normalisasi konflik elit serta eskalasi politik identitas. Karena itu, diperlukan kerangka berpikir baru dan formulasi kebijakan ruang siber baru sebagai panduan untuk mengamankan agenda reformasi politik dan konsolidasi demokrasi. Argumen utamanya adalah bahwa teknologi informasi, media sosial khususnya, menjadi instrumen dan arena belajar demokrasi yang efektif sepanjang praktek tersebut berlaku sebagai kontrol publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan, penguatan kewarganegaraan yang aktif, dan mendorong pelembagaan representasi politik. Tanpa panduan epistemologi politik ini, demokrasi digital beresiko menghadirkan mobokrasi, melanggengkan oligarki, dan mempromosikan teokrasi.

Oleh **Vicky de Djalong***
& **Eric Kaunang****

* Peneliti PSKP-UGM; Dosen
Sosiologi Politik, FISIPOL
UGM

** Peneliti pada PSKP-UGM;
Koordinator Akademik pada
Program ICRS-UGM

Pendahuluan

Demokrasi digital bukan wacana baru dalam diskusi publik kita hari ini. Yang selalu baru dalam diskusi tersebut adalah pembahasan tentang peluang dan resikonya bagi peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. Dalam arti luas, kontribusi demokrasi digital berupa peningkatan kesadaran politik warga negara, penguatan otonomi diri dalam pengambilan keputusan politik, dan pematangan etika sosial untuk kehidupan multikultural. Dalam arti khusus, demokrasi digital meningkatkan interaksi antara masyarakat dan negara, antara warga negara dan perwakilan politiknya, atau antara kelompok kepentingan dan komunitas pembuat kebijakan di tingkat pemerintahan. Terhadap tuntutan tersebut, kita menemukan kenyataan bahwa demokrasi digital kita hari ini masih ditandai banyak masalah dan tantangan.

Masalah dan tantangan tersebut juga mencerminkan fenomena global dari praktek demokrasi digital. Media sosial memainkan peran penting dalam proses demokrasi di berbagai negara dan kawasan di dunia. Arab Springs yang berlangsung di Timur Tengah bercerita tentang meningkatnya kesadaran politik di kalangan kaum muda dan lapisan masyarakat bawah yang sekian lama aspirasi mereka tersumbat oleh struktur politik otoritarian dan oligarkis. Kendati pada akhirnya 'revolusi digital' ini menemui jalan buntu seperti perang di Libya dan Syria, internet telah membuktikan dirinya sebagai ruang artikulasi politik dan penggalangan aliansi antara kelompok lintas kelas, identitas dan wilayah. Fenomena serupa dapat kita jumpai di Amerika Serikat dengan terpilihnya Donald Trump sebagai presiden dan berhasilnya kampanye Inggris keluar dari Uni Eropa (*Brexit*). Dalam dua peristiwa penting ini, media sosial menjadi ruang artikulasi politik dan perlawanan terhadap rejim neoliberal-plutokrat yang dikendalikan birokrat EU di Brussel dan rejim neoliberal-neokonservatif di Washington yang seluruhnya mendukung Hillary Clinton. Pesan pentingnya adalah perlawanan terhadap narasi rejim politik dominan berhasil dimenangkan 'silent

majority' melalui media sosial. Lebih dari itu, media sosial berhasil menghadirkan narasi politik yang kritis terhadap industri media (televisi dan surat kabar) yang sekian lama menjadi mesin propaganda oligarki politik di Eropa dan Amerika Serikat.

Kondisi demokrasi digital dalam negeri kita patut dibahas secara kritis dan konstruktif. Belakangan ini internet, khususnya media sosial, tampil sebagai arena strategis dan taktis bagi diskusi dan debat politik berbagai kalangan termasuk kaum muda. Tidak terkecuali presiden dan mantan presiden, para politisi tua dan muda, gubernur, bupati serta pejabat daerah memanfaatkan teknologi digital ini untuk berpendapat atau membela pendapatnya. Ruang siber kita dipenuhi berbagai isu, dari soal susila, korupsi sampai isu terkini seperti penistaan agama dan kelayakan sorang non-muslim menjadi kepala negara atau pemimpin di daerah berpenduduk mayoritas Muslim. Semakin terlihat bahwa sejumlah isu politik yang pada masa lalu dianggap urusan pejabat dan politisi sekarang dibahas dan diperdebatkan berbagai kalangan tanpa ada sekat profesi, identitas agama, etnis dan ideologi politik. Pada saat bersamaan, ruang siber menunjukkan kebangkitan kesadaran kelas, afiliasi etnis, agama, dan wilayah.

Munculnya kesadaran kelas dan politik identitas tersebut sekaligus menghadirkan paradoks demokrasi. Di satu sisi, kewargaan digital (*netizenship*) mencerminkan bekerjanya politik pengakuan, *politics of recognition*, terkait adanya marjinalisasi sosial-ekonomi melalui kebijakan pembangunan dan kebijakan politik. Orang-orang minta didengar, diperhatikan suaranya, dan bisa mempengaruhi pembuatan kebijakan bahkan mempengaruhi keputusan hukum. Di sisi lain, ruang siber ibarat api dalam sekam, berlangsung polarisasi identitas multikultural yang bercampur baur dengan isu marjinalisasi ekonomi dan politik. Sikap etis untuk saling mendengar dan memahami seakan tidak menjadi panduan dalam diskusi dan debat dalam ruang siber ini. Nyaris tak beda dari cara politisi, intelektual dan pemimpin berdebat di media televisi, suasana dan arah percakapan publik

dalam media sosial pun tidak sepenuhnya menghasilkan pengertian bersama, yang tentu segera membatalkan kerja sama di luar dunia maya. Kuatnya politik pengakuan yang anti-demokrasi ini mendatangkan kekwatiran tersendiri mengenai seberapa jauh demokrasi digital dapat ikut memperbaiki kultur politik nasional yang narsis, asertif dan sarat dengan pencitraan diri dan kelompok.

Paradoks demokrasi digital bukanlah paradoks sederhana. Krisis etika sosial dan absennya konsolidasi kewarganegaraan demokratis dalam ruang siber mencerminkan masalah yang lebih fundamental dalam praktek demokrasi kita hari ini. Kritik terhadap demokrasi digital akan bermakna strategis jika ditempatkan dalam konteks kritik radikal terhadap kondisi dan cara kita berdemokrasi sejak Reformasi. Salah satu agenda utama Reformasi adalah mengembalikan masyarakat sebagai warga negara yang aktif dalam proses politik dan pembuatan kebijakan. Tujuan reformasi adalah menghancurkan oligarki politik dan menghidupkan kembali representasi politik yang aktif, transparan dan akuntabel. Sebagaimana kita ketahui transparansi dan akuntabilitas politik perwakilan belum menjadi kenyataan kendatipun sejumlah regulasi dan instrumen sudah diimplementasikan.

Politik elit nasional, termasuk di daerah-daerah, belum menghasilkan sebuah praktek politik hegemonik dan semakin kuat dikendalikan politik dominasi. Perbedaan antara dua jenis politik ini sangat tegas. Politik hegemoni merayakan perbedaan kelas dan identitas tapi bergerak maju untuk menghasilkan tujuan bersama sebagai demos, sebagai Indonesia. Di lain pihak, politik dominasi tampak merayakan perbedaan kelas dan identitas tetapi bergerak di tempat untuk melestarikan persaingan politik merebut dan menjatuhkan kekuasaan, dan tidak berikhtiar membangun demos atau masyarakat politik baru. Demokrasi digital kita persis berada dalam situasi tersebut. Elit politik yang malas dan oportunist membajak isu dan peristiwa yang muncul dalam ruang

siber dan menjadi juru bicara atas nama rakyat dalam perdebatan di parlemen dan ruang publik seperti seminar, televisi dan surat kabar. Alih-alih melakukan kritik terhadap polarisasi kelas dan identitas dalam ruang siber, politisi dan pejabat menjadikan sejumlah isu di media sosial sebagai senjata untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan politik.

Karena itu, tulisan ini berargumen bahwa digital demokrasi akan bermanfaat bagi konsolidasi demokrasi jika dicarikan kontribusinya bagi penguatan pelembagaan perwakilan politik dan mendorong warga negara semakin aktif dalam proses pembuatan kebijakan pembangunan, kebijakan keamanan dan kebijakan politik. Sebagaimana dibahas pada sesi-sesi berikutnya, ruang siber rentan menjadi arena polarisasi ideologis dan identitas. Kerentanan tersebut membuka pintu bagi oportunistik politik oligarki. Kita menolak pandangan yang memperlakukan ruang siber sebagai alternatif bagi kebuntuan praktek demokrasi formal. Pandangan ini melupakan relasi timbal balik antara demokrasi digital dan politik dominasi selama ini. Tulisan ini diakhiri dengan mengajukan sejumlah rekomendasi yang bersifat strategis bagi konsolidasi demokrasi hari ini dan ke depan.

Demokrasi Digital dalam Perdebatan

Demokrasi digital merupakan bagian integral dari diskusi mengenai masyarakat digital (*digital society*). Di bawah rubrik Digital Citizenship, para penstudi mencoba memperlihatkan dilema dan peluang yang bisa ditawarkan masyarakat digital bagi konsolidasi demokrasi. Pertanyaan utamanya adalah bagaimana dan seberapa jauh artikulasi politik melalui medium digital, khususnya internet, dapat melayani tujuan ganda berikut. Pertama, bagaimana menjadikan ruang siber sebagai arena belajar berdemokrasi khususnya bagi kaum yang hari ini dikendalikan oleh neoliberalisme yang anti-politik. Kedua, bagaimana keterlibatan dalam demokrasi digital dapat

mendorong dan memperkuat artikulasi politik warga negara dalam pembuatan kebijakan di dunia nyata. Dengan kata lain, para penstudi merumuskan hubungan saling pengaruh antara 'netizenship' dan 'citizenship'.

Debat kritis dalam studi demokrasi digital didorong oleh kekhawatiran bahwa pengarusutamaan praktek masyarakat digital hanya melayani agenda kaum globalist, yakni, kepentingan korporasi transnasional dan rejim politik internasional yang mendorong interaksi transnasional dan kosmopolitanisme baru tanpa sekat negara-bangsa. Strategi yang digunakan rejim neoliberal ini adalah dengan mempromosikan konektivitas dan memperkuat peran masyarakat sipil sebagai aktor-aktornya di setiap negara yang dijadikan target neoliberasisasi. Kritik ini bertolak dari pendekatan ekonomi politik dan poststrukturalist bahwa neokolonialisme atau penaklukan jenis baru berlangsung melalui produksi dan diseminasi pengetahuan yang secara langsung ditargetkan pada warga negara tanpa peran maksimal dari negara. Antonio Negri (2000; 2004), misalnya, berargumen bahwa agenda neoliberal membentuk suatu imperium ekonomi-politik global dilakukan dengan menciptakan fragmentasi di kalangan masyarakat di mana teknologi informasi dan ruang siber menjadi arena politiknya.

Bertolak dari kekhawatiran serupa, Christian Fuchs (2014), mengajak kita mencermati kontrol dan pendisiplinan yang dilakukan oleh rejim neoliberal melalui internet. Kaum globalist membajak perlawanan warga negara dalam ruang siber untuk menggulingkan pemerintahan, kekuatan politik atau agama tertentu. Selain untuk tujuan fragmentasi sosial sebagaimana tersirat dalam proyek multikulturalisme neoliberal (Brown, 2006), kekuatan globalist menargetkan kekuatan politik atau pemerintahan yang kritis untuk dijatuhkan melalui mobilisasi kaum muda dalam ruang siber serta melalui media massa mainstream di AS, Eropa dan cabang-cabangnya di 'Dunia

Ketiga'. Para penstudi ini mengingatkan kita bahwa wacana global 'regime change', 'humanitarian crisis', 'islamophobia' dan 'racism' merupakan bagian dari cara menciptakan ketidakpercayaan publik untuk menjatuhkan pemerintahan atau mendiskreditkan kekuatan politik tertentu yang kritis terhadap neoliberalisme.

Kaum muda merupakan segemen masyarakat digital yang paling rentan terhadap rekayasa ideologis kaum globalist di berbagai kawasan. Arab Springs yang berujung pada krisis Timur Tengah hari ini adalah bagian integral dari agenda globalist untuk mendestabilisasi kawasan ini. Bocoran Wikileaks menunjukkan adanya konspirasi geopolitik tersebut dan memecah belah politik sekuler Timur Tengah ke konflik Sunni dan Shia. Salah satu contoh tragis adalah konflik Syria yang berkepanjangan dan telah membunuh lebih dari empat ratus ribu jiwa. Propaganda 'Assad Must Go' tidak hanya dilakukan dengan mempersenjatai kaum muda tetapi juga dengan mobilisasi kaum muda dalam media sosial tanpa mengedepan resolusi politik terhadap konflik internal tersebut. 'White Helmet' sebagai organisasi kemanusiaan dibentuk dan dibiayai Amerika Serikat dan Inggris untuk terus menciptakan wacana publik tentang kejahatan kemanusiaan pemerintahan Syria. Opini publik tentang perang di Syria terbentuk melalui 'framing' berita dan peliputan organisasi ini di media sosial dan koordinasi peliputan dengan stasiun televisi globalist seperti CNN, BBC dan Al Jazeera.

Situasi serupa melanda kaum muda Amerika Serikat dan Eropa. Di dua kawasan ini, kaum muda termakan rekayasa isu yang berbiak di atas multikulturalisme neoliberal. Kaum muda penghuni dunia siber menolak terpilihnya Trump sebagai Presiden karena dicap rasis dan melakukan pelecehan seksual. Kendati tak berhasil memenangkan Hillary Clinton, setidaknya kaum globalist dan neokonservatif di Washington dan New York berhasil membentuk opini dan memobilisasi kaum muda tersebut melalui media sosial dan dukungan media televisi dan surat kabar elitis seperti CNN, MNSBC,

New York Times and Washington Post. Fenomena ini kita temui di Inggris pasca Brexit di mana sebagian besar kaum muda menolak hasil referendum tersebut dengan mengedepankan argumen-argumen tak jauh beda dari mitos integrasi politik Eropa yang dikembangkan kaum birokrat-globalist di Brussel.

Diletakkan dalam perdebatan, informasi di atas memperlihatkan kerentanan warga digital terhadap pembajakan ideologis oleh kekuatan globalist yang mengendalikan instrumen-instrumen pembentukan opini global (*manufacturing consent*). Kerentanan tersebut disebabkan oleh tarik menarik yang permanen antara kontrol dan kebebasan dalam ruang siber (Timothy Luke, 2010). Pada saat bersamaan, tarik menarik tersebut dapat memicu pembelajaran lebih lanjut dan memperluas spektrum pemahaman mengenai kaitan antara isu dan aktor. Ragam informasi dan sumber informasi kian mematangkan warga digital dalam membuat keputusan politik dan membangun jaringan gerakan. Wawasan menjadi lebih terbuka, memiliki spektrum pemahaman terhadap masalah yang lebih luas dan tidak terkunci oleh agitasi kepentingan atau kelompok tertentu. Dalam 3 ilustrasi di atas, kaum muda melakukan resistensi terhadap kontrol dan dominasi wacana neoliberal dalam ruang siber dengan mengambil pilihan politik berbeda dan terbukti berhasil ikut memenangkan Donald Trump dan Brexit.

Kendati demikian, para penstudi tetap bersikap skeptis terhadap kontribusi dunia siber bagi penguatan dan pendalaman demokrasi. Konsep tentang 'ruang negosiasi' dalam dunia siber dianggap terus diperdebatkan mengingat dunia baru ini dikontrol sepenuhnya oleh kekuatan globalist-neoliberal, ultra-nasionalist, dan kekuatan fundamentalis agama baik di tingkat internasional maupun dalam negeri. Philip Howard (2010), misalnya, melalui sejumlah studi di Timur Tengah, menunjukkan bahwa kontrol rejim berkuasa terhadap dunia siber masih sangat kuat. Kendati pun artikulasi politik dalam dunia siber sangat tinggi tidak serentak berpengaruh terhadap kapasitas

mobilisasi politik di dunia maya. Struktur politik suatu negara sangat menentukan efektivitas demokrasi digital terhadap perubahan politik dalam masyarakat. Selain konektivitas urban-rural, kelas sosial, dan afiliasi multikultural, posisi sebuah negara dalam percaturan geopolitik global ikut berpengaruh terhadap digital demokrasi dan dampaknya bagi restrukturisasi politik dalam negeri (Athina, 2009). Dengan kata lain, dunia siber bukanlah dunia alternatif bagi demokrasi melainkan refleksi dari kondisi sosial-politik suatu negara.

Pesan penting dari perdebatan terkait demokrasi digital adalah bahwa internet, khususnya media sosial, merupakan arena kontestasi yang ditandai oleh tarik menarik antara kontrol dan kebebasan. Aktivasi politik dalam dunia siber mencerminkan kemauan berpolitik yang tinggi di kalangan warga negara sekaligus merefleksikan kebuntuan perwakilan politik yang oligarkis dan birokratis di dunia nyata. Menguatnya 'people power' dalam dunia digital memberi informasi mengenai dominasi 'elite power' dalam struktur politik suatu masyarakat. Kontrol terhadap dunia digital bisa memperkuat demokrasi tapi dapat pula mengekang kebebasan berpendapat dan menggiring opini publik ke persoalan yang banal dan tak berkaitan dengan urusan publik. Ketegangan ini merupakan karakteristik masyarakat digital dan dari situ kita bisa melacak manfaatnya bagi konsolidasi demokrasi.

Demokrasi Digital & Masalah Demokrasi Indonesia

Demokrasi digital di Indonesia mengalami dilema yang sama dengan dilema yang dialami masyarakat digital di negara-negara lain. Tantangan bersama adalah bagaimana menjadikan ruang digital sebagai bagian integral dari konsolidasi demokrasi di luar domain tersebut. Tantangan lain adalah bagaimana memastikan agar sikap and perilaku anti-politik yang disebarluaskan dalam dunia siber direspon dengan sikap kritis oleh

warga digital dan diterapkan sebagai cara berpolitik dalam dunia nyata. Terlepas dari diskusi mengenai kesenjangan akses ke dunia digital, masyarakat dan relasi sosial di Indonesia kian terdigitalisasi dan ruang siber dirasa kian penting sebagai laboratorium demokrasi ke depan.

Diletakkan dalam dinamika politik nasional sejak reformasi, kita dapat merumuskan sejumlah masalah dan tantangan strategis. Adapun sejumlah masalah krusial. Pertama, kecenderungan yang meningkat di kalangan warga masyarakat khususnya kaum muda untuk berpolitik melalui dunia maya dan bersamaan dengan itu rendahnya aktivasi politik atau pelibatan diri dan kelompok dalam politik praktis melalui gerakan sosial-politik, kelompok kepentingan dan partai politik. Kedua, meningkatnya oportunistik politik di kalangan birokrat dan elit politik yang hanya melakukan belanja masalah publik melalui jurnalisme media sosial dan pemberitaan media massa. Ketiga, dampak dari dua masalah terdahulu, politik kita baik dalam ruang publik maupun dalam ruang digital terus menormalisasi konflik antar elit politik dan mendorong polarisasi sosial ke dalam kantong-kantong identitas.

Masalah pertama, depolitisasi kaum muda dalam politik praktis, bukanlah ikhtiar kaum muda sendiri. Ruang digital merupakan arena tak bertuan. Siapapun dapat berjejaring dan berpendapat tanpa dikendalikan oleh kekuatan politik tertentu. Nuansa aktualisasi diri dan sensasi otonomi diri merupakan barang mahal yang tidak tersedia dengan mudah dalam kehidupan sehari-hari. Barang mahal ini tersedia secara gratis dalam dunia siber melalui You Tube, Twitter, blog, dan website. Kaum muda dapat menunjukkan keragaman identitas, orientasi etis-moral, dan cita rasa estetis yang digarapnya secara mandiri baik mengacu pada tradisi budaya masyarakatnya maupun diracik dengan nilai dan pola hidup baru yang dipelajarinya dalam ruang siber tersebut.

Daya tarik dunia baru ini merupakan respon terhadap defisit politik pengakuan dan advokasi terhadap keagenan publik

kaum muda dalam politik praktis. Dibesarkan dalam budaya politik warisan Orde baru, kaum muda ditindas pedagogi moral yang abstrak, hitam dan putih, dan sarat dengan prasangka agama, ras dan etnis. Kurikulum pendidikan dianggap tidak membebaskan, didasarkan pada asumsi tersirat bahwa kaum muda adalah sumber masalah, makhluk transgresi, yang patut dikontrol dan dikendalikan akhlak dan perilakunya. Demikian juga halnya mereka selalu bertemu dengan ajakan menghayati nilai-nilai luhur ketimuran dan cinta tanah air persis dalam situasi orang tua, para guru-dosen, pejabat dan politisi merampas kesempatan mereka menjadi cerdas, multikultural dan global. Paradoks inilah yang mendorong kaum muda melakukan serangan balik berupa pelabelan, adekdot, dan sentilan kritis terhadap tokoh agama, pejabat, politisi dan intelektual publik dalam ruang siber.

Situasi tersebut tentu ada baiknya tetapi rupanya belum mendorong perlawanan dan gerakan kaum muda dalam politik praktis. Pedagogi politik kita belum diperdebatkan untuk mendorong aktualisasi diri kaum muda. Kita menyaksikan antusiasme kaum muda terhadap isu publik dalam dunia siber sementara partai politik oligarkis dan partai keluarga dari pusat sampai daerah. Demikian halnya bertambah banyak kaum muda cerdas dan berani tak sempat melayani masyarakat karena birokrasi pemerintahan penuh sesak dengan keluarga dan kerabat pejabat serta pegawai yang suka menjilat atasan. Sebagian dari mereka memilih bekerja mandiri, bekerja di perusahaan, atau menjadi aktivis NGO. Hal serupa terlihat dari kritik kaum muda terhadap organisasi keagamaan yang kian hari kian sempit dan semata-mata jalur menuju pentas politik oligarki di pusat maupun di daerah. Singkat kata, depolitisasi tersebut berarti kaum muda tidak disediakan kapabilitas dan arena dalam politik praktis.

Masalah kedua, pembajakan dunia siber oleh elit oportunis, sudah menjadi perilaku politik yang lumrah dalam beberapa tahun terakhir. Ruang siber berlaku sebagai teater akrobatik bagi para politisi dan pejabat. Alih-

alih bekerja keras mencegah masalah, isu-isu publik yang dikemukakan pegiat dunia siber direspon dan dibajak untuk menunjukkan kinerjanya yang responsif terhadap tuntutan publik. Terlepas dari mitos pelayanan publik secara digital, fenomena ini lebih banyak bercerita tentang sikap dan perilaku oportunistis birokrasi, parlemen dan partai politik kita. Oportunisme ini juga diraskan penting untuk menjatuhkan rejim yang berkuasa atau sebaliknya menistakan lawan-lawan politiknya.

Normalisasi terhadap sikap dan perilaku oportunistis ini tidak datang dari ruang hampa. Oportunisme dibesarkan dalam dua kondisi yang tampak bertolak belakang tetapi saling meneguhkan. Pertama, wacana *digital governance* termasuk pelayanan terpadu mendorong pejabat dan politisi bekerja dengan cara baru yang dianggap lebih efisien dan efektif bagi pelayanan publik. Digitalisasi pelayanan publik pun berlangsung intensif dari pusat sampai daerah. Selain memboroskan anggaran negara dan sarang korupsi, program ini bagi birokrasi dan parlemen dapat menutupi keterbatasan kompetensi dan keahlian karena digantikan oleh teknorasi baru berkat keajaiban 'know-how' teknologi komputer dan internet. Tentu sebagaimana kita ketahui, tata kelola secara digital rupanya tidak memperbaiki kinerja birokrasi dan parlemen tetapi lebih berlaku sebagai teknologi anti-politik yang menyembunyikan krisis kebijakan dan krisis kreativitas di kalangan pemangku kebijakan.

Kondisi kedua yang melahirkan oportunisme ini adalah krisis representasi politik. Dalam satu dekade lebih ini sejak diberlakukannya Pilkada dan Pemilu, pejabat dan politisi menemukan rakyat dalam kotak suara. Dengan sistem dan cara berpolitik asalkan dapat suara terbanyak, pejabat dan politisi bahkan tak mengetahui secara pasti basis elektabilitasnya selain basis suku, agama dan wilayah. Hal ini disebabkan juga oleh krisis ideologi dan program kerja dalam partai politik. Studi politik muthakhir telah menegaskan krisis representasi politik baik di pusat maupun

di daerah. Kasus korupsi yang melanda sebagian besar bupati, gubernur dan anggota DPRD di seluruh Indonesia kiranya menjadi indikator terbaik tentang krisis kerja politik untuk rakyat selama lima tahun berkuasa. Karena kasus korupsi lebih dari sekadar masalah moral dan budaya korupsi tetapi bercerita tentang tidak sinambungnya pesta demokrasi dan pelayanan publik selama lima tahun.

Dengan dua kondisi tersebut kita setidaknya dapat lebih mudah memahami mengapa demokrasi digital disambut pemerintah, parlemen dan partai politik. Rakyat rupanya ditemukan kembali dalam media sosial dan media massa. Pejabat dan politisi kian terobsesi sekaligus sensitif dengan isu publik yang berseliweran melalui media sosial dan media massa. Keaktifan pejabat dan politisi menguntit dan berkeliaran dalam dunia siber masih terbatas pada menjaga reputasi diri dan lembaga, sekaligus ikut mengeskalasi isu yang memicu skandal dan aib lawan politiknya. Hal tersebut tercermin pula pada bagaimana politisi memanfaatkan dunia siber untuk kampanye diri dan partai politiknya. Demokrasi digital lebih banyak mendatangkan manfaat bagi petualang politik ketimbang arena belajar demokrasi untuk mengubah dan sikap oportunisme politik.

Masalah ketiga, normalisasi konflik elit dan eskalasi politik identitas, belakangan ini merupakan gejala dunia siber yang mengkwatirkan bagi demokrasi Indonesia. Gejala ini tidak terlepas dari dua masalah yang disebutkan terdahulu. Alih-alih menguncang struktur politik yang oligarkis, demokrasi digital ikut memperkuat wacana politik elit dengan terus menerus membicarakan skandal aktor politik atau sengitnya konspirasi merebut dan menjatuhkan kekuasaan. Persoalan korupsi, konflik internal partai, dan pertarungan pilkadal/pemilu senantiasa dibahas dalam koridor terbatas pada sensasi amoral, popularitas dan pencitraan elit politik. Banalitas politik diperbincangkan sedemikian rupa sampai pada titik elit merasa perlu untuk terus melakukan

pencitraan baik di media sosial maupun media massa. Kontestasi pencitraan berlangsung tanpa aturan dan tim sukses termasuk simpatisan menjadikan dunia siber sebagai medan perang untuk agitasi, provokasi dan mobilisasi.

Pada saat bersamaan, kita menyaksikan eskalasi politik identitas dalam dunia siber. Alih-alih menjadi ajang belajar membangun Indonesia baru, demokrasi digital terus saja mereproduksi manusia Orde Baru yang menjadikan suku, agama dan ras sebagai penanda politik. Terlepas dari adanya regulasi dunia siber yang memberi koridor bagi pendapat dan tutur kata, politik identitas tidak lagi sekadar meminta pengakuan tetapi bergerak lebih jauh yakni mengajukan klaim legitimasi sebagai manusia Indonesia kelas satu (*first class citizens*) dengan alasan mayoritas dari aspek agama, suku dan ras. Hal ini berlangsung dalam dunia siber terkait politik nasional maupun politik di daerah dalam kerangka otonomi daerah. Selain warisan Orde Baru, mentalitas politik ini juga mencerminkan arus balik mentalitas poskolonial, dari tipologi kewarganegaraan kolonial (Penjajah, kulit berwarna dan pribumi) ke tipologi pribumi menjadi nomor satu berdasarkan agama, suku dan ras. 'Pribumi' tampil sebagai penanda identitas yang tak stabil, dipakai sesuai keperluan politik, dan siapa pun menjadi rentan untuk disingkirkan dari ruang publik dan pemerintahan di pusat dan di daerah.

Politik identitas yang meningkat dalam dunia siber rupanya berkorelasi dengan polarisasi politik dalam politik praktis. Eskalasi politik identitas dalam dunia siber mendorong atau sebaliknya terdorong oleh polarisasi kelompok identitas dalam ruang publik dan perebutan kekuasaan. Logik dominasi dalam politik, atau penaklukan dan penundukan terhadap yang lain, tercermin dalam antusiasme merayakan perbedaan identitas dalam dunia siber. Dari waktu ke waktu, Indonesia baru dan manusia baru, yakni warga negara reformasi, bukan lagi topik yang diperbincangkan dalam dua dunia ini. Politik tampak hiperaktif sembari menyembunyikan ketidakmampuan membangun aliansi lintas-identitas. Nalar

politik berputar-putar di sekitar kelamin untuk kebebasan orientasi seksual, warna kulit dan bahasa untuk ras dan suku, dan tafsir kitab suci untuk supremasi teologi politik.

Salah satu ilustrasi terkini untuk melukiskan hubungan demokrasi digital dan politik praktis tersebut dapat dilihat melalui kasus Ahok. Kasus ini lebih dari sekadar perkara penistaan agama. Kasus ini menjadi menarik karena membantu kita memahami jalan buntu atau *deadlock* politik dominasi yang intensif berlangsung dalam politik praktis dan dunia siber. Baik kelompok 'liberal-progresif' yang pro-Ahok dan kelompok 'fundamentalist' anti-Ahok sama-sama berbiak di dalam politik dominasi. Kedua kekuatan ini sama-sama menggunakan ruang digital dan media massa untuk memenangkan agenda masing-masing. Di balik kedua kelompok ini, berlangsung konspirasi elit nasional yang saling menjegal. Ahok menjadi sandera politik dominasi, menyingkapkan absennya kreativitas politik hegemoni di Indonesia. Kasus ini pun menunjukkan rentannya struktur dan konsolidasi elit nasional sekaligus memberi kesan sangat berkuasanya Ahok sebagai 'antek asing dan aseng'. Ragam isu seputar kasus ini, dalam dunia siber dan dunia nyata, memberi kesaksian tersendiri, bahwa konflik elit dan politik identitas bukanlah dua wacana yang terpisah tetapi dua artikulasi anti-demokrasi yang berbiak dalam logik politik dominasi pasca Orde Baru.

Selain sebagai proksi politik, kasus Ahok dan kasus-kasus berskala nasional lainnya memiliki pola kuda troya, yaitu, satu kasus mengandung banyak pertarungan kepentingan politik kekuasaan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari berlakunya epistemologi politik esensialisme, merayakan perbedaan sembari menanti saatnya meniadakan lawan politik. Dalam situasi tersebut, ruang siber memainkan peran krusial untuk memfasilitasi baik konsolidasi elit anti-demokrasi maupun polarisasi komunitas warga digital ke dalam sentimen publik melalui identifikasi agama, suku dan ras.

Indonesia sebagai imaji kreatif sepanjang sejarah, sebagai hasil kerja politik persatuan di atas perbedaan, digantikan Indonesia yang difantaskan oligarki dan komunitas primordial.

Patut dicatat dua dampak fundamental yang dihasilkan dari tiga masalah yang telah dikemukakan di atas. Dampak pertama adalah absennya tata kelola politik (*political governance*) yang berguna untuk mencegah, mengatasi dan mengelola konflik politik di luar kerangka prosedur-administrasi dan penegakan hukum. Tata kelola politik diperlukan untuk merespon isu-isu krusial yang berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam hal ini, diperlukan tata kelola terhadap politik identitas yang dapat memperkuat kesatuan dalam keberagaman identitas. Dampak kedua adalah hukum kian dinormalisasi sebagai panglima. Penegakan hukum tentu penting untuk keadilan dan kesetaraan tetapi menjadi problematis kalau selalu menjadi pemadam kebakaran untuk masalah-masalah atau kasus yang memiliki dimensi politik. Absennya tata kelola politik membuat penegakan hukum terkesan sangat penting tetapi tak memiliki kapasitas untuk mengatasi akar-akar politis dari masalah atau isu yang terus berulang khususnya terkait konflik saling sandera antara kekuatan politik melalui kasus korupsi dan konflik sosial terkait keberagaman antara suku, agama dan ras.

Tantangan dan Peluang Strategis

Keseluruhan uraian di atas hendak memperlihatkan sentralnya posisi, peran dan tanggung jawab demokrasi digital bagi Indonesia hari ini. Secara konseptual, ruang siber merupakan arena yang strategis untuk belajar dan merealisasikan prinsip-prinsip demokrasi terutama menghargai dan mengenali perbedaan, membangun aliansi lintas-identitas dan ruang kritik terhadap oligarki politik. Pengalaman demokrasi digital dari berbagai kawasan di dunia dan Indonesia memberi sinyal yang kuat bahwa ruang siber ini berlaku sebagai

ajang pertarungan kepentingan globalist neoliberal, oligarki nasional dan ideologi fundamentalis baik dari kubu liberal-progresif maupun kubu fundamentalisme identitas budaya seperti agama, suku dan ras.

Bertolak dari pengalaman Indonesia sendiri, kita mencatat dua kecenderungan yang terus bertarung. Pertama, kecenderungan ruang siber sebagai arena resistensi dan aktualisasi diri warga digital khususnya kaum muda. Pemanfaatan ruang siber ini sebagai respon terhadap ketersediaan pelbagai unsur pembentuk kapabilitas dan keahlian untuk membentuk otonomi diri, berjejaring dan pergerakan. Juga sebagai respon terhadap krisis representasi politik dalam dunia nyata yang membatalkan peluang kaum muda cerdas dan kreatif masuk dalam pemerintahan dan partai politik. Kedua, kecenderungan ruang siber menjadi arena depolitisasi. Dalam arti ruang siber berlaku sebagai alternatif bagi demokrasi formal dan membatalkan partisipasi politik aktif warga digital sebagai warga negara dalam politik praktis. Hal ini diperparah oleh oligarki politik yang membajak ruang siber dan menguatnya politik identitas dalam ruang tersebut.

Dua kecenderungan tersebut patut dijadikan awalan untuk mengembangkan kerangka pikir dan kerangka kebijakan untuk demokrasi digital. Sejumlah regulasi berkaitan dengan ruang siber tentu dapat mengelola sejumlah masalah teknis, etis-moral dan keamanan. Kendati demikian, agar ruang digital memainkan peran konsolidasi demokrasi baik dalam ruang tersebut maupun dalam politik praktis diperlukan pembaharuan diskusi dan debat publik mengenai prinsip-prinsip dasar dan arah kebijakan ruang digital. Bertolak dari diskusi multi-stakeholder dan debat publik tersebut akan mengemuka formulasi dan intervensi kebijakan yang bersifat strategis dan visioner untuk pengelolaan ruang siber bagi konsolidasi demokrasi.

Arti penting intervensi kebijakan strategis akan terbaca jika diletakkan dalam diskusi kita dalam tulisan ini. Proses digitalisasi akan terus berlangsung dalam

berbagai ranah dan tentu membawa banyak manfaat positif bagi aktivitas ekonomi, interaksi budaya dan membuka horison baru sebagai warga dunia yang kian terintegrasi. Manfaat positif tersebut di masa depan bisa menjadi tak berguna jika terjadi eskalasi konflik kekerasan antar kelompok identitas dalam pertarungan politik oligarki yang disebabkan pengabaian negara dan masyarakat sipil terhadap salah satu front terpenting pembentukan opini publik dan mobilisasi kelompok, yakni, ruang siber. Pengalaman sejumlah negara di Timur Tengah dan Eropa Timur hari ini patut dijadikan pelajaran berharga. Kegagalan membaca gejala polarisasi dan perilaku oligarki yang oportunistis dalam ruang siber dan ruang publik harus dibayar mahal dengan konflik berdarah antar anak bangsa dan ancaman disintegrasi nasional.

Dibaca dalam konteks geopolitik dunia hari ini, urgensi adanya intervensi kebijakan strategis dimaksudkan untuk mengantisipasi penetrasi kekuatan globalist neoliberal ke dalam negeri secara lebih intensif di masa datang. Sejauh ini Indonesia tidak persis berada dalam episentrum geopolitik global akan tetapi untuk beberapa tahun ke depan akan terjadi pergeseran konstelasi geopolitik ke arah Asia Selatan dan Asia Tenggara. Untuk melakukan destabilisasi, kekuatan globalist neoliberal tidak saja beroperasi dengan kekuatan militer tetapi juga melalui

produksi dan diseminasi pengetahuan atau wacana tertentu. Kombinasi dua teknologi kuasa ini, hard power dan soft power, terbukti sangat ampuh mengguncang fundasi sosial dan budaya suatu negara-bangsa.

Lebih dari itu, dalam satu dekade terakhir produksi dan diseminasi wacana melalui ruang siber terbukti efektif sebagai teknologi *'define dan rule'*, yakni, menamai, mengklasifikasi dan melabelkan anak bangsa ke dalam oposisi biner seperti mayoritas/minoritas atau moslem moderat/moslem radikal. Tujuan ideologis dari propaganda ini adalah menjauhkan masyarakat dari sikap kritis terhadap eksploitasi ekonomi dan ekologi oleh korporasi global, menghilangkan pengetahuan kritis terhadap rekam jejak intervensi unilateral-multilateral terhadap negara 'Dunia Ketiga', dan menjatuhkan pemerintahan yang tak patuh pada aturan dan imperatif moral yang dinarasikan atas nama 'masyarakat internasional'. Karena itu, komunitas kebijakan dan intelektual publik perlu segera mendeteksi dan menganalisis kondisi terkini dari ruang siber dan menghubungkan dengan kondisi ruang publik demi menghasilkan arah dan prinsip-prinsip baru formulasi kebijakan ruang siber berbasis data dan antisipasi resiko serta peluang bagi konsolidasi demokrasi pada dua front tersebut.

Referensi

- Brown, Wendy. *Regulating Aversion: Tolerance in the Age of Identity and Empire*. Princeton: Princeton University Press, 2006
- Edward, David. *The Guardian of Power: Myth of The Liberal Media*. London: Pluto Press, 2006
- Fuchs, Christian. *Critique, Social Media and the Information Society*. New York: London, 2014
- Graham, Gordon. *Internet: A Philosophical Inquiry*. London: Routledge, 1999
- Howard, Philip. *Digital Origins of Totalitarianism and Democracy: Information Technology and Political Islam*. New York: Oxford University Press, 2010
- Negri, Antonio & Michael Hardt. *Multitude: War and Democracy in the Age of Empire*. New York: Penguin Press, 2004
- *Empire*. Cambridge: Harvard University Press, 2000
- Karatzogianni, Athina. *Cyber Conflict and Global Politics*. New York: Routledge, 2009
- Luke Timothy. "Digital Citizenship", dalam Philip Kalanzis-Cope (ed.), *Emerging Digital Space in Contemporary Society*. New York: Palgrave MacMillan, 2010.
- Mouffe, Chantal. "The Importance of Enganging the State", dalam Jonathan Pugh (ed.), *What is Radical Politics Today?*. New York: Palgrave MacMillan, 2009

LAPORAN
STUDI
LAPANGAN

PERGESERAN MASYARAKAT OFFLINE KE ONLINE DALAM DINAMIKA POLITIK DAERAH

Oleh **Tim Redaksi**

Sudah menjadi keniscayaan sekarang ini bahwa telah terjadi pergeseran signifikan dari masyarakat offline ke masyarakat online yang merambah ke segala aspek kehidupan, tidak terkecuali aspek kehidupan politik. Praktik demokrasi politik tidak lagi hanya berlangsung di ruang aktual namun juga telah berlangsung di ruang *cyber*. Ini artinya, kontestasi politik, sebagai salah satu esensi demokrasi politik (di samping partisipasi, kebebasan dan deliberasi) tidak hanya dilakukan secara *offline* dan *face to face*, namun juga dilaksanakan secara virtual dan *online*. Dalam kontestasi politik secara *online* tersebut umumnya berlangsung pada dan melalui bahasa, baik bahasa verbal seperti kata dan rangkaian kata maupun bahasa visual atau non-verbal seperti foto dan gambar. Di sini bahasa dijadikan ruang sekaligus apparatus bagi setiap pertarungan atau kontestasi politik.

Praktik demokrasi pada ruang cyber tersebut tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga hingga ke daerah-daerah, seiring dengan makin meluasnya penetrasi penggunaan internet hingga ke desa. Bahkan dengan adanya alat komunikasi canggih seperti gawai, orang semakin memiliki akses ke ruang cyber tanpa harus bergantung pada laptop ataupun komputer. Melalui aplikasi seperti facebook, twiter, Whatts-up, dan aplikasi lain orang di mana pun bisa ikut berpartisipasi dalam proses partisipasi politik. Orang yang memiliki gawai dengan mudah akan mengakses informasi dari berbagai media massa online, dan sebaliknya juga bisa memberikan komentar atau mengartikulasikan kepentingannya melalui media sosial. Ketika terjadi Pilkada misalnya, di daerah-daerah telah banyak memanfaatkan internet untuk masuk dalam pergulatan cyber demokrasi, entah sekadar memberi komentar maupun mengartikulasikan kepentingan politiknya.

Oleh karena itu, menarik kiranya untuk melihat bagaimana pergeseran ke ruang cyber atau masyarakat online tersebut dalam mengartikulasikan kepentingan politiknya pada momen politik seperti Pilkada. Apakah masyarakat telah memanfaatkan ruang cyber ini secara konstruktif atau justru menjadi gelanggang untuk cacik, dan dukungan-mendukung, secara bebas sehingga penuh ujaran kebencian. Bagaimana perilaku netizen pada momen Pilkada selama ini ketika memanfaatkan internet, apakah sembarangan tanpa mempertimbangkan etika publik, atau semakin mendewasakan publik dalam berdemokrasi. Mengingat karakter utama netizen adalah anonim, menjadi penyebab makin maraknya ujaran kebencian melalui media digital.

Di samping itu, apakah selama ini ketika aktivitas demokrasi di ruang cyber ini semakin marak, netizen menggunakannya sebagai fungsi kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah yang good governance, atau justru kalangan netizen di daerah sekadar ajang cacik-maki dan keberisikan politik. adakah komunitas-komunitas demokrasi cyber yang muncul di daerah yang menjadi bagian dari proses

pendidikan politik kewargaan? Apakah sudah muncul komunitas yang mendorong dan mengawal pemerintahan dalam penerapan prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan paritipatif.

Studi lapangan ini akan dilakukan di sejumlah kota, yaitu Pangkalpinang, Serang, Madiun, Yogyakarta, Denpasar, dan Banjarmasin. Pertimbangan pemilihan lokasi tersebut karena di sana sedang persiapan penyelenggaraan Pilkada serempak 2017, di samping keunikan politik dan budaya di masing-masing daerah. Metode yang digunakan adalah studi lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Pangkalpinang Mempermudah Akses Informasi

Kota Pangkalpinang merupakan ibukota Provinsi Bangka Belitung terletak di sebelah timur Sumatera Selatan, menghadap ke laut Cina Selatan yang memiliki lalu lintas laut terpadat di dunia. Namun demikian kota ini merupakan kota kecil, tidak seramai Batam atau Tanjungpinang, karena memang tidak terlewati kapal-kapal perdagangan menuju ke Asia Timur yang menjadi pusat perdagangan dunia. Hanya saja kota ini telah lama menjadi salah satu tujuan utama para pencari kerja yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Sumber daya alam yang cukup melimpah, seperti timah misalnya, adalah salah satu andalan daerah ini yang menjadi incaran para investor. Oleh karena itu warga kota ini begitu plural terdiri dari berbagai etnis yang ada di Indonesia.

Sebagai kota yangarganya cukup beragam, tidak heran jika daerah ini memiliki indeks kompetisi politik cukup tinggi. Menjelang Pilkada serentak 2017 mendatang, sudah terdapat tanda-tanda meningkatnya suhu politik di kota Pangkalpinang. Ada empat pasangan calon yang secara resmi sudah terdaftar di KPUD untuk maju pada Pilkada Wali dan Wakil Walikota yang tergabung dalam Pilkada serentak 2017. Masing-masing pasangan

telah melakukan kampanye baik melalui media komunikasi lama seperti baleho, poster, spanduk, hingga kampanye melalui temu kader secara tatap muka pada basis massa pemilih. Yang menarik adalah bahwa kampanye Pilkada kali ini telah cukup intensi menggunakan media baru, yaitu melalui jaringan internet.

Sebagaimana dituturkan oleh Dedi Hidayat, Ketua PAC Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, bahwa pada masa kampanye Pilkada serentak 2017 sekarang ini hampir semua pasangan menggunakan media berbasis internet. Media online yang digunakan antara lain facebook, twiter, WA, dan instagram. Terutama facebook dalam lima tahun terakhir ini paling banyak digunakan warga masyarakat dalam berkomunikasi, termasuk komunikasi politik. "Di Pangkalpinang ini media sosial yang paling banyak digunakan adalah facebook, hampir mencapai 70 persen. Meskipun WA paling praktis dan murah, tetapi di sini penggunaannya terbatas, seperti halnya twiter dan instagram", ungkapnya.

Lebih lanjut Dedi yang juga Tim Cyber Campaign PDIP, menjelaskan bahwa melalui facebook sering terjadi saling kritik antarpemilihan pasangan calon Wali dan Wakil Walikota selama menjelang Pilkada serentak kali ini. Tidak jarang di antara para pendukung masing-masing pasangan itu melakukan adu argumen, adu pendapat, dan bahkan berdebat tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing yang dijagokannya. "Melalui medsos, terutama di facebook, di antara para pendukung kontestan Pilkada saling serang, dan bahkan menjurus kampanye negatif. Akan tetapi jika ada kecenderungan ke arah ujaran kebencian, maka saya sebagai tim cyber PDIP akan selalu mengingatkan dan menetralisirnya, terutama yang dari kalangan kader PDIP", katanya.

Tentang adanya saling serang atau perdebatan antarpemilihan di medsos tersebut juga diakui oleh Purnama, karyawan swasta, yang sebagai anak muda mengaku intens menggunakan smartpone setiap harinya. Adu argumen dalam medsos

pada masa kampanye Pilkada serentak seperti sekarang ini di Pangkalpinang sudah biasa. Namun menurut Purnama belum sampai menjurus ke ujaran kebencian, karena sebagian besar pengguna medsos takut terkena pasal-pasal dalam UU ITE. Sementara itu Dedi menambahkan ujaran kebencian dalam masa kampanye Pilkada serentak sekarang ini sulit terjadi di Pangkalpinang, karena masing-masing telah mampu saling menjaga dan menahan diri. "Terlebih lagi sekarang ini Dewan Pengas Pilkada kan memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasi pasangan calon yang melanggar undang-undang, maka mereka akan takut", ujarnya.

Sedangkan Erik Pramusinggih Nastoto,menjelaskan adanya faktor kultural yang menyebabkan masyarakat Bangka, khususnya kota Pangkalpinang mampu menjaga sopan santun politik dalam media online. Meskipun suhu politik menjelang Pilkada serentak 2017 terasa naik, akan tetapi berkat faktor sosio-kultural masyarakat kota Pangkalpinang mampu menjaga suasana damai. "Masyarakat kota Pangkalpinang ini memang semakin plural, karena banyak pendatang ke sini. Karena itu semua menyadari jika tidak saling menjaga akan berpotensi konflik, makanya para elite mampu saling menjaga. Mereka ini bertanggungjawab menjadi panutan warga masyarakat, sehingga harus memberi contoh yang baik untuk membangun suasana damai", ungkapnya.

Erik lebih lanjut menjelaskan bahwa faktor kultur Melayu sangat kental di sini, sehingga tetap menggunakan nilai-nilai lokal dan kearifan lokal untuk menjaga harmoni hubungan antarwarga. Oleh karena itu dalam masa kampanye Pilkada selalu dianjurkan untuk menyelenggarakan kampanye yang konstruktif, tidak saling menggunakan ujaran kebencian. "Dalam budaya Melayu mengenal pepatah mulutmu adalah harimaumu yang intinya agar berbicara santun. Lagi pula dalam kultur melayu ada larangan untuk marah atau harus mampu menahan diri dalam situasi apa pun, termasuk dalam konflik politik. Kalau toh harus marah harus diungkapkan

dengan pantun, sehingga terasa halus dan santun”, kata Erik.

Lebih dari itu Pemkot bekerjasama dengan segenap jajaran aparat pemerintah seperti kepolisian, TNI, dan juga KPUD terus mensosialisasikan kampanye damai. Pimpinan daerah terus mengadakan pendekatan terhadap segenap tokoh masyarakat agar terus menjadi panutan dan sekaligus secara proaktif melakukan kampanye damai. “Melalui berbagai media, dan juga melalui website, Pemkot terus melakukan pendekatan secara proaktif terhadap segenap tokoh masyarakat dan elite politik untuk saling menjaga, dan tetap menggunakan etika politik yang santun selama masa kampanye Pilkada” ujarnya.

Sementara itu, Popi Windasari, Kasubag Meidia Informasi Humas Pemkot Bangka, menjelaskan bahwa dalam lima tahun terakhir kota Pangkalpinang perkembangan masyarakat semakin ke arah online society. Perkembangan baru ini tidak terlepas dari inisiasi Pemkot yang terus memberikan ijin pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang terus meluas. Para provider dan industri telekomunikasi semakin memperluas jaringan hingga ke pelosok pedesaan. “Pemkot sendiri telah memiliki web, yaitu pangkalpinang.go.id sebagai media komunikasi politik dan sarana bagi pelaksanaan pemerintahan yang berprinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik” ujarnya.

Jadi dengan adanya pergeseran ke masyarakat online, warga Pangkalpinang terus didorong semakin memanfaatkan media baru dalam mengakses informasi. Penggunaan medsos terus mengalami peningkatan sebagai sarana komunikasi baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial-kebudayaan. “Pemkot menyediakan layanan informasi dengan wifi di alun-alun agar masyarakat semakin mudah mengakses informasi berbasis internet. Demikian pula dalam dinamika politik demi suksesnya pembangunan, Pemkot membuka nomor pengaduan melalui sms, jika di lapangan terdapat pelayanan birokrasi yang kurang memuaskan. Ini bagian dari pendidikan

politik warga yang konstruktif”, ujarnya.

Yogyakarta

Yogyakarta dikenal sebagai kota budaya dan sekaligus juga kota pendidikan, karena itu tidak heran jika kota ini memiliki tingkat literasi lebih tinggi dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia. Itu juga terjadi dalam kaitannya dengan kehadiran media baru, kota ini jauh lebih cepat terekspose oleh jaringan internet. Bahkan sejak dekade 1990-an, kota Yogyakarta telah mengenal apa itu internet ketika kota-kota lain masih sangat asing dengan moda komunikasi baru itu. Oleh karena itu Yogyakarta dalam sepuluh tahun terakhir ini menjadi salah satu daerah yang tercepat mengalami pergeseran dari masyarakat offline menuju ke masyarakat online.

Sebagai indikator tampak pada semakin luas dan intensifnya jaringan infrastruktur telekomunikasi yang merambah hampir ke seluruh ruang publik. Di café-café sarana wifi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari bisnis kuliner; di hampir semua kampus telah terkoneksi dengan jaringan internet, dan hampir dapat dipastikan pada keluarga kelas menengahnya telah memiliki fasilitas akses internet. Mobilephone telah menjadi bagian penting dari piranti yang harus dimiliki oleh setiap warga, sehingga komunikasi merupakan kebutuhan primer.

Dalam kaitannya dengan dinamika politik lokal, kehadiran media baru juga telah menjadi salah satu faktor penting mengubah perilaku politik warga. Melalui media sosial dan layanan informasi-komunikasi berbasis web telah terkoneksi secara luas dalam mendorong masyarakat kewargaan Yogyakarta. Menjelang Pilkada serentak 2017, kota ini juga mengalami peningkatan eskalasi politik yang kompetitif. Pemilihan Wali dan Wakil Walikota Yogyakarta dan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kulonprogo menjelang Pilkada serentak kali juga tidak luput dari dinamika politik daerah yang mulai terambah oleh kultur masyarakat online.

Sebagaimana dikatakan oleh Saefuddin

Zuhri, aktivis dan peneliti PR2Media Yogyakarta, bahwa perambahan media online pada masyarakat Yogyakarta terus mengalami perluasan dan intensitas tinggi. Ini juga berimplikasi terhadap dinamika politik menjelang Pilkada serentak 2017. Melalui media sosial mulai banyak digunakan untuk kampanye, tetapi sayangnya gejala kampanye negatif atau bahkan kampanye hitam juga semakin terasa. "Sebenarnya dengan adanya media baru, atau komunikasi berbasis web ini bagus untuk keperluan membangun politik demokratis yang sekaligus mencerdaskan warga. Akan tetapi seperti yang bisa kita ketahui bersama, pada saat yang sama ujaran kebencian juga mulai menggejala, menyerang dan menonjolkan sisi negatif dari masing-masing pasangan calon yang berkompetisi", ujarnya.

Lebih lanjut Saefuddin menjelaskan bahwa kehadiran media baru sebenarnya akan sangat bagus jika diikuti oleh transformasi kulturalnya. Artinya, jika berkaitan dengan kehidupan politik misalnya, media ini justru bagus untuk menjadi sarana bagi penerapan sistem pemerintahan yang good governance. Akses dibuka lebar bagi warga untuk memberikan gagasan untuk perencanaan pembangunan sebagai penerapan prinsip partisipatif. Sementara itu prinsip transparansi juga dengan mudah dilakukan jika mau memanfaatkan media sosial ataupun internet. "Akan tetapi sayangnya, justru warga masyarakat masih belum menyadari pentingnya demokrasi, sehingga yang terjadi hanya untuk ngrumpi dan saling hujat menghujat. Jadi kultur ngrumpi di masyarakat offline seperti hanya dipindah saja ke media online. Ini semakin bertambah marak, karena karakter media online bersifat anonim, mudah menyembunyikan identitasnya", jelasnya.

Pendapat senada juga datang dari Cornus Dwi, Sekretaris DPD Partai Nasdem Provinsi Yogyakarta, bahwa kehadiran media baru masih sering digunakan untuk kampanye negatif yang hanya menonjolkan sisi negatif lawan-lawannya. Idealnya kampanye melalui media online menonjolkan adu program atau adu debat secara konstruktif

yang berisi solusi permasalahan sosial politik dan ekonomi dalam masyarakat. "Harus diakui kampanye negatif dalam Pilkada melalui media online masih belum mengedepankan adu program antarpantai, atau antarpasangan calon pemimpin daerah. Namun masih sering digunakan saling hujat-menghujat, dan bahkan cenderung isu primordial", katanya.

Cornus menceritakan ketika Pilpres 2014, betapa media sosial banyak sekali digunakan untuk kepentingan kampanye negatif atau bahkan kampanye hitam. Kehadiran media online justru menjadi cermin dari ketidakdewasaan dalam berpolitik, saling menjelekan dan repotnya justru dengan vulgar mengangkat isu primordial, seperti isu SARA. "Patut disayangkan jika medsos digunakan untuk kampanye hitam yang primordialistik. Tetapi itulah faktanya, masyarakat kita masih belum mampu berpolitik secara dewasa dan beretika, sehingga kehadiran media online justru disalahgunakan untuk menyuburkan praktik politik primordialistik", ungkapnya.

Sementara itu sosiolog UGM, Heru Nugroho, memberikan penjelasan secara sosiologis ketika masyarakat mengalami proses digitalisasi. Diakukannya bahwa sekarang ini adalah era serba termediatisasi, tidak satu pun aspek kehidupan dalam masyarakat yang tidak terkena media baru berbasis web. Kehidupan sosial, politik, dan ekonomi, serta kebudayaan pun mengalami mediatisasi, dalam arti seringkali logika media lebih kuat daripada realitas sosiologis. "Gejala mediatisasi ini jika tidak dibaca secara kritis akan cenderung mendorong masyarakat membiarkan diri terseret ke logika media, sehingga media begitu berpengaruh. Padahal media adalah tidak netral dan sering melakukan politik representasi media. Oleh karena itu, dalam kehidupan sosial politik, kehadiran media baru perlu disikapi secara kritis melalui gerakan literasi media", tegasnya.

Yogyakarta telah menjadi satu kesatuan global karena terkoneksi melalui komunikasi jaringan berbasis web. Masyarakat online telah menjadi kenyataan yang tidak bisa dielakan kehadirannya. Dengan kata lain,

masyarakat kota Yogyakarta terkoneksi pada sistem komunikasi global yang berbasis web adalah sebuah keniscayaan, sebuah imperatif. Tidak ada jalan lain bahwa gerakan literasi media adalah sebuah keharusan agar mampu memanfaatkan media secara produktif. Lebih dari itu media adalah perlu disikapi secara kritis dengan melakukan transformasi kultural. Kehadiran media baru jika diikuti transformasi kultural akan termanfaatkan secara produktif.

Madiun **Informasi Sahih** **Demokrasi Sehat**

Di berbagai sudut ruang publik Kota Madiun (November 2016) sepi dari hingar bingar Pilkada Serentak. Gambar wajah-wajah calon peserta Pilkada baik incumbent atau calon-calon baru yang maju sebagai kepala daerah atau calon legislatif sama sekali tidak tampak.

Kota yang berjulukan Kota Gadis ini memang tidak masuk dalam deretan daerah yang melakukan pilkada serentak 2017. Walikota Bambang Irianto pun masih memiliki masa bakti sampai 2019, demikian pula dengan para legislator. Meski demikian, jalinan komunikasi tetap dilakukan dengan masyarakat baik melalui media konvensional (luring) ataupun melalui media daring (*online*) dan media sosial yang memanfaatkan internet.

Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Iroh Sunirah menyatakan pemerintah sudah memanfaatkan media sosial yang fokusnya ke pelayanan publik dan aduan masyarakat. Pengelolaan media online dan media sosial dilakukan oleh bagian Humas untuk menginformasikan kegiatan pemerintahan.

Sifat masyarakat yang masih mengutamakan tatap muka dan media massa membuat sosialisasi jarang dilakukan melalui media sosial, demikian juga di bidang politik. "Kampanye jarang menggunakan media sosial", tuturnya. Lebih jauh masyarakat cenderung tidak

mudah terprovokasi oleh berita-berita yang ada di media sosial.

Dedi Indar Pramana sebagai mahasiswa komunikasi di Universitas Merdeka Madiun juga merasakan hal yang sama di masyarakat Madiun. Sekalipun internet sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat Madiun, informasi yang berkembang di masyarakat menurutnya masih berimbang. Sekalipun banyak ujaran kebencian yang beredar, secara umum masyarakat Madiun cenderung tidak bergejolak.

Akan tetapi Dedi menyangkan masih ada orang-orang yang termakan berita yang disebarkan melalui media sosial yang kebenarannya masih perlu dibuktikan, terutama pada masa kampanye yang saling menjelekan. Secara pribadi ia berusaha memberikan komentar-komentar yang positif dan tidak menambahi dengan sumpah serapah.

Menurutnya internet seharusnya digunakan untuk hal-hal yang produktif seperti berdagang, bersosialisasi, dan diskusi berbagi pemikiran yang bermanfaat bagi kehidupan sosial. Secara khusus Dedi mengapresiasi kepala daerah yang sudah memanfaatkan media sosial untuk berinteraksi dengan masyarakat. Sehingga solusi permasalahan dapat lebih cepat terasa di lapangan.

Anggota DPRD Kota Madiun Ngedi Trisno Yusianto menyambut mendorong penggunaan teknologi internet oleh pemerintah daerah. Dukungan anggaran sudah diberikan kepada setiap SKPD. "Untuk meningkatkan informasi publik, menampung aspirasi dan laporan", kata wakil rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Pelayanan masyarakat pun menjadi lebih transparan terutama dalam bidang perpajakan. Petugas pajak tidak bisa lagi menggelapkan uang karena penerimaan daerah dapat terkontrol sesuai konfirmasi laporan dari masyarakat. Demikian juga dalam pengurusan perizinan, masyarakat kini dapat mengetahui dokumen pengajuan sudah sampai di tahap mana. Lebih jauh juga dapat mengurangi potensi terjadinya pungli.

Dalam aktivitas politik, Ngedi memanfaatkan peran sosial media untuk menjalin komunikasi dan peningkatan citra di masyarakat. Tanpa perlu mengeluarkan biaya yang terlalu mahal ia merasa bisa menjangkau lebih banyak orang. "Lebih efektif, tidak mahal, pesannya sampai", katanya. Kehadiran internet juga memudahkan pembelajaran apabila berhubungan dengan SKPD teknis. "Saya kan ngga ngerti istilah-istilah kesehatan sebelumnya, mengerti dengan google", katanya. Internet membantu Ngedi menjadi referensi dalam melaksanakan politik anggaran.

Menanggapi kemungkinan terjadinya kampanye negatif di media sosial, Ngedi berpendapat masyarakat sudah dewasa dan mampu memilah sesuai dengan kepentingannya. "Masyarakat tidak selalu bersentuhan dengan kepentingan", tuturnya. Sehingga apabila informasi politik tidak menyentuh kepentingan masyarakat tertentu, maka dampaknya akan minimal.

Lebih jauh Ngedi menyoroti pentingnya membangun kedewasaan bermedia di masyarakat yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan keluarga. Generasi muda harus diberi pembelajaran bersama mengenai informasi-informasi yang ada di dunia maya sehingga bisa menyaring hal-hal negatif. Pemblokiran konten negatif oleh pemerintah tidak akan bermanfaat banyak bagi Ngedi, karena sumber daya pemerintah yang terbatas. "Pemerintah mengawasi dan mengendalikan saja dengan segala keterbatasannya", tutur Ngedi.

Selain itu perlu diwaspadai juga penyebaran konten negatif dan paham-paham ekstrem yang disebarkan bukan melalui media online. Karena itu Ngedi lebih memandang perlunya upaya membangun mental spiritual diri masyarakat, salah satunya dengan mencari berguru pada tokoh agama yang benar.

Merambahnya penggunaan internet di masyarakat Madiun diamini oleh Wakil Dekan FISIKP Universitas Merdeka Madiun Bambang Martin Baru. "Pemanfaatan media sosial sangat luar biasa", katanya. Tidak hanya di konteks politik, tapi semua

masalah kehidupan sosial, ekonomi, hukum dan sebagainya.

Menyikapi perkembangan penyebaran informasi di media sosial, Bambang menyesali rendahnya nilai validitas informasi yang akan menimbulkan ragam persepsi nilai yang menyangkut kehidupan masyarakat. Ia mengibaratkan pada lingkungan kampus yang tingkat intelektualnya di atas rata-rata saja sering terjadi perdebatan sengit, apalagi di tingkat masyarakat awam. Bersliwerannya informasi di media sosial dapat menyebabkan benturan-benturan di masyarakat yang terusik kepentingannya.

Bambang menyayangkan tidak ada media yang bisa dijadikan rujukan kebenaran atas situasi atau isu yang berkembang. Ia sendiri selalu membandingkan informasi yang diterima di media sosial dengan media elektronik untuk mendapatkan informasi yang benar. "Pada media elektronik televisi, informasi bisa dipertanggungjawabkan secara moral, kalau media sosial kan masih dipertanyakan", katanya.

Menurut pengamatan Bambang, informasi yang beredar di media sosial lebih banyak yang skalanya nasional atau dari Jakarta. Tidak banyak informasi yang berskala lokal Madiun dan sekitarnya. Namun ia menyayangkan banyak informasi yang tidak benar beredar di media sosial. Sehingga apapun yang terjadi di pusat, masyarakat Madiun umumnya mengetahui dan bisa menyikapi berbekal informasi yang ada. Di sisi lain pemerintah Kota Madiun lebih banyak menyampaikan informasi-informasi yang monoton, seremonial, dan kepentingan transparansi layanan.

Dalam suasana pesta demokrasi, penggunaan media sosial dan internet untuk kampanye belum banyak dilakukan oleh para kandidat. Lingkungan Kota Madiun belum terbiasa sehingga penggunaan metode kampanye konvensional lebih mendominasi. "Pilkada kampanyenya dilakukan langsung", kata Bambang berbekal pengalaman pilkada sebelumnya.

Bambang mengapresiasi tindakan blokir atas akun-akun dan situs internet bermuatan negatif yang dilakukan oleh

Kementerian Komunikasi dan Informatika. Akan tetapi jika terus dilakukan tugas Kemenkominfo tidaklah mudah karena lebih banyak lagi akun yang muncul. Ia berpendapat sebaiknya Kemenkominfo menjadi rujukan informasi bagi masyarakat sebagai bandingan informasi di media sosial. "Kominfo ditingkatkan lagi dalam rangka menyuguhkan media-media sosial yang memiliki akurasi informasi", kata Bambang. Apalagi informasi seputar politik yang tingkat kepentingannya sangat kental.

Bekerjasama dengan pemerintah daerah dan institusi pemerintah lainnya yang bergerak dalam dunia media sosial, Kemenkominfo harus memperbarui informasi-informasi yang berkembang sehingga masyarakat tidak langsung percaya begitu saja terhadap media sosial. "Agak sedikit kerja keras menanggulangi hal-hal negatif", kata Bambang. Tugas beratnya adalah harus menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai akun-akun pemerintah di media sosial. Pemerintah daerah pun dituntut aktif melakukan sosialisasi dan memberikan informasi perbandingan yang sifatnya nasional, tidak lagi regional.

Pelibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam proses pendidikan politik juga dipandang perlu oleh Bambang. Sebagai penyeimbang atau pengawas pemerintah, LSM diharapkan ikut mengedukasi masyarakat mengenai perlunya kedewasaan dalam menggunakan informasi yang beredar di berbagai media terutama media sosial. Bagi Bambang, pendidikan politik sangat penting bagi masyarakat dan menjadi tanggung jawab pemerintah, partai politik, dan LSM yang semuanya berjalan selaras.

Banjarmasin

Kita disini melakukan penelitian tentang media dan kewarganegaraan demokratis. Sejuahmana subjek individual warga masyarakat menggunakan media sehingga menjadi lebih aktif peduli dan berperan serta dalam kehidupan publik menjadi perhatian utama penelitian. Subjek individual warga masyarakat sangatlah beragam. Masing-

masing memiliki individualitas dan otonominya sebagai anggota keluarga dan warga masyarakat. Individualitas demikian itu tidak bisa diabaikan. Media dalam hal ini berperan memperantarai keaktifan mereka dalam kehidupan publik.

Media dimaksud disini terutama media cetak atau tertulis, seperti koran, dan media elektronik, seperti HP, internet dan komputer. Penelitian ini ingin menemukan bagaimana keaktifan warga menggunakan media komunikasi di ruang publik. Keaktifan warga dalam kehidupan publik disini dilihat mengindikasikan karakteristiknya sebagai warga negara, sebuah kategori subjek politik terbentuk karena keaktifan individual warga dalam kehidupan publik. Berbagai sektor publik yang menjadi perhatian dalam penelitian ini, sesuai dengan karakteristik kota Banjarmasin, antara lain pasar, pelabuhan, sungai, terminal dan perkumpulan warga terbentuk berkaitan dengan urusan publik di sektor ini.

Menurut Husin Lutfie, Kabid Kominfo, Dishub Kominfo, Pemkab Banjarmasin, arena atau ruang publik tempat warga beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari di kota Banjarmasin dapat ditemukan di jalur sungai Martapura, dari depan walikota Banjarmasin hingga sentra Antasari. Dalam jalur ini bisa ditemukan ruang publik dimaksud, antara lain pasar dermaga atau pelabuhan Pasar Baru, dermaga atau pelabuhan Tambon, pasar dermaga atau pelabuhan Sudimampir, dan disebatang itu terdapat terminal sekaligus ruang publik terpenting di kota Banjarmasin yaitu sentra Antasari. Sentra Antasari ini merupakan ruang publik di tengah kota yang khas, selain merupakan plaza terbuka tempat warga bisa berkumpul, juga terdapat terminal angkutan kota Banjarmasin yang menghubungkan warga dengan dua fasilitas publik penting di kota ini, yaitu Pasar Antasari dan kompleks pertokoan atau pusat perbelanjaan Ramayana. Penelitian ini dilakukan di sepanjang jalur sungai Martapura, di tengah kota Banjarmasin, mulai dari dermaga pelabuhan Pasar Baru, di sebelah kantor Walikota Banjarmasin, hingga sentra Antasari di tengah kota Banjarmasin.

Dermaga atau pelabuhan Pasar Baru, Banjarmasin, merupakan ruang publik menghubungkan sungai Martapura dengan

Pasar Baru. Di dermaga ini aktivitas warga cukup ramai. Di dermaga pasar baru tiap hari terdapat kapal *Klotok*, sebutan kapal kecil pengangkut barang dan penumpang di kota itu, singgah. Berbagai jenis kapal *Klotok* singgah disini, seperti kapal *Klotok* pengangkut penumpang dan barang, dan kapal *Klotok* warung terapung. Di dermaga Pasar Baru ini kita mendapati ruang publik yang luas, tempat bertemu banyak orang dari berbagai kampung di sekitar kota Banjarmasin. Di tempat ini pula terdapat TV umum, dipasang di tempat terbuka, dilihat orang dalam kesehariannya, meski tidak ada telepon umum kita jumpai sehingga mengurangi bobot sifat kepublikannya.

Menurut Ardiansyah, seorang warga dan sekaligus tetua sehari-hari bekerja di Pasar Baru, kebanyakan orang disini berkumpul dalam kesehariannya melihat TV sambil duduk di warung pinggir sungai Martapura. Secara personal, masing-masing orang kini punya HP sebagai sarana berkomunikasi antar individual warga. Namun, juga mereka sekaligus memanfaatkan TV publik sebagai sarana mendapatkan informasi dari dunia luar. Media komunikasi melalui HP kini masif digunakan orang. Tidak terkecuali para pedagang, pemilik toko dan pemilik kapal *Klotok* pengangkut barang dan penumpang sebagai sarana penghubung aktivitas perdagangan. Dikatakan pula, kegunaan HP untuk kepentingan bisnis perdagangan, atau urusan individual private ini, sangat besar. Sementara itu, penggunaan HP untuk kepentingan publik, atau pembentuk kehidupan publik, seperti pembentukan forum warga membicarakan kelancaran transportasi, atau meningkatkan kepedulian pada lingkungan, terasa masih sangat kurang.

Berbeda dengan di ruang publik Pasar Baru, penggunaan sarana komunikasi yang lebih luas selain HP yang memiliki kemanfaatan publik yang lebih luas dapat kita temukan di dermaga pelabuhan Tambon dan pasar Sudimampir. Selain kapal *Klotok*, disini juga berlabuh kapal yang lebih besar, seperti KM. Muara Sumber 02. Kapal ini dalam jalurnya berlayar dari pelabuhan Tambon ke dermaga Muarabahan, di Sungai Barito, Kalimantan Tengah. Dikatakan Rahman, pengemudi kapal ini, media digunakan untuk komunikasi di kapal ini bukan HP tetapi Radio Orari. Terdapat tiga (3) chanel dimiliki Radio Orari di kapal

ini yang menghubungkan antar lokasi di Banjarmasin, di sepanjang sungai Barito hingga di dermaga Muarabahan. Radio Orari ini lebih berorientasi pada kepentingan publik daripada HP yang jarang digunakan pengemudi kapal ini. Kegunaannya selain mencegah kecelakaan antar kapal juga untuk mengkomunikasikan berbagai situasi berlangsung di dalam perjalanan. Selain Radio Orari, di dalam kapal juga terdapat TV untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi dari dunia luar.

Pemanfaatan media sebagai penghubung individual warga dengan kehidupan publik luas juga kita temukan di terminal sentra Antasari. Sama seperti di tempat lain, media digunakan sebagian pengguna angkutan kota adalah HP. Namun, dalam hal ini penggunaannya belum meningkat digunakan untuk kepentingan publik. Demikian pula, sarana mendapatkan informasi publik dari TV umum atau koran juga sangat rendah di tempat publik ini. Penggunaan HP dikalangan pengemudi angkutan kota masih sebatas digunakan untuk urusan pribadi dan belum banyak diorientasikan kemanfaatannya untuk urusan publik atau untuk perbaikan sarana angkutan kota.

Menurut Rahmadi, pengelola dan pengelola angkutan kota di terminal sentra Antasari, hampir semua pengemudi angkutan kota kini memiliki HP sebagai penghubung komunikasi pribadi. Namun, hanya kurang dari mereka menggunakannya untuk berkomunikasi dalam urusan dengan penumpang atau dalam urusan kepentingan publik dalam kaitannya dengan perbaikan terminal atau urusan perbaikan transportasi kota. Hal itu tidak terlepas dari kemandegan terjadi dalam transportasi publik berlangsung di kota ini. Ketersediaan angkutan kota sekarang ini semakin menurun, tinggal 400 unit dari dulunya sekitar 1000 unit. Demikian pula, dalam soal jalur, sekarang tinggal 16 jalur dari dulunya 37 jalur. Situasi kemunduran itu selain ditandai menurunnya jumlah angkutan kota, juga terdapat ketidakjelasan pengaturan antara angkutan dalam kota dengan angkutan luar kota. Banyak angkutan penghubung dari luar kota kini juga memasuki sentra Antasari, yang dengan itu mengurangi aktivitas angkutan dalam kota.

Persoalan publik ini, menurut Rahmadi,

penting diatasi untuk menjadikan kota Banjarmasin sebagai kota masa depan. Sentra Antasari sendiri sesungguhnya merupakan plaza ideal tempat bertemunya orang dari berbagai kalangan di kota Banjarmasin. Ketersediaan ruang publik seperti itu sangat penting bagi pembentukan kesadaran warga sebagai warga kota. Sentra Antasari sebagai ruang publik menghubungkan warga dengan tempat publik penting di kota ini, pasar Antasari, sebagai pasar induk di kota Banjarmasin, dan kompleks pertokoan, pusat perbelanjaan Ramayana, pusat hiburan, serta taman kota. Bila dikelola dengan baik, hal itu akan menumbuhkan kesadaran warga sebagai warga kota dan juga sekaligus perbaikan kota sebagai ruang publik. Untuk itu, ke depan, menurut Rahmadi, perbaikan sentra Antasari sangat penting dilakukan. Termasuk pentingnya membuat forum antar tiga pihak, terutama melibatkan pengelola terminal sentra Antasari, pengelola pasar Antasari dan pengelola kompleks pertokoan dan pusat pembelajaran Ramayana. Terbentuknya forum publik plaza kota ini penting difasilitasi pembuat kebijakan, terutama politisi dan pejabat publik di kota Banjarmasin.

Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa masyarakat kota Banjarmasin kini berada di atas platform bekerjanya masyarakat komunikasi ditandai begitu meluasnya penggunaan HP sebagai media komunikasi antar individu untuk urusan pribadi. Termasuk untuk urusan *private* berkaitan dengan aktivitas perdagangan. Perluasan penggunaan HP sebagai media komunikasi personal ini membuat individualitas warga semakin meningkat di tengah homogenisasi konsumsi yang sedang berlangsung diciptakan aktivitas perdagangan. Di tengah individualitas yang semakin menguat, namun disertai otonomi yang begitu rentan sebagai akibat homogenisasi konsumsi sedang berlangsung, pembentukan kehidupan publik menjadi begitu berserak. Pembentukan kesadaran individual warga sebagai warga publik, atau sebagai warga negara, dengan kepedulian dan aktivitas diperlukan untuk perbaikan publik, dengan itu menjadi tersendat. Menghadapi masalah ini, ke depan, diperlukan perluasan penggunaan media publik untuk menjembatani mereka sehingga terbentuk kehidupan publik yang terbuka dan

demokratis. Hal itu bisa dilakukan dengan menaikkan skala penggunaan media HP dari semula hanya untuk urusan pribadi menjadi lebih berorientasi pada urusan publik, maupun dengan memperbanyak terbentuknya forum komunikasi antar sektor dan pihak berorientasi pemecahan masalah dan perbaikan kehidupan publik.***

Lampung Pemanfaatan Media Sosial : Wajar dan Tak Berlebihan

Sebagai sebuah daerah dengan masyarakat multikultur, Lampung sesungguhnya jadi Propinsi yang punya potensi besar dalam meningkatkan kualitas pembangunan daerah. Namun potensi ini tentu harus dikelola dengan baik dan bijak, dengan tujuan utamanya adalah sepenuhnya untuk kemajuan daerah.

Hal ini disadari para peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diselenggarakan serentak pada gelombang kedua di Bulan Februari tahun 2017 mendatang di Provinsi berjuluk Sai Bumi Ruwa Jurai tersebut. Dinamika politik pun mulai terlihat dengan adanya peningkatan aktivitas politik pasca penetapan pasangan calon peserta Pilkada di Kabupaten Mesuji, Pringsewu, Tulangbawang Barat, Tulangbawang, dan Lampung Barat. Para pasangan calon mulai aktif melakukan pendekatan berbagai cara kepada masyarakat salah satunya melalui media.

Keberhasilan kampanye melalui media, terutama melalui media *online* saat ini menjadi sebuah keniscayaan. Media *online* dan media sosial seperti *facebook*, *twitter*, *instagram*, *path*, dan beberapa lagi lainnya diyakini sangat efektif untuk turut meningkatkan dukungan masyarakat kepada peserta pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu eksekutif di tingkat nasional dan daerah. Namun demikian, tidak sedikit pula masalah timbul selama masa pilkada akibat dari penggunaan media online tersebut. Sebut saja masalah ujaran kebencian dan fitnah yang ujung-ujungnya menjadi kampanye

hitam atau *black campaign* dengan tujuan menjatuhkan pamor dari pihak kompetitor. Perilaku tersebut tentu saja meresahkan karena menimbulkan ketidaknyamanan dan memicu terjadinya konflik di masyarakat. Meski demikian, hal tersebut tidak terjadi di Provinsi yang terkenal dengan kain tapisnya ini.

Menurut Kepala Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Lampung, Dr. Nanang Trenggono, M.Si., pemanfaatan media *online* dan media sosial untuk kampanye selama masa Pilkada masih wajar dan tidak berlebihan. Para peserta dan pendukungnya sejauh ini memanfaatkan media ini hanya untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang program mereka ketika terpilih serta kegiatan sosial yang sedang dilakukan.

“Biasanya mereka meng-*upload* kegiatan seperti kunjungan ke panti asuhan, atau ke acara-acara yang diadakan oleh masyarakat seperti pengajian,” ujarnya.

“Hal-hal yang disampaikan melalui media sosial dan media online ini umumnya bersifat informatif untuk sosialisasi kepada masyarakat saja,” tambah Nanang.

Hal senada diutarakan oleh Ketua Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, Dr. Ari Darmastuti, M.A.. Menurutnya, media sosial memang menjadi primadona ketika Pilkada terutama pada masa kampanye karena dapat menarik perhatian dari golongan muda terutama mereka yang termasuk pemilih pemula.

“Anak muda cenderung akrab dengan media sosial dan mereka cepat sekali membuat sebuah informasi menjadi viral, itu menguntungkan bagi peserta Pilkada karena mereka akan semakin dikenal luas di masyarakat,” tuturnya.

Sejauh ini, kata Ari, belum ditemukan adanya kasus ujaran kebencian atau yang masuk kategori *black campaign* selama masa Pilkada di daerah Provinsi Lampung. Jikapun ada, hal tersebut tidak terkait Pilkada, tapi lebih pada kepentingan-kepentingan pribadi atau persoalan sosial. Misalnya sengketa lahan atau perebutan sumber daya alam.

Kabid Poldagri Badan Kesbangpol Prov

Lampung, H. Sukiran, SH., menyatakan sejauh ini pihaknya belum menemukan atau mendeteksi ada kericuhan pada masa Pilkada yang disebabkan oleh berita yang ada di situs media *online* atau pun melalui media sosial.

Terdapat banyak faktor mengapa dinamika politik Pilkada melalui media *online* dan media sosial tidak begitu terasa di Provinsi Lampung, antara lain pertama, masyarakat setempat kurang antusias dengan isu politik di daerahnya dibanding dengan isu lainnya. Kedua, tidak seluruh masyarakat akrab dengan media *online* dan media sosial. Selain itu, ada pula semacam komitmen bersama di antara beberapa kelompok masyarakat dan juga komunitas di Lampung untuk bersikap netral selama masa Pilkada.

“Meski sangat dekat dengan media sosial, tapi mereka tidak tertarik dengan isu politik,” ujar Sukiran.

Meski situasi Pilkada Lampung cenderung aman dan kondusif, pihak Badan Kesbangpol Provinsi Lampung tetap melakukan langkah antisipatif untuk menjaga situasi ketertiban dan keamanan masyarakat selama masa Pilkada. Langkah antisipatif tersebut adalah dengan melakukan rapat koordinasi dengan KPUD, Bawaslu Daerah, Badan Intelegen Negara (BIN) dan Polda setempat. Selain itu, tidak hanya Badan Kesbangpol Prov Lampung saja yang berupaya melakukan antisipasi agar Pilkada berjalan lancar. KPUD sebagai pihak penyelenggara Pilkada pun berupaya melakukan pendidikan politik baik kepada peserta Pilkada maupun kepada masyarakat sebagai pemilih pasangan calon yang berlaga di Pilkada. Pendidikan politik tersebut antara lain melalui diskusi terbuka dengan masyarakat dan dengan menyelenggarakan Kursus Pemilu.

Antisipasi penyelenggaraan Pilkada agar aman dan kondusif sebenarnya juga sudah dilakukan lembaga terkait dengan membatasi penggunaan media sosial oleh peserta pilkada. Hal ini dilakukan agar mencegah adanya masalah akibat dari penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab. Peserta Pilkada hanya

diperbolehkan untuk menggunakan minimal 3 jenis media sosial saja untuk kampanye dan akun media sosial tersebut harus dilaorkan kepada KPU/KPUD. Meski begitu, pengawasan media sosial untuk kampanye dalam Pilkada memang sulit, terutama pada akun kampanye tidak resmi atau yang tidak dilaporkan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

Di sisi lain, masyarakat pun menyadari manfaat media *online* dan media sosial terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. Masyarakat di provinsi Lampung sudah tanggap untuk menggunakan media sosial untuk menanggapi program kerja pemerintah daerah setempat. Mereka tidak ragu menggunakan media sosial untuk menyampaikan pendapat, keluhan, saran dan kritik kepada pemerintah daerah terutama tentang pembangunan daerahnya.

Penutup

Begitulah, serba-serbi dinamika politik di daerah ketika memasuki era digitalisasi yang ditandai kehadiran media baru. Tidak satu pun mengingkari bahwa kehadiran media baru akan terus merasuk dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat baik itu politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Meskipun di daerah, ternyata pergeseran dari masyarakat *offline* ke masyarakat *online* telah terasa begitu kuat resonansinya. Perilaku masyarakat telah termediatisasi sebagai implikasi terus meluasnya pembangunan infrastruktur

telekomunikasi. Warga masyarakat pun akhirnya semakin akrab dengan media baru, terutama kehadiran *smartphone* yang semakin murah dan menembus ke lapisan masyarakat kelas bawah.

Kehadiran media baru itu pun kemudian menjadi faktor penting bagi denyut perpolitikan di daerah. Dalam bidang pemerintahan, media baru telah dimanfaatkan untuk membangun *good governance* dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Masyarakat warga semakin terlibat secara intensif terhadap berbagai proses politik di daerah. Tidak terkecuali ketika memasuki Pilkada serentak 2017, media baru juga semakin menempati posisi penting. Hanya saja, oleh karena karakternya yang anonim, media sosial sering kali lebih banyak dimanfaatkan untuk kampanye negatif. Meski belum sampai terbentuk kebiasaan dalam melakukan ujaran kebencian, akan tetapi tanda-tanda ke arah sana sudah semakin terasa.

Oleh karena itu, masyarakat di daerah berharap bahwa pemerintah, dalam hal ini Kemkominfo perlu secara proaktif mencegah terjadi praktik *bermedia* yang tanpa mengindahkan etika. Bukan saja dengan melakukan pengetatan regulasi, yang jauh lebih penting adalah keterlibatan secara aktif dalam gerakan cerdas *bermedia*. Bersamaan dengan itu, segenap masyarakat sipil sendiri juga harus ikut terlibat secara aktif untuk melakukan pendidikan politik warga, sehingga pemanfaatan media baru juga semakin konstruktif dan produktif.



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
Direktorat Pengelolaan Media Publik

Menuju Masyarakat Informasi Indonesia